



DARI KRISIS MENUJU KEMANDIRIAN:

SATU TAHUN PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL

OKTOBER 2024 - OKTOBER 2025

2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
OKTOBER 2024 - OKTOBER 2025**

Diterbitkan oleh



Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

OKTOBER 2024 - OKTOBER 2025

TIM PENYUSUN:

Pengarah

Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
(Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian)

Penanggung Jawab

Seta Rukmalasari Agustina, S.P., M.M.A., M.Sc.
(Kepala Biro Perencanaan)

Intan Rahayu, S.Si., M.T.

(Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian)

Ketua

Zainul Azmi, SP, M.Ec. M.SE., Ph.D.
(Ketua Kelompok Pemantauan Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Pertanian)

Sekretaris

Mirza Sativa, S.P., M.Si.

Anggota

Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P.

Dani Abdul Aziz, S.P., M.M.

Galih Prabowo, S.E., M.A.P.

Andry Polos, S.Kom., M.Si

Akbar Choer, S.Pt.

Adi Nurahmat, S.S., M.M.

Handi Wiranata, S.Kom., M.M.

Ruri Sitaresmi, S.P.

Tia Aryani, S.E.

Etikaningrum, S.Pt., M.Si.

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Segala bentuk pengandaan, penerjemahan, atau memproduksi baik melalui media cetak maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.



SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan setiap tantangan menuntut keberanian untuk menjawabnya. Satu tahun terakhir menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak pernah kehilangan daya juang untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan.

Ketika saya dipercaya kembali oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Kementerian Pertanian pada 21 Oktober 2024, saya menerima satu perintah yang sangat jelas: Indonesia harus segera swasembada pangan. Awalnya ditargetkan empat tahun, lalu dipercepat menjadi tiga, hingga akhirnya diperintahkan untuk dicapai hanya dalam waktu satu tahun. Sebuah target yang bagi sebagian orang terdengar mustahil, tetapi bagi kami di Kementerian Pertanian, itu adalah panggilan tanggung jawab sekaligus kehormatan.

Sejak hari pertama, kami langsung bekerja tanpa waktu adaptasi panjang. Kami benahi data dan sistem perencanaan, restrukturisasi kelembagaan agar lebih fokus dan efisien, pastikan subsidi pupuk dan alat mesin pertanian tersalurkan tepat sasaran, serta dorong percepatan tanam di seluruh sentra produksi. Semua bergerak dalam satu komando dan tekad: mewujudkan kemandirian pangan dalam waktu singkat.

Langkah besar ini dimulai di tengah situasi yang tidak mudah—perubahan iklim ekstrem, ketegangan geopolitik, dan tekanan ekonomi pascapandemi. Namun justru dalam kondisi sulit itulah kekuatan bangsa diuji, dan kita belajar bahwa krisis adalah momentum untuk berbenah.

Selama satu tahun terakhir, sektor pertanian kembali menjadi jangkar stabilitas nasional. Produksi padi meningkat tajam; produktivitas jagung, kedelai, dan hortikultura membaik; kesejahteraan petani menguat; dan investasi tumbuh positif. Restrukturisasi organisasi turut mendorong lompatan ini melalui pembentukan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) yang memfokuskan pengelolaan lahan dan air, serta transformasi BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) untuk mempercepat modernisasi pertanian. Bersama reformulasi kebijakan pupuk, pompanisasi massal, dan penguatan cadangan beras pemerintah, langkah-langkah ini memperlihatkan hasil nyata.

Puncaknya, dunia kini mengakuinya. Pada 23 September 2025, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras dan mulai membantu negara lain, termasuk menyalurkan bantuan beras ke Palestina. Pernyataan itu menggema di forum dunia sebagai simbol kebangkitan bangsa yang berhasil mengubah ketergantungan menjadi kemandirian.

Bagi kami di Kementerian Pertanian, momen itu bukan akhir dari kerja keras, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Swasembada bukan hanya soal angka produksi, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan bagi petani. Kami harus memastikan keberhasilan hari ini benar-benar dirasakan di sawah dan dapur rakyat kecil yang kini bisa makan dari hasil bumi sendiri.

Saya meyakini, masa depan pertanian Indonesia tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar subsidi, tetapi oleh seberapa tinggi produktivitas dan daya saingnya. Karena itu, Kementerian Pertanian akan terus memperkuat tata kelola dan kolaborasi lintas sektor agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi petani dan masyarakat.

Laporan kinerja ini, yang kami beri judul *Dari Krisis Menuju Kemandirian: Satu Tahun Percepatan Swasembada Pangan Nasional* bukan sekadar dokumentasi birokrasi, melainkan catatan sejarah tentang bagaimana bangsa ini bangkit dan membuktikan bahwa kemandirian pangan bukan lagi cita-cita jauh, melainkan kenyataan yang kita capai bersama. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, peneliti, akademisi, mitra swasta, dan tentu para petani Indonesia. Keringat dan kerja keras Anda semua adalah fondasi keberhasilan ini.

Kita belum berhenti. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan swasembada ini bertahan dan berkembang menjadi sistem pangan nasional yang tangguh, efisien, dan berkeadilan. Dengan semangat gotong royong, inovasi, dan keikhlasan bekerja, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat atas pangannya dan menjadi salah satu lumbung pangan dunia yang disegani.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mengabdikan kepada rakyat dan negeri tercinta ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Menteri Pertanian

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga buku “*Dari Krisis Menuju Kemandirian: Satu Tahun Percepatan Swasembada Pangan Nasional*” ini dapat disusun dan disajikan kepada para pembaca. Buku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus refleksi atas kinerja Kementerian Pertanian selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Penyusunan laporan ini memiliki maksud untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah kebijakan, capaian kinerja, serta berbagai terobosan yang telah ditempuh Kementerian Pertanian dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Sasaran pembacanya mencakup para pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, pemerhati pertanian, serta masyarakat luas yang ingin memahami langkah nyata dan strategi kebangkitan sektor pertanian Indonesia dari tekanan krisis menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tahun 2024–2025 merupakan fase yang menentukan bagi kebangkitan pertanian nasional. Setelah melalui masa penuh tekanan akibat ketidakpastian global, perubahan iklim ekstrem, dan disrupsi rantai pasok, Kementerian Pertanian berhasil menunjukkan ketangguhan dan daya adaptasi tinggi. PDB pertanian tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat, menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani. Neraca perdagangan pertanian tetap surplus, investasi meningkat, dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tetap signifikan.

Capaian yang paling menonjol adalah meningkatnya produksi pangan strategis, terutama padi dan jagung, yang mendorong stok beras nasional di gudang Bulog mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Langkah-langkah stabilisasi harga pangan pokok juga berhasil menjaga daya beli masyarakat dan inflasi pangan tetap terkendali. Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan produksi hortikultura, perkebunan, dan peternakan, serta efisiensi pemanfaatan lahan, air, pupuk, dan alsintan yang kian membaik.

Berbagai hasil tersebut tidak lepas dari keberanian Bapak Menteri Pertanian dalam melakukan kebijakan terobosan yang menjadi tonggak perubahan. Di antaranya adalah restrukturisasi kelembagaan untuk memperkuat tata kelola berbasis meritokrasi dan efektivitas birokrasi; *refocusing* dan efisiensi anggaran agar setiap rupiah belanja menghasilkan dampak nyata di lapangan; serta reformulasi kebijakan pupuk bersubsidi yang menyederhanakan regulasi, memperjelas mekanisme penyaluran, dan mengefektifkan alokasi kuota pupuk bagi petani yang berhak.

Selain itu, pengalihan status penyuluh pertanian ASN daerah ke Kementerian Pertanian yang akan efektif mulai tahun 2026 dan sudah diinisiasi di tahun 2025 melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, menjadi langkah besar dalam memperkuat sistem pembinaan petani secara nasional. Program Brigade Pangan digerakkan untuk memperkuat respon cepat terhadap ancaman krisis pangan di daerah rawan. Kebijakan pompanisasi dijalankan secara masif guna mengoptimalkan lahan kering dan tadah hujan, dan berbagai kebijakan terobosan lainnya dijalankan secara konsisten sehingga berhasil menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi sektor pertanian nasional.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat, bukan hanya bagi jajaran internal Kementerian Pertanian, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan nasional. Lebih dari itu, semoga buku ini dapat menginspirasi semangat kolektif untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan bangsa dan penggerak ekonomi rakyat. Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini — jajaran unit eselon I di Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, para penyuluh, petani, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh insan pertanian Indonesia yang telah bekerja tanpa lelah untuk kemajuan negeri ini. Semoga upaya dan dedikasi kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jakarta, 22 Oktober 2025
Plt. Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.



PROLOG

Swasembada Pangan: Mandat, Harapan, dan Langkah Nyata

Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian nasional di tengah arus globalisasi yang terus bergerak cepat dan perubahan tatanan ekonomi dunia yang semakin dinamis. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Tidak hanya sekedar sebagai penyedia pangan, pertanian menjadi fondasi kemandirian ekonomi dan instrumen pemerataan kesejahteraan. Dari hamparan sawah di pelosok desa hingga komoditas unggulan ekspor yang memperkuat devisa negara, pertanian memainkan peranan strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2025, sektor pertanian berperan sebagai penggerak utama pencapaian kedaulatan pangan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan. Sektor ini juga menjadi tumpuan utama pemerataan kesejahteraan nasional, karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi pilar utama dalam pengentasan kemiskinan.

Pada periode tahun 2024–2025 menjadi masa penting bagi Kementerian Pertanian dalam meneguhkan arah pembangunan pertanian nasional yang berorientasi pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Tantangan global yang semakin kompleks, mulai perubahan iklim, disrupsi rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik, fluktuasi harga pangan dunia, serta dinamika sosial ekonomi di tingkat domestik menuntut kebijakan yang adaptif dan terukur. Indonesia harus mampu memperkuat sistem pertaniannya dari hulu ke hilir. Tantangan domestik seperti alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan pembiayaan, serta menurunnya minat generasi muda terhadap profesi petani, menambah daftar permasalahan yang harus diatasi dengan kebijakan yang adaptif dan solutif.

Namun, di balik tantangan tersebut, terbuka pula peluang besar yang harus dimanfaatkan. Kemajuan teknologi digital, mekanisasi pertanian, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat serta keberlanjutan

lingkungan membuka ruang bagi transformasi sektor pertanian ke arah yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Saat ini, pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan fisik yang konvensional, tetapi menjadi ladang inovasi yang melibatkan sains, teknologi, dan kewirausahaan. Inilah era baru pertanian Indonesia. Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Kementerian Pertanian telah merumuskan serangkaian strategi dan kebijakan yang terstruktur dan terarah. Kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Kebijakan diarahkan pada satu tujuan besar yaitu mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan petani dan keamanan pangan nasional.

Buku ini hadir sebagai wujud akuntabilitas publik dari Kementerian Pertanian atas capaian, tantangan, dan arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan mandat pembangunan pertanian Indonesia. Buku ini menggambarkan perjalanan pembangunan pertanian dalam satu tahun terakhir, mulai dari capaian program prioritas, respon terhadap isu strategis, hingga arah kebijakan pertanian ke depan. Penyusunan buku ini tidak hanya bertujuan untuk melaporkan hasil kerja, tetapi juga untuk membangun transparansi dan mendorong partisipasi publik dalam mengawal arah pembangunan pertanian nasional.

Bab Pertama, Visi Menuju Swasembada Pangan, mengantarkan pembaca untuk memahami peran penting Kementerian Pertanian dalam menopang perekonomian nasional. Visi tersebut menekankan pentingnya kemandirian dalam produksi pangan, ketersediaan pangan yang terjamin sepanjang waktu, dan penguatan daya saing komoditas dalam negeri. Pembaca dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi dan benih unggul, modernisasi sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian. Restrukturisasi organisasi Kementerian Pertanian diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas subsektor dan memastikan setiap program berjalan dengan sinergi menuju satu tujuan besar yaitu terwujudnya swasembada pangan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab Kedua, Kinerja Pembangunan Pertanian Tahun 2024–2025, menyajikan capaian nyata pembangunan pertanian selama periode 2024–2025. Cakupan pembahasannya meliputi perkembangan indikator makro pertanian, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, penyerapan tenaga kerja, investasi, neraca perdagangan, dan kesejahteraan petani. Pembaca akan memperoleh gambaran terkait capaian produksi berbagai komoditas strategis di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Capaian produksi komoditas pertanian tersebut tidak lepas dari pelaksanaan beberapa program terobosan, seperti peningkatan luas tanam melalui pompanisasi dan optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, perbaikan sistem irigasi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian.

Selain itu, kinerja faktor pendukung seperti reformasi birokrasi, penguatan sistem penyuluhan, pengembangan SDM pertanian, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran menjadi bagian penting dari kesuksesan Pembangunan pertanian. Kementerian Pertanian juga terus berupaya menjaga efisiensi dalam tata kelola dan mendorong transformasi digital di seluruh lini kerja agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Bab Ketiga, Kebijakan Terobosan Pembangunan Pertanian 2024–2025, mengulas langkah-langkah inovatif dan strategis yang mengarah pada peningkatan kinerja sektor pertanian. Beberapa kebijakan terobosan di antaranya restrukturisasi kelembagaan berbasis sistem merit, refocusing dan efisiensi anggaran, reformulasi pupuk bersubsidi, pengalihan penyuluh ASN daerah ke Kementerian Pertanian, hingga program Brigade Pangan dan Pompanisasi menjadi wujud konkret upaya Kementerian Pertanian mempercepat produksi pangan nasional di tengah ancaman iklim ekstrem. Berbagai Langkah terobosan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh dan mandiri.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Pertanian juga melakukan berbagai langkah strategis berperan aktif menjaga stabilitas pangan. Kementerian Pertanian juga melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga lain terkait inisiasi dalam penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, peningkatan cadangan beras pemerintah, dan upaya stabilisasi harga pangan strategis. Selain itu, penguatan penegakan hukum dan pemberantasan mafia pangan dijalankan untuk melindungi kepentingan petani dan konsumen dari praktik yang merugikan pasar. Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi sistem pertanian nasional yang menekankan digitalisasi, inovasi teknologi, dan tata kelola berbasis data. Melalui kebijakan-kebijakan terobosan ini, Kementerian Pertanian berkomitmen membangun sistem pertanian yang tangguh, transparan, dan berdaya saing menuju swasembada pangan berkelanjutan menjadi agenda penting agar sektor ini tidak kehilangan generasi penerus.

Bab Keempat, Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, menyajikan arah kebijakan jangka menengah ke depan, sebagai bagian dari strategi besar menuju kedaulatan dan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam bab ini, ditekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penerapan prinsip tata kelola yang baik dan bersih, serta komitmen untuk terus mendorong inovasi dan modernisasi pertanian. Penguatan regenerasi petani melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan kewirausahaan menjadi agenda penting agar sektor ini tidak kehilangan generasi penerus.

Keseluruhan isi buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca mengenai arah dan capaian pembangunan pertanian Indonesia selama periode 2024-2025. Buku ini tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan dan praktisi pertanian, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami dinamika, tantangan, dan arah baru pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan semangat kolaboratif dan visi Kementerian Pertanian, kita percaya bahwa pertanian Indonesia akan menjadi motor utama kemandirian bangsa dan penopang masa depan yang lebih sejahtera, berdaulat, dan berkelanjutan.



Daftar Isi

	Halaman
Sambutan Menteri Pertanian	i
Kata Pengantar	iii
Prolog	v
Daftar isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xiv
BAB I VISI MENUJU SWASEMBADA PANGAN	1
1.1. Kinerja Sektor Pertanian Periode Sebelumnya	3
1.1.1. Indikator Kinerja Makro Pertanian	3
2.1.1. Kinerja Produksi Sektor Pertanian	6
1.2. Permasalahan dan Tantangan	10
1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Pertanian: Swasembada Pangan	12
BAB II KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2024-2025	17
2.1. Kinerja Indikator Makro Pertanian Tahun 2024-2025	18
2.1.1. Produk Domestik Bruto	18
2.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja	20
2.1.3. Investasi Sektor Pertanian	20
2.1.4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian	21
2.1.5. Kesejahteraan Petani	22
2.2. Kinerja Produksi Komoditas Strategis Pertanian Tahun 2024-2025	24
2.2.1. Produksi Tanaman Pangan	24
2.2.2. Produksi Hortikultura	28
2.2.3. Produksi Perkebunan	31
2.2.4. Produksi Peternakan	35
2.3. Kinerja Faktor Pendukung Pembangunan Pertanian	38
2.3.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian	38
2.3.2. Kinerja Penyuluhan dan SDM Pertanian	39
2.3.3. Kinerja Lahan dan Irigasi Pertanian	42
2.3.4. Kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian	49
2.3.5. Standardisasi, Perakitan dan Modernisasi Pertanian	60
2.4. Kinerja Tata Kelola Birokrasi	66
2.4.1. Reformasi Birokrasi	64
2.4.2. Opini Laporan Keuangan	66
2.4.3. Survei Penilaian Integritas KPK	67
2.4.4. Keterbukaan Informasi Publik	69





	Halaman
2.4.5. Indeks SPBE	70
2.4.6. Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pangan	71
2.4.7. Satu Data Pertanian	72
2.4.8. <i>Online Single Submission (OSS)</i>	72
BAB III KEBIJAKAN TEROBOSAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	75
3.1. Restrukturisasi Kementerian Pertanian	76
3.2. <i>Refocusing</i> dan Efisiensi Anggaran	77
3.3. Reformulasi Pupuk Bersubsidi	80
3.4. Pengalihan Penyuluh ASN Daerah Ke Kementerian Pertanian	84
3.5. Brigade Pangan	85
3.6. Pompanisasi	88
3.7. Inisiasi Penetapan HPP Gabah	93
3.8. Koordinasi Peningkatan Cadangan Beras Pemerintah	96
3.9. Penegakan Hukum dan Anti Mafia Sektor Pangan	97
3.10. Transformasi Sistem Pertanian	97
BAB IV STRATEGI MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN	107
4.1. Penerapan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	108
4.1.1. <i>Good Governance</i>	108
4.1.2. <i>Clean Government</i>	110
4.2. Peningkatan Produksi	112
4.2.1. Peningkatan Produksi Pertanian melalui Penguatan Sistem Perbenihan dan Varietas Unggul Bersertifikasi	112
4.2.2. Peningkatan Produksi melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi	117
4.3. Memperkuat Dukungan Infrastruktur	120
4.4. Modernisasi Pertanian	122
4.5. Regenerasi Petani	124
EPILOG	129



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional 2020-2024	4
Gambar 1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024	4
Gambar 1.3. Perkembangan Neraca Ekspor dan Impor Indonesia, 2020-2024	5
Gambar 1.4. Realisasi Investasi PMA dan PDN Pertanian, 2020-2024	5
Gambar 1.5. Perkembangan Produksi 5 (lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024	6
Gambar 1.6. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan, 2020-2024	8
Gambar 1.7. Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Peternakan, 2020-2024	9
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia, PDB Pertanian Arti Luas dan PDB Pertanian Arti Sempit, TW I 2024 s.d. TW II 2025	18
Gambar 2.2. Pertumbuhan PDB Subsektor Pertanian TW II 2025	19
Gambar 2.3. Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Subsektor Pertanian	20
Gambar 2.4. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian, TW I 2024 s.d. TW II 2025	20
Gambar 2.5. Perkembangan Volume, Nilai dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2024 dan Januari-Agustus 2025	21
Gambar 2.6. Volume dan Nilai Ekspor Impor Subsektor Pertanian Tahun 2025 (Januari-Agustus)	22
Gambar 2.7. Perkembangan NTP dan NTUP Pertanian (Tanpa Perikanan)	22
Gambar 2.8. NTP dan NTUP Subsektor Pertanian	23
Gambar 2.9. Perkembangan Luas Panen Padi di Indonesia (juta hektare), 2023-2025	24
Gambar 2.10. Perkembangan Produksi Padi di Indonesia (juta ton GKG), 2023-2025	25
Gambar 2.11. Perkembangan Produksi Beras di Indonesia (juta ton beras), 2023-2025	25
Gambar 2.12. Perkembangan Produksi Jagung Pipilan Kering Kadar Air 14 Persen (JPK ka 14%) di Indonesia (juta ton), 2023-2025	27
Gambar 2.13. Produksi Aneka Cabai	28
Gambar 2.14. Produksi Bawang Merah	28
Gambar 2.15. Produksi Bawang Putih	29
Gambar 2.16. Produksi Kentang	29
Gambar 2.17. Produksi Durian	30
Gambar 2.18. Produksi Alpukat	30
Gambar 2.19. Produksi Manggis	30
Gambar 2.20. Produksi Salak	31
Gambar 2.21. Produksi Kelapa Sawit	32
Gambar 2.22. Produksi Kelapa	32



	Halaman
Gambar 2.23. Produksi Jambu Mete	32
Gambar 2.24. Produksi Kopi	33
Gambar 2.25. Produksi Kakao	33
Gambar 2.26. Produksi Tebu	34
Gambar 2.27. Produksi Karet	34
Gambar 2.28. Produksi Lada	34
Gambar 2.29. Produksi Pala	35
Gambar 2.30. Jumlah Kelembagaan Petani Tahun 2024 dan 2025	39
Gambar 2.31. Jumlah Penyuluh Tahun 2024 dan 2025	39
Gambar 2.32. Jumlah Penyuluh Tahun 2025 berdasarkan Status Kepegawaian	40
Gambar 2.33. Tahapan Kegiatan Cetak Sawah	42
Gambar 2.34. Sebaran Target Kegiatan Cetak Sawah per Provinsi	43
Gambar 2.35. Tahapan Kegiatan Optimasi Lahan	43
Gambar 2.36. Realisasi Olah Tanah Kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2024-2025	46
Gambar 2.37. Target dan Realisasi Optimasi Lahan Tahun 2024-2025	47
Gambar 2.38. Sebaran Kegiatan Aspek Irigasi Tahun 2024-2025	48
Gambar 2.39. Distribusi dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi	49
Gambar 2.40. Penyebaran Pupuk Bersubsidi TA 2024	50
Gambar 2.41. Penyebaran Pupuk Bersubsidi TA 2025	50
Gambar 2.42. Dolomit sebagai Bantuan Saprodi pada Lahan Rawa	51
Gambar 2.43. Uji Coba <i>Rice Transplanter</i> oleh Menteri Pertanian	54
Gambar 2.44. Sebaran Alsintan Prapanen Tahun 2024	55
Gambar 2.45. Sebaran Alsintan Prapanen Tahun 2025	55
Gambar 2.46. Uji Coba <i>Combine Harvester</i> oleh Menteri Pertanian	58
Gambar 2.47. Pemberian Bantuan KUR kepada Poktan	59
Gambar 2.48. Skema KUR Tebu untuk Swasembada Gula	59
Gambar 2.49. Kredit Alsintan untuk Swasembada Pangan	60
Gambar 2.50. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	64
Gambar 2.51. SPI Pertanian Naik, Mentan Jadi Pembicara di KPK	67
Gambar 2.52. Nilai Survei Penilaian Integritas Terhadap Kementerian Pertanian oleh KPK RI Tahun 2021 s.d. 2024	68
Gambar 2.53. Koordinasi Survei Penilaian Integritas SPI Kementerian Pertanian oleh KPK	68
Gambar 2.54. Kementerian Pertanian Memperoleh Predikat “Informatif”	69



	Halaman
Gambar 2.55. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024	70
Gambar 2.56. Indeks SPBE Kementan 2024-2025	70
Gambar 2.57. Padu Satu-Pusat PVTTP dalam Memberikan Layanan Perizinan Berusaha	73
Gambar 3.1. Pelantikan Pejabat Struktural berdasarkan Sistem Meritokrasi	76
Gambar 3.2. Proses <i>Refocusing</i> Anggaran 2024	78
Gambar 3.3. Penyederhanaan Regulasi Pupuk Bersubsidi	81
Gambar 3.4. Penebusan Pupuk Bersubsidi	82
Gambar 3.5. Menteri Pertanian bersama Penyuluh	84
Gambar 3.6. Menteri Pertanian bersama Brigade Pangan	85
Gambar 3.7. Target dan Realisasi Pembentukan Brigade Pangan	86
Gambar 3.8. Lokasi Sebaran Peserta Pelatihan Brigade Pangan Tahun 2025	88
Gambar 3.9. Irigasi Perpompaan	89
Gambar 3.10. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Mengecek Penggunaan Pompa Air Bersama Dengan Satgas Pangan TNI Mendukung Program Pompanisasi Kementan	90
Gambar 3.11. Pompanisasi Tenaga Listrik Jombang Jawa Timur dan Grobogan Jawa Tengah	90
Gambar 3.12. Petani sedang Melakukan Mobilisasi Pompa Air Bantuan Kementan	92
Gambar 3.13. Tren Harga Gabah Kering Panen Periode Tahun 2025	93
Gambar 3.14. Stok Beras Tertinggi dalam Sejarah	97
Gambar 3.15. Mentan Temukan Beras Dijual di Atas HET saat Sidak Pasar Cipinang	98
Gambar 3.16. Mentan <i>Non</i> Aktifkan 11 Pajabat dan <i>Blacklist</i> 4 Perusahaan	99
Gambar 3.17. Sidak Pasar Jaya Lenteng Agung, Mentan Temukan Minyak kita tak Sesuai Volume	100
Gambar 3.18. Proses Transformasi Pertanian	102
Gambar 3.19. Inovasi Teknologi <i>Drone</i> untuk Pertanian Mendukung Pembangunan Pertanian	104
Gambar 4.1. Menteri Pertanian Memberhentikan 2 Oknum Pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang Terbukti Melakukan Pungutan Liar dan Penyalahgunaan Wewenang	112
Gambar 4.2. Benih Unggul Bersertifikat	114
Gambar 4.3. Proses Pembuatan SID dan Konstruksi Optimasi Lahan Sawah	118



	Halaman
Gambar 4.4. Proses <i>Land Clearing</i> Pada Kegiatan Cetak Sawah	118
Gambar 4.5. Perbaikan jaringan Irigasi Tersier	119
Gambar 4.6. Tahapan Pelaksanaan, Peran dan Keterkaitan Antar K/L dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	120
Gambar 4.7. Suasana Rapat Koordinasi Menteri Pertanian Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Beserta Jajaran di Kantor Kementerian Pertanian	121
Gambar 4.8. <i>Autonomus Tractor</i> , Pengolahan Lahan Menggunakan <i>GPS</i>	123
Gambar 4.9. <i>Drone</i> Penebar Benih dengan Kapasitas 50-60 kg/ha	124
Gambar 4.10. <i>Young Ambassador of Agriculture (YAA)</i>	126





Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Realisasi Investasi Subsektor Pertanian TW II 2025	21
Tabel 2.2. Produksi Daging	36
Tabel 2.3. Produksi Susu dan Telur	37
Tabel 2.4. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	38
Tabel 2.5. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (dalam Rp miliar)	38
Tabel 2.6. Kontribusi Irigasi Terhadap Peningkatan Produksi dan Produktivitas Lahan	48
Tabel 2.7. Capaian Indeks SPBE Kementan 2024-2025	71
Tabel 3.1. <i>Refocussing</i> Anggaran	79



Konferensi Internasional Tingkat Tinggi:

Indonesia Punya 4 Juta Ton Cadangan Beras, Kita Sudah Swasembada



BAB I

Visi

Menuju Swasembada Pangan

 @kementerianpertanian

Sektor pertanian nasional saat ini berada pada momentum penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Berbagai tantangan *global* seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, perang dagang, serta peningkatan harga energi dan pupuk telah memberikan tekanan besar terhadap sistem pangan dunia. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan di tingkat nasional, sehingga menuntut langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang adaptif agar ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga.

Perubahan iklim yang semakin ekstrem berdampak nyata terhadap penurunan produktivitas pertanian, perubahan pola tanam, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit. Di sisi lain, pertumbuhan populasi dunia dan peningkatan taraf hidup mendorong lonjakan permintaan terhadap pangan pokok seperti beras, jagung, dan gandum, serta produk-produk pertanian bernilai tinggi seperti daging, susu, dan minyak nabati. Ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok *global* turut memperburuk kondisi ini dengan mendorong kenaikan harga pangan dan komoditas pertanian.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan nasional tidak boleh bergantung pada pasar internasional yang rentan guncangan. Sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti alih fungsi lahan produktif, keterbatasan sumber daya air, ketergantungan terhadap impor komoditas strategis, serta rendahnya tingkat regenerasi petani. Jika tidak diantisipasi, hal-hal ini dapat menghambat pencapaian swasembada pangan dan menurunkan daya saing pertanian nasional.

Dalam konteks pembangunan nasional, ketahanan pangan merupakan pilar utama kedaulatan dan stabilitas negara. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian, tetapi juga menentukan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, mewujudkan swasembada pangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Visi menuju swasembada pangan menjadi penting karena di dalamnya terkandung makna strategis bagi kemandirian bangsa. Swasembada bukan sekadar pencapaian peningkatan produksi pangan dalam negeri, tetapi juga simbol ketahanan dan kedaulatan nasional dalam menghadapi krisis global yang tidak menentu. Kemandirian pangan berarti bangsa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada impor, sekaligus melindungi petani sebagai produsen utama dari gejolak harga internasional. Dalam jangka panjang, swasembada pangan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat perdesaan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau—sebuah prasyarat mutlak bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan.

Arah kebijakan pembangunan pertanian ke depan diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan kemandirian pangan melalui transformasi ekonomi berbasis inovasi, sebagaimana tertuang dalam *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kedua dokumen tersebut menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian melalui modernisasi, inovasi teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.





Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, capaian sektor pertanian pada periode sebelumnya menjadi fondasi penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan. Pembelajaran dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan baru yang lebih terfokus, adaptif, dan berkelanjutan.

1.1. Kinerja Sektor Pertanian Periode Sebelumnya

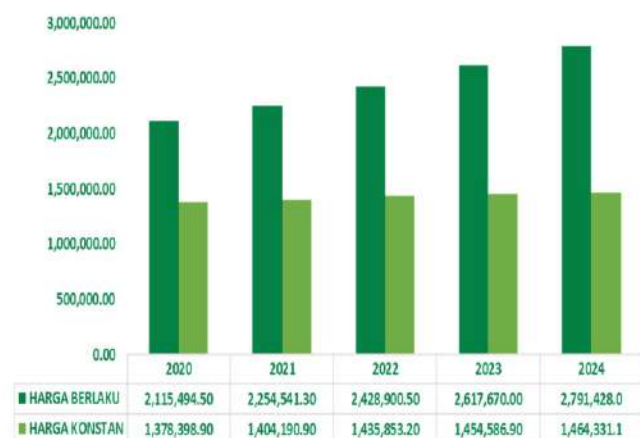
1.1.1. Indikator Kinerja Makro Pertanian

Pada periode 2020-2024, sektor pertanian terbukti mampu menjadi penopang penting bagi perekonomian nasional dan ketahanan pangan ketika pandemi melanda. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian (*year on year*) yang tetap positif selama delapan triwulan berturut-turut—mulai triwulan I tahun 2020 hingga triwulan IV tahun 2021—pada saat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional justru mencatat angka negatif pada tahun 2020. Ketahanan dan kinerja unggul sektor pertanian ini tercermin pula melalui berbagai indikator makro lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), kinerja neraca perdagangan, investasi di bidang pertanian, serta capaian produksi komoditas strategis.

Pada tahun 2020-2024, PDB Sektor Pertanian menunjukkan tren positif. PDB pertanian arti luas berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 6,64% dan harga konstan naik 0,68%. Sedangkan pertanian arti sempit berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,05% dan harga konstan naik 0,9%. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya pada awal pandemi *Covid-19* tahun 2020. Pada tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif 1,77% di saat yang sama PDB nasional tumbuh negatif -2,07%.



PDB Sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2020 - 2024



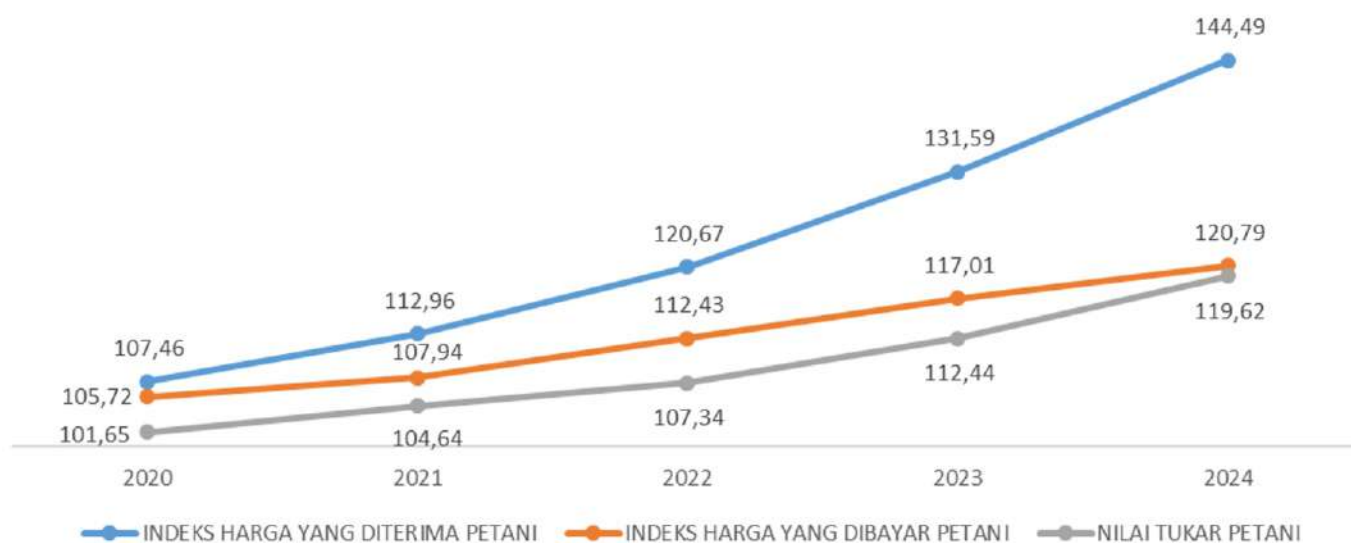
PDB Sektor Pertanian Arti Sempit Tahun 2020 - 2024



Gambar 1.1. Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional 2020-2024

Di samping kontribusinya terhadap pembentukan PDB nasional yang cukup signifikan, sektor pertanian juga merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selama 5 tahun terakhir (2020-2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,43%. Nilai rata-rata *share* ini setara dengan 39,72 juta pekerja dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia.

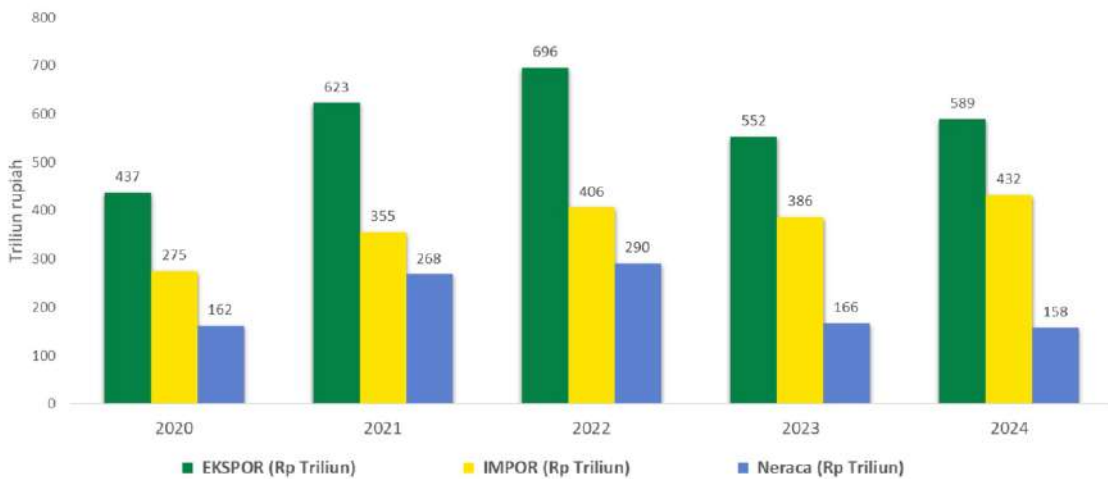
Selama periode 2020-2024, nilai NTP terus tumbuh mencapai 119,62 pada tahun 2024 dari angka 101,65 pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan ini merupakan kontribusi dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It), dari 107,46 pada tahun 2020 menjadi 144,49 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual komoditas oleh petani relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran modal untuk produksi pertanian.



Gambar 1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024

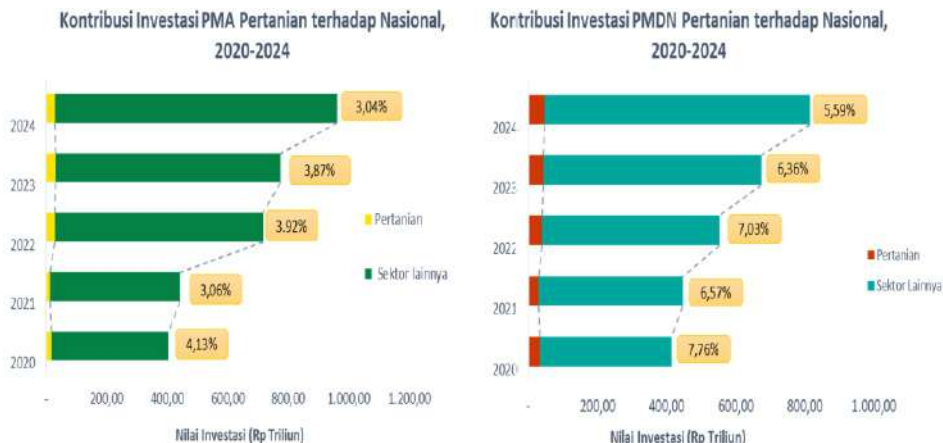


Selama periode 2020–2024, neraca perdagangan produk pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, secara kumulatif mencatatkan surplus. Capaian positif ini sebagian besar ditopang oleh subsektor perkebunan yang menyumbang rata-rata sekitar 92% dari total surplus, terutama melalui komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, dan kopi. Namun demikian, pada periode 2022–2024 terjadi penurunan nilai ekspor yang disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor kelapa sawit, karet, dan kelapa. Tekanan regulasi *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* turut menekan harga global kelapa sawit, sehingga berdampak pada nilai ekspor komoditas tersebut. Sementara itu, penurunan ekspor karet dipengaruhi oleh lesunya industri otomotif *global* pascapandemi *COVID-19*, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap produk karet Indonesia.



Gambar 1.3. Perkembangan Neraca Ekspor dan Impor Indonesia, 2020-2024

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), investasi di sektor pertanian, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menunjukkan tren pertumbuhan positif. Rata-rata kontribusi investasi PMA pertanian terhadap total PMA nasional mencapai 3,61%, sementara kontribusi investasi PMDN pertanian terhadap total PMDN nasional sebesar 6,66%. Secara keseluruhan, total nilai investasi pertanian dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp306,45 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari sektor perkebunan, baik melalui PMA maupun PMDN. Ke depan, diperlukan upaya untuk memperkuat arus investasi pada tiga subsektor lainnya—tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan—agar mampu mendorong peningkatan produktivitas serta mempercepat proses hilirisasi di ketiga subsektor tersebut.



Gambar 1.4. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pertanian, 2020-2024



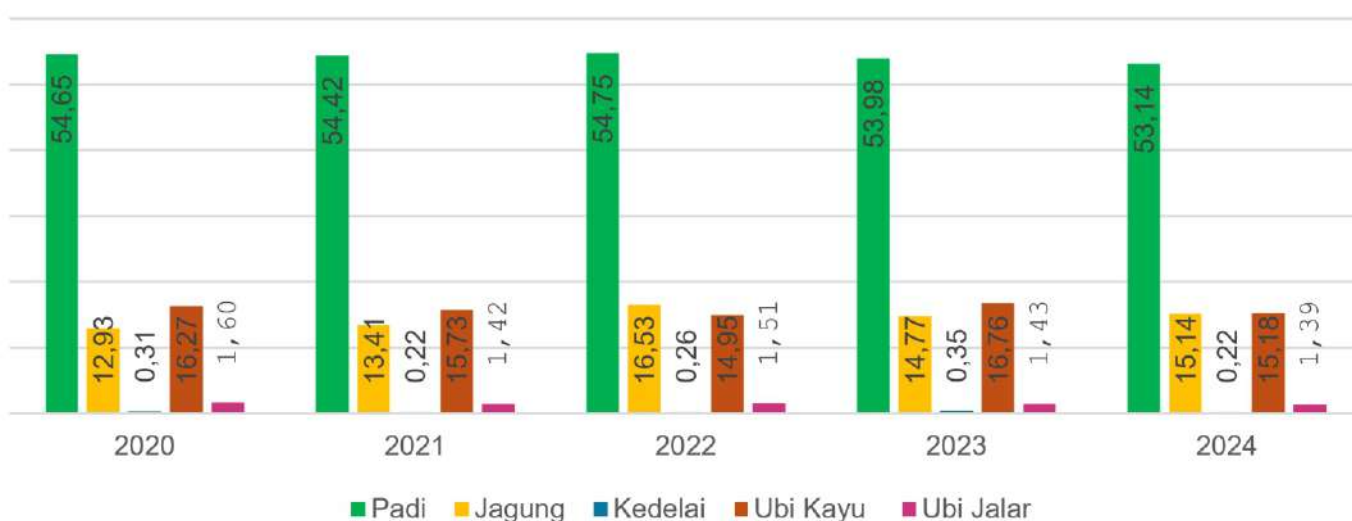
1.1.2. Kinerja Produksi Sektor Pertanian

Subsektor Tanaman Pangan

Produksi padi di Indonesia selama periode 2020–2024 mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti serangan hama dan penyakit, perubahan iklim, alih fungsi lahan, kebijakan pemerintah, serta adopsi teknologi pertanian. Fenomena *El Niño* pada 2023–2024 menyebabkan musim kering berkepanjangan di sejumlah daerah, yang berdampak pada turunnya produksi padi di beberapa wilayah sentra produksi. Selain itu, penurunan luas baku sawah turut memperburuk kondisi produksi. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah menurun dari 7.463.948 hektare pada 2019 menjadi 7.384.341 hektare pada 2024, atau turun sekitar 1,07%. Sejalan dengan itu, luas panen padi juga menurun rata-rata 1,46% per tahun, menjadi salah satu penyebab penurunan produksi nasional sepanjang periode tersebut.

Sementara itu, produksi jagung menunjukkan tren yang relatif lebih stabil meskipun tetap fluktuatif. Sebagai komoditas pangan strategis yang berperan penting dalam penyediaan bahan baku pakan dan konsumsi rumah tangga, jagung mencatat produksi rata-rata di atas 14,5 juta ton per tahun dengan pertumbuhan sekitar 4,7% per tahun selama 2020–2024. Peningkatan ini antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga pembelian, yang memberi insentif bagi petani untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas jagung.

Berbeda dengan padi dan jagung, produksi kedelai di dalam negeri masih tertinggal jauh dari kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun. Sepanjang periode 2020–2024, produksi kedelai berfluktuasi di kisaran 200–350 ribu ton dengan rata-rata sekitar 270 ribu ton per tahun, atau baru memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih harus dipenuhi melalui impor, menandakan perlunya kebijakan yang lebih kuat dalam mendorong peningkatan produksi kedelai domestik.



Gambar 1.5. Perkembangan Produksi 5 (lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024



Subsektor Hortikultura

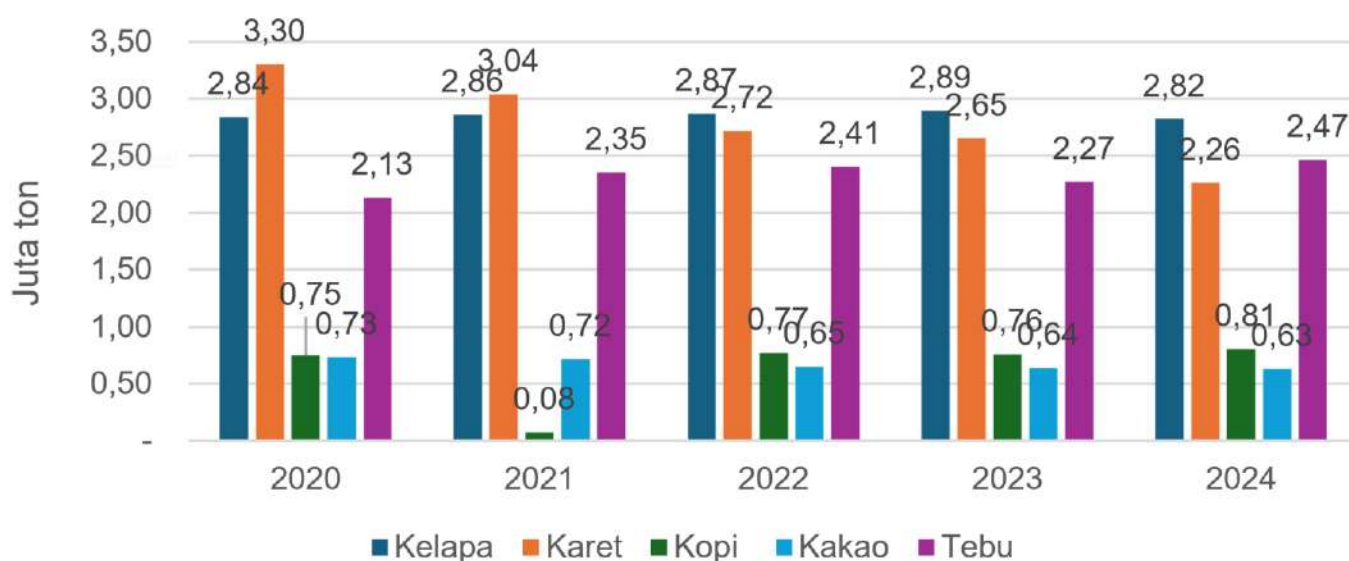
Produksi bawang merah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten selama periode 2020–2024, dengan rata-rata pertumbuhan produksi mencapai 3,63% per tahun. Puncak produksi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 2,09 juta ton. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya luas panen yang tumbuh rata-rata 0,33% per tahun, menandakan adanya perbaikan dalam aktivitas budidaya dan adopsi teknologi pertanian. Sebaliknya, produksi bawang putih justru mengalami penurunan, dari 0,08 juta ton pada tahun 2020 menjadi 0,04 juta ton pada tahun 2024. Keterbatasan akses petani terhadap bibit unggul dan faktor geografis yang tidak seluruhnya mendukung menjadi hambatan utama pengembangan komoditas ini. Mengingat sebagian besar kebutuhan nasional masih bergantung pada impor, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri guna memperkuat kemandirian bawang putih nasional.

Sementara itu, produksi cabai rawit dan cabai besar mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang periode 2020–2024. Produksi cabai rawit cenderung tumbuh positif dengan rata-rata peningkatan 1,18% per tahun, sedangkan produksi cabai besar justru menurun dari 1,26 juta ton pada 2020 menjadi 0,88 juta ton pada 2024, atau turun rata-rata 21,48%. Faktor-faktor seperti iklim, ketersediaan lahan, kualitas air, bibit, pupuk, dan pestisida sangat memengaruhi produktivitas komoditas ini. Fluktuasi harga cabai yang tinggi turut memberikan dampak pada tingkat inflasi nasional. Di sisi lain, sektor hortikultura juga menunjukkan potensi besar, terutama pada florikultura dengan pasar ekspor menjanjikan seperti Jepang, Belanda, Amerika Serikat, dan Singapura yang memiliki minat tinggi terhadap produk bunga tropis Indonesia.



Subsektor Perkebunan

Kelapa sawit tetap menjadi komoditas unggulan sektor perkebunan dengan tren produksi yang meningkat selama periode 2020–2024, rata-rata tumbuh sebesar 14,81% dengan total areal mencapai sekitar 16,8 juta hektare. Upaya peremajaan terus digencarkan untuk menjaga produktivitas, memperkuat ekspor, serta mengembangkan industri hilir seperti biodiesel yang berperan dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada energi nasional. Sementara itu, produksi kelapa relatif stabil berkat dukungan pemerintah melalui bantuan bibit dalam skala besar untuk lahan suboptimal. Sebaran produksi kelapa terbesar berada di Pulau Sumatera, diikuti Jawa, Sulawesi, Maluku, dan wilayah timur Indonesia lainnya.



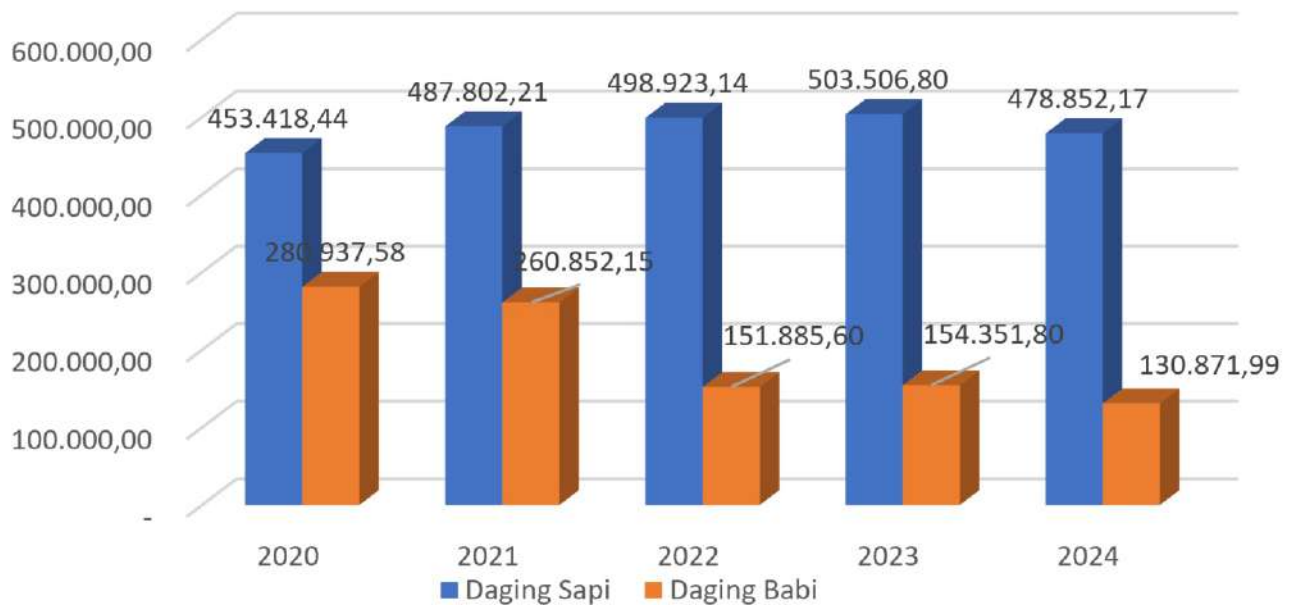
Gambar 1.6. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan, 2020-2024

Sebaliknya, beberapa komoditas perkebunan lain menghadapi tantangan penurunan produksi. Produksi karet terus menurun akibat anjloknya harga dunia, yang menurunkan minat petani, meskipun pemerintah berupaya menstabilkan harga dengan penyerapan hasil panen. Produksi kopi dan kakao juga mengalami fluktuasi dengan tren menurun karena faktor iklim, serangan hama, serta rendahnya tingkat peremajaan tanaman. Pemerintah telah melakukan intervensi berupa bantuan sarana produksi, peremajaan, dan rehabilitasi lahan untuk menjaga keberlanjutan dua komoditas tersebut. Adapun tebu mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebelum turun kembali pada 2023, sehingga pemerintah melaksanakan program bongkar ratoon serta revitalisasi pabrik gula melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN, dan pihak swasta. Secara keseluruhan, komoditas ekspor utama perkebunan masih difokuskan pada kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, dan karet.



Subsektor Peternakan

Populasi sapi potong di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Puncak populasi tercatat pada tahun 2021 mencapai 17,98 juta ekor, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 akibat merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang berbagai wilayah. Pemerintah segera merespons kondisi tersebut melalui program vaksinasi massal terhadap seluruh ternak rentan guna menekan penyebaran penyakit. Populasi sapi perah, yang didominasi jenis *Frisien Holstein (FH)* karena produktivitas susunya yang tinggi dan daya adaptasinya yang baik, juga mengalami tren serupa: meningkat hingga 582 ribu ekor pada 2021, lalu menurun pada 2022–2023 akibat dampak PMK. Adapun populasi kerbau sempat stabil di atas 1,1 juta ekor pada 2020–2021, kemudian menurun pada 2023. Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan usaha ternak rakyat dengan memberikan bantuan pakan dan premi asuransi ternak bagi peternak terdampak.



Gambar 1.7. Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Peternakan, 2020-2024

Kambing sebagai ternak yang paling banyak diusahakan masyarakat, terutama di Pulau Jawa, mencatat populasi sekitar 19 juta ekor pada 2021. Meski sempat mengalami penurunan pada 2022–2023, populasi kambing kembali meningkat pada 2024 berkat program pemberdayaan peternak dan bantuan bibit ternak. Secara umum, penurunan populasi pada 2023 tidak hanya disebabkan oleh dampak PMK, tetapi juga akibat perubahan metode pengumpulan data. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan pendekatan proyeksi dari Sensus Pertanian 2013, data tahun 2023 diperoleh melalui metode sensus langsung, sehingga menghasilkan angka yang lebih akurat namun relatif lebih rendah dibanding estimasi sebelumnya.





1.2. Permasalahan dan Tantangan

Meskipun sektor pertanian Indonesia menunjukkan berbagai capaian positif dalam beberapa tahun terakhir — mulai dari kinerja makroekonomi yang stabil, surplus neraca perdagangan pertanian, peningkatan investasi, hingga capaian produksi sejumlah komoditas strategis — namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menjamin ketahanan dan kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan. Di balik berbagai kemajuan tersebut, masih tersimpan beragam permasalahan struktural dan tantangan yang perlu segera diatasi, mulai dari penurunan produktivitas akibat degradasi lahan dan perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur pertanian, rendahnya regenerasi petani, hingga ketergantungan terhadap impor beberapa komoditas pangan utama. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi pertanian menuju swasembada pangan yang tangguh dan berkelanjutan memerlukan upaya yang lebih komprehensif, inovatif, dan terintegrasi lintas subsektor serta lintas lembaga.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah meningkatnya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita. *Food and Agriculture Organization (FAO)* memproyeksikan bahwa permintaan pangan global akan naik sekitar 50% pada tahun 2050. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas strategis seperti beras, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula. Namun, peningkatan produksi tersebut dihadapkan pada keterbatasan lahan dan air yang semakin nyata. Luas baku sawah nasional terus menurun dari 8,1 juta hektare pada 2013 menjadi sekitar 7,4 juta hektare pada 2021, sementara lebih dari 50% jaringan irigasi teknis dilaporkan dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Keterbatasan sumber daya alam ini diperparah oleh perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian cuaca, kekeringan, banjir, serta meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman.



Selain persoalan sumber daya alam, rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha tani juga menjadi tantangan serius. Produktivitas padi Indonesia rata-rata baru mencapai sekitar 5,2 ton per hektare—masih tertinggal dari Vietnam (5,9 ton/ha) dan Tiongkok (6,9 ton/ha). Produktivitas kedelai dan jagung pun masih jauh di bawah potensi optimal. Kondisi ini tidak lepas dari dominannya struktur usaha tani skala kecil, di mana lebih dari 90% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektare. Skala usaha yang sempit membatasi kemampuan petani untuk mengakses teknologi modern, modal usaha, dan pasar yang lebih luas. Akibatnya, banyak petani sulit keluar dari perangkap produktivitas rendah dan pendapatan yang stagnan.

Faktor lain yang turut memengaruhi daya saing sektor pertanian adalah masih panjangnya rantai distribusi hasil pertanian dari petani ke konsumen. Produk pertanian Indonesia umumnya melewati 5 hingga 7 lapisan perantara, sehingga harga di tingkat konsumen bisa melonjak 2–3 kali lipat dibandingkan harga di tingkat petani. Kondisi ini bukan hanya menekan keuntungan petani, tetapi juga menurunkan efisiensi pasar dan menghambat stabilitas harga pangan nasional. Di sisi lain, kerugian pascapanen yang tinggi juga masih menjadi persoalan serius. *FAO* memperkirakan kehilangan hasil panen di Indonesia mencapai 20–30% untuk komoditas hortikultura dan 10–20% untuk beras, disebabkan keterbatasan fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan transportasi yang memadai.

Permasalahan struktural juga tampak dari lemahnya kelembagaan petani dan rendahnya adopsi teknologi pertanian modern. Sebagian besar petani masih bekerja secara individual tanpa dukungan kelembagaan ekonomi yang kuat, seperti koperasi atau badan usaha milik petani. Padahal kelembagaan tersebut penting untuk memperkuat posisi tawar, efisiensi distribusi input, serta akses terhadap permodalan dan pasar. Di sisi lain, tingkat adopsi teknologi digital dan pertanian presisi masih rendah karena keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan pendampingan di tingkat lapangan. Akibatnya, inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi belum dimanfaatkan secara optimal.



Selain itu, penurunan jumlah tenaga kerja pertanian, khususnya dari kalangan muda, menjadi ancaman jangka panjang bagi keberlanjutan sektor ini. Data BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, proporsi tenaga kerja muda di sektor pertanian menurun lebih dari 30%. Urbanisasi dan persepsi bahwa pekerjaan tani kurang menjanjikan turut mempercepat penurunan minat generasi muda untuk bertani. Jika tren ini terus berlanjut, maka dalam beberapa dekade mendatang Indonesia berpotensi menghadapi krisis regenerasi petani yang dapat mengancam ketahanan produksi pangan nasional.

Berbagai tantangan di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam hal efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian perlu mengarahkan kebijakan pembangunan 2025–2029 secara lebih strategis dengan menekankan pada modernisasi pertanian berbasis teknologi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja, serta perbaikan rantai nilai pangan yang lebih efisien dan berkeadilan. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, visi menuju pertanian maju, mandiri, dan modern yang berkontribusi pada swasembada pangan dapat benar-benar terwujud secara berkelanjutan.

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Pertanian: Swasembada Pangan

Pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional melalui pencapaian swasembada pada komoditas strategis. Swasembada pangan menjadi keharusan karena kemandirian pangan merupakan salah satu pilar kedaulatan bangsa yang menopang stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti beras, gula, kedelai, bawang putih, dan daging sapi menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global, krisis geopolitik, serta gangguan rantai pasok internasional. Dengan memperkuat kemampuan produksi pangan dalam negeri, Indonesia tidak hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 280 juta penduduk, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional, memperbaiki neraca perdagangan, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Swasembada pangan juga menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan visi nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” serta visi Kementerian Pertanian “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”. Dalam kerangka tersebut, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem pangan nasional yang tangguh, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pencapaian swasembada pangan tidak semata dimaknai sebagai peningkatan output komoditas, melainkan juga sebagai transformasi menuju pertanian modern berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama.

Arah kebijakan pembangunan pertanian 2025–2029 difokuskan pada empat pilar utama. Pertama, **peningkatan kapasitas dan produktivitas pangan strategis**, melalui penguatan sistem budidaya berkelanjutan, optimalisasi lahan sawah dan lahan suboptimal, serta pengembangan teknologi spesifik lokasi untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kedua, **penguatan sistem ketahanan pangan nasional** dengan memperluas cadangan pangan strategis, memperbaiki manajemen rantai pasok, memperkuat sistem logistik pangan, serta mendorong ketersediaan pangan yang merata antarwilayah dan antarmusim.



Ketiga, **modernisasi dan industrialisasi pertanian**, melalui hilirisasi produk, pengembangan pertanian presisi, digitalisasi data dan sistem peringatan dini, serta kemitraan antara petani, koperasi, dan industri pengolahan. Keempat, **pemberdayaan petani dan generasi muda pertanian**, dengan peningkatan akses terhadap pembiayaan, asuransi pertanian, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan lapangan kerja produktif di sektor agro-maritim.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pencapaian swasembada pangan juga menekankan penguatan kelembagaan petani dan sistem pembiayaan inklusif. Kementerian Pertanian akan memperluas akses petani terhadap input produktif seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian modern (alsintan), sekaligus mendorong efisiensi biaya produksi. Selain itu, pemerintah akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, BUMN, swasta, serta pemerintah daerah, dalam membangun ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Reformasi tata kelola subsidi, integrasi data pertanian, serta peningkatan efektivitas program bantuan pemerintah juga menjadi bagian dari agenda strategis untuk memastikan bahwa seluruh intervensi kebijakan benar-benar berorientasi pada hasil (*outcome-based policy*).

Selanjutnya, dalam konteks keberlanjutan, arah kebijakan pembangunan pertanian juga mengedepankan prinsip **pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular**, melalui efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan limbah pertanian untuk energi baru terbarukan, serta pengembangan sistem pertanian rendah emisi karbon. Pendekatan ini selaras dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan dan agenda transisi hijau nasional. Dengan demikian, kebijakan swasembada pangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda ketahanan iklim dan kemandirian energi.

Plafon Kredit

>Rp500 juta–
2 miliar

Jenis Kredit

Kredit
Investasi (KI)

Down Payment

Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan SOP Penyalur KUA.

Jangka Waktu

Maksimal
60 bulan

Suku Bunga

Sesuai suku bunga berlaku. Saat ini 3% per tahun (subsidi bunga 8,5% per tahun).

POLA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA ALSINTAN



Kriteria Penerima

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan 2025–2029 menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi utama bagi terwujudnya Indonesia Maju. Melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, hilirisasi, serta pemberdayaan petani sebagai pelaku utama, Kementerian Pertanian bertekad menjadikan swasembada pangan bukan sekadar target jangka menengah, tetapi sebagai bagian dari transformasi struktural menuju sistem pertanian nasional yang kuat, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat *global*.

Upaya mencapai swasembada pangan juga diperkuat melalui restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah satu langkah penting adalah pemisahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) menjadi dua entitas baru, yaitu dengan membentuk Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Restrukturisasi ini didasari oleh keyakinan bahwa lahan dan irigasi merupakan dua faktor kunci dalam pencapaian swasembada pangan. Dengan kelembagaan yang lebih fokus, Kementerian Pertanian dapat memperkuat perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan sekaligus memastikan ketersediaan air irigasi yang efisien dan merata antarwilayah produksi.

Selain itu, Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian (BSIP) juga mengalami transformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Perubahan ini mencerminkan orientasi baru Kementerian Pertanian yang menempatkan modernisasi pertanian sebagai pilar utama transformasi sektor pertanian nasional. Melalui BRMP, pengembangan teknologi pertanian tidak hanya berfokus pada aspek penelitian dan standardisasi, tetapi juga pada perakitan inovasi, mekanisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem cerdas pertanian (*smart farming*). BRMP diharapkan menjadi motor penggerak modernisasi pertanian Indonesia, mempercepat adopsi teknologi, serta memperkuat daya saing petani dan pelaku usaha di era ekonomi berbasis inovasi.

Restrukturisasi kelembagaan ini secara keseluruhan memperkuat arah kebijakan Kementerian Pertanian menuju tata kelola yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Penguatan kelembagaan tersebut menjawab tantangan utama sektor pertanian, antara lain alih fungsi lahan pertanian produktif, penurunan kualitas jaringan irigasi, serta lambatnya adopsi teknologi pertanian modern. Tanpa reformasi kelembagaan yang mendukung, pencapaian swasembada pangan akan sulit berkelanjutan.

**Panen Raya Jagung Serentak dan
Lepas Ekspor Jagung Perdana ke Malaysia**

**Indonesia Semakin Dekat
Jadi Lumbung Pangan Dunia**





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

“

Kita akan terus dorong komoditas pangan kita untuk terus meningkat.

InsyaAllah, saat ini beras kita aman, jagung juga, kita juga sedang dorong komoditas lain seperti kelapa dan kakao. **Pangan kita aman dan tentu petani makin sejahtera.**

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id

BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



MENUJU SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN



“Alhamdulillah, BPS sudah merilis produksi kita terus meningkat, naik signifikan dibandingkan sebelumnya. Ini bukti bahwa intervensi pemerintah hadir, mulai dari penyediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan bantuan lainnya dari Presiden kita benar-benar dirasakan oleh petani”

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI



BAB II

Kinerja

**Pembangunan Pertanian
Tahun 2024-2025**

 @kementerianpertanian

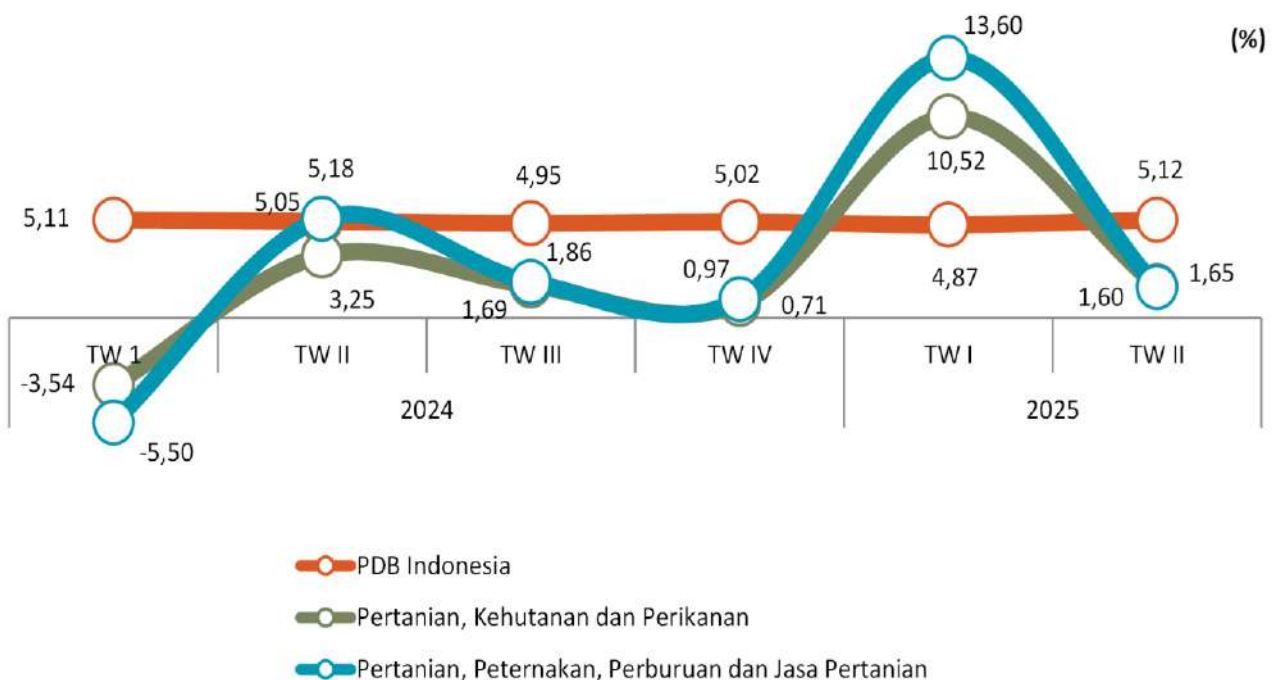
Kinerja pembangunan pertanian tahun 2024–2025 menunjukkan kemajuan yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Capaian indikator makro pertanian, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja, investasi, neraca perdagangan, serta kesejahteraan petani yang diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung modernisasi pertanian, efisiensi produksi, dan peningkatan nilai tambah komoditas strategis.

Selain itu, produksi komoditas strategis, termasuk padi, jagung, produk perkebunan, hortikultura dan peternakan, terus mengalami peningkatan melalui program mekanisasi, penguatan kelompok tani, serta optimalisasi bantuan alsintan dan input produksi. Di sisi tata kelola, reformasi birokrasi pertanian memperkuat sistem perizinan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga tercipta pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, kinerja pembangunan pertanian 2024–2025 mencerminkan sinergi antara capaian produksi, indikator makro, dan kualitas tata kelola sebagai fondasi pertanian yang berkelanjutan.

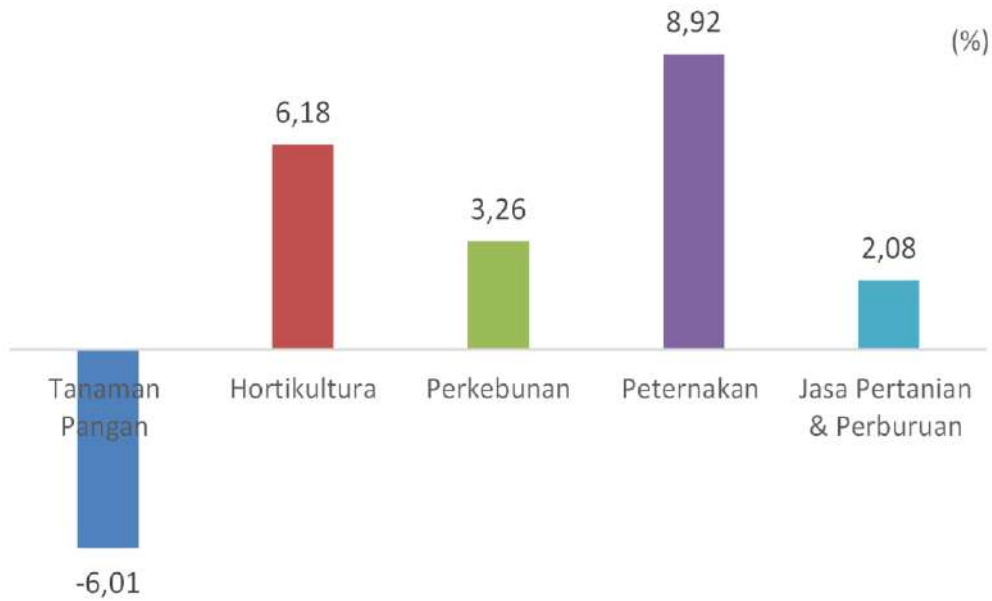
2.1. Kinerja Indikator Makro Pertanian Tahun 2024-2025

2.1.1. Produk Domestik Bruto

Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup juga kehutanan dan perikanan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. TW II 2025, kontribusinya sebesar 13,83% atau Rp 822,6 triliun yang merupakan angka tertinggi dalam periode dua tahun terakhir. Sementara itu pertumbuhan sektor pertanian dalam arti sempit menunjukkan pola yang fluktuatif. Tahun 2024 PDB pertanian arti luas sempit mengalami penurunan di triwulan I sebesar -5,50 persen, tetapi segera pulih dengan pertumbuhan 5,18 persen pada triwulan II. Memasuki tahun 2025, sektor ini kembali mencatat pertumbuhan positif, yakni 13,60 persen pada triwulan I (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia, PDB Pertanian Arti Luas dan PDB Pertanian Arti Sempit, TW I 2024 s.d. TW II 2025



Gambar 2.2. Pertumbuhan PDB Subsektor Pertanian TW II 2025

Jika dilihat pertumbuhan subsektornya, peternakan relatif tertinggi pada TW II 2025 yaitu sebesar 8,92 persen. Sementara subsektor tanaman pangan memperlihatkan pergerakan paling fluktuatif, dimana pada TW I 2025 bahkan mencapai 42,86 persen namun menurun seiring dengan berlalunya panen raya menjadi -6,01 persen di TW II 2025. Tanaman hortikultura dan perkebunan tumbuh positif dengan puncak pertumbuhan 6,18 persen dan 3,26 persen pada triwulan II 2025 (Gambar 2.2).

“

Kita fokus tebu, semoga 2 hingga 3 tahun, paling lambat 4 atau 5 tahun, Indonesia bisa mulai swasembada gula.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

2.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja

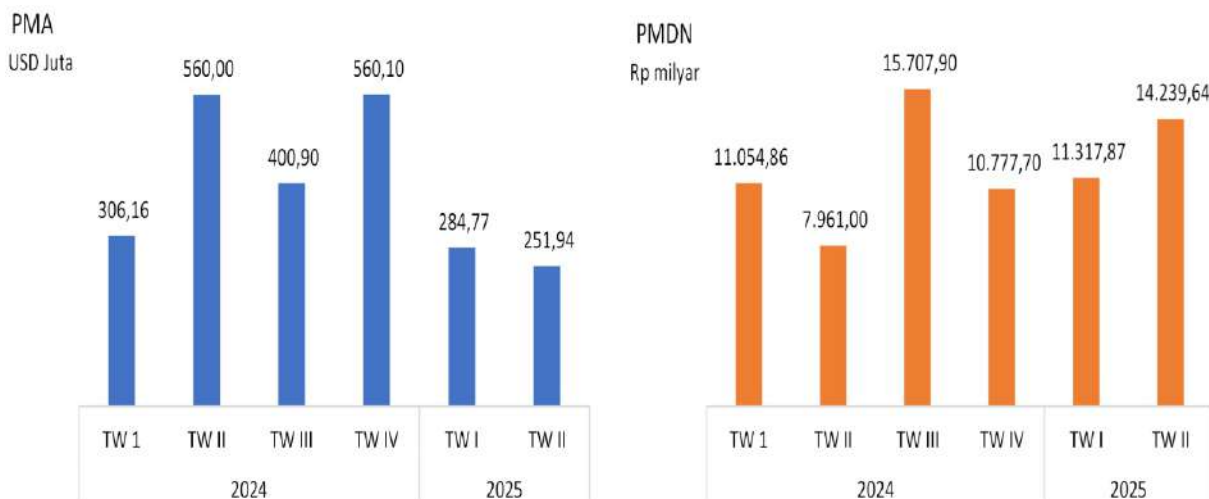
Tenaga kerja pertanian sempit merupakan tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama dengan penyerapan yang cukup besar mencapai 26,75% dari jumlah tenaga kerja Indonesia (145,77 juta orang) pada Februari tahun 2025 atau sekitar 38,99 juta orang. Jika dibandingkan dengan bulan Februari Tahun 2024 sebesar 38,30 juta orang, maka angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,72% atau sebanyak 0,69 juta jiwa. Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Subsektor tanaman pangan memiliki serapan tenaga kerja paling besar mencapai 19,54 juta orang atau 50,12% dari total tenaga kerja pertanian (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Subsektor Pertanian

2.1.3. Investasi Sektor Pertanian

Realisasi investasi PMA sektor pertanian adalah sebesar USD 1.827,18 miliar pada tahun 2024. Pada tahun 2025, realisasi investasi pada sektor ini mengalami penambahan sebesar USD 284,77 juta pada Triwulan I, dan sebesar USD 251,94 juta pada Triwulan II. Sementara realisasi investasi PMDN pada sektor pertanian adalah Rp 45,50 triliun. Investasi PMDN pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 11,2 triliun pada Triwulan I dan Rp 14,24 triliun pada Triwulan II (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian, TW I 2024 s.d. TW II 2025

Penyerapan investasi pada TW II 2025 tertinggi adalah subsektor Perkebunan sebesar USD 237,90 juta untuk PMA dan Rp 12,99 triliun untuk PMDN. Subsektor hortikultura menempati posisi ke-2 dengan realisasi investasi PMA sebesar USD 8,93 juta. Sementara realisasi investasi PMDN subsektor peternakan menempati urutan ke-2 sebesar Rp 922,07 miliar (Tabel 2.1).

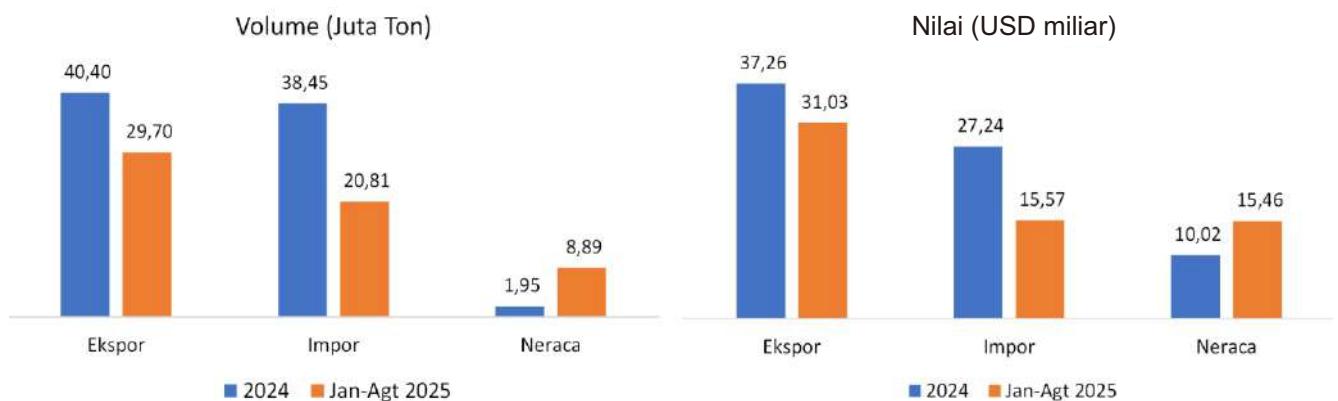
Tabel 2.1. Realisasi Investasi Subsektor Pertanian TW II 2025

Subsektor	PMA (USD Juta)		PMDN (Rp Miliar)	
	TW I 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2025
Pertanian	284.77	251.94	11,317.87	14,239.64
- Tanaman Pangan	0.21	0.12	59.69	31.95
- Hortikultura	5.79	8.93	115.87	101.27
- Perkebunan	269.87	237.90	10,036.58	12,991.28
- Peternakan	8.02	4.01	1,079.17	922.07
- Jasa penunjang pertanian	0.87	0.98	26.56	192.50
- Perburuan	0.00	0.00	-	0.57

Sumber: Pusdatin. 2025

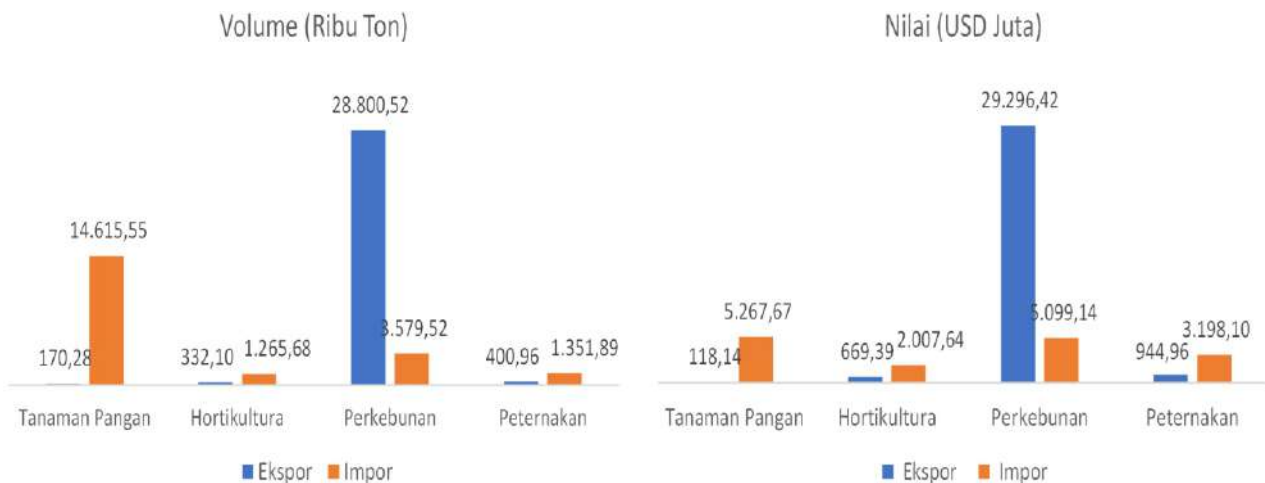
2.1.4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Volume ekspor komoditas pertanian baik segar dan olahan di tahun 2024 mencapai 40,40 juta ton dengan nilai USD 37,26 miliar. Neraca perdagangan sektor pertanian baik volume maupun nilai menunjukkan surplus sebesar 1,95 juta ton atau senilai USD 10,02 miliar. Sementara pada Januari – Agustus 2025 volume ekspor mencapai 29,70 juta ton atau senilai USD 31,03 miliar. Neraca perdagangan pada periode Januari – Agustus 2025 meningkat dibandingkan total 2024, yaitu sebesar 8,89 juta ton atau senilai USD 15,46 miliar (Gambar 2.5).



Gambar 2.5 Perkembangan Volume, Nilai dan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2024 dan Januari – Agustus 2025

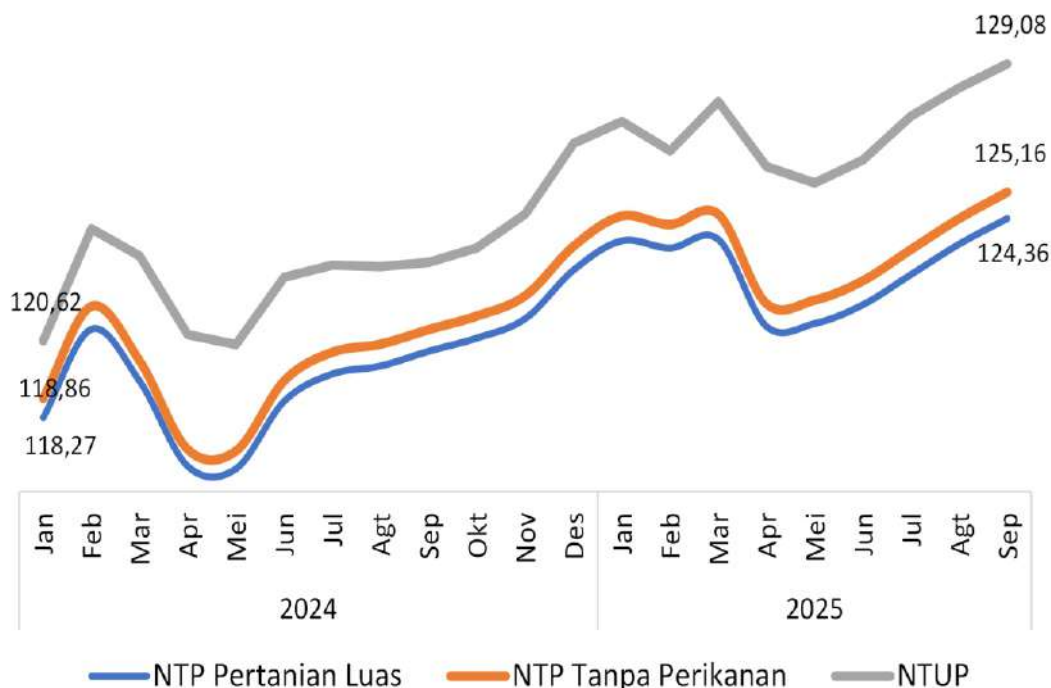
Volume ekspor tertinggi yaitu komoditas perkebunan tahun 2025 pada periode Januari - Agustus mencapai 28,80 juta ton dengan nilai USD 29,30 miliar. Sementara volume ekspor komoditas peternakan di tempat kedua mencapai 400,96 ribu ton (USD 944,96 juta), hortikultura sebesar 332,10 ribu ton (USD 669,39 juta), dan tanaman pangan 170,28 ribu ton (USD 118,14 juta) (Gambar 2.6).



Gambar 2.6 Volume dan Nilai Ekspor Impor Subsektor Pertanian Tahun 2025 (Januari – Agustus)

2.1.5. Kesejahteraan Petani

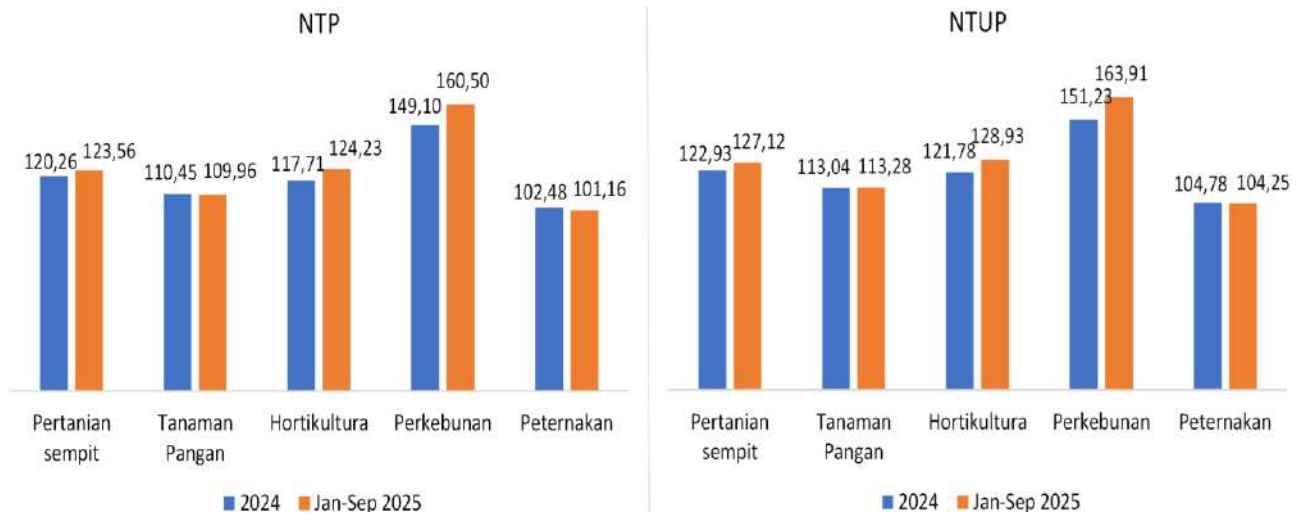
Perkembangan nilai NTP bulanan baik pertanian luas maupun sempit (tanpa perikanan) tahun 2024 sampai September 2025 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Nilai NTP gabungan ini pada bulan September 2025 adalah sebesar 124,36, pertanian sempit 125,16 dan NTUP pertanian sempit 129,08. Nilai NTP dan NTUP cenderung tinggi pada musim panen raya terutama padi yang terjadi pada awal tahun (Gambar 2.7).



Gambar 2.7. Perkembangan NTP dan NTUP Pertanian (Tanpa Perikanan)



Nilai NTP nasional pertanian sempit tahun 2024 adalah sebesar 120,26 sementara untuk NTUP sebesar 122,93. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di sini adalah nilai tukar yang mempertimbangkan pengeluaran hanya dari usaha taninya yakni biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), tanpa memperhitungkan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. NTP dan NTUP subsektor perkebunan merupakan yang tertinggi dibandingkan subsektor lainnya. Tahun 2025 sampai dengan September, nilai NTP perkebunan sebesar 160,50 dan NTUP 163,91. Secara umum terjadi kenaikan nilai baik NTP maupun NTUP di semua subsektor pertanian (Gambar 2.8).



Gambar 2.8. NTP dan NTUP Subsektor Pertanian

NTP BULAN SEPTEMBER TERUS NAIK

Sinyal positif kesejahteraan petani melalui peningkatan daya beli dan memperkuat optimisme stabilitas pangan nasional

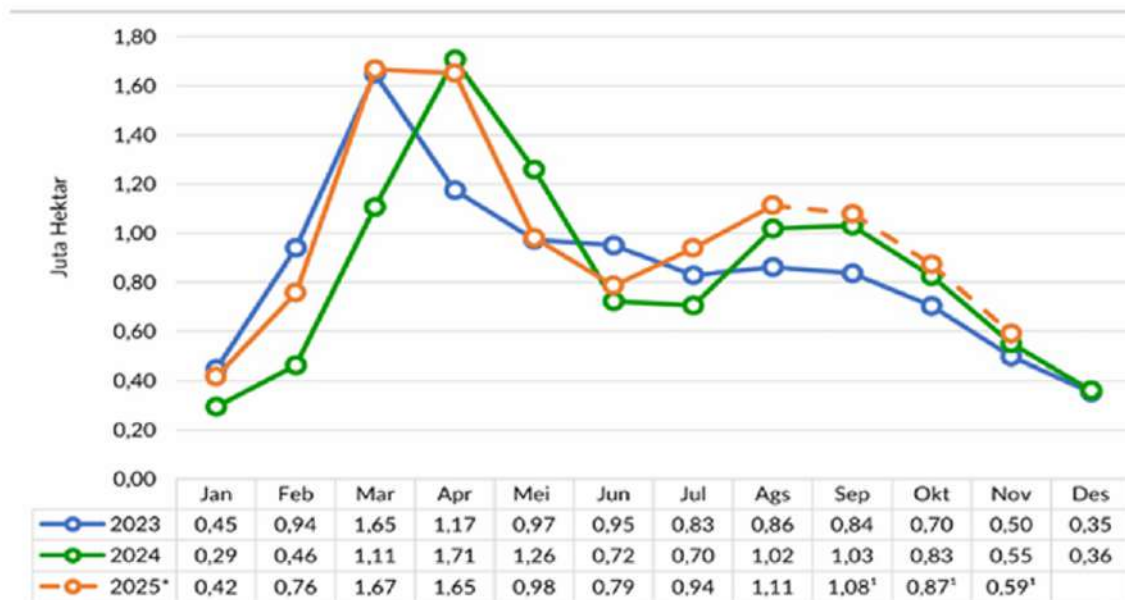


2.2. Kinerja Produksi Komoditas Strategis Pertanian Tahun 2024-2025

2.2.1. Produksi Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan berperan penting dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, khususnya melalui komoditas padi dan jagung. Pada periode 2024–2025, subsektor ini mencatat peningkatan produksi signifikan dan kemajuan menuju kemandirian pangan, didukung oleh program strategis seperti pengembangan kawasan pangan, peningkatan produktivitas, dan inovasi teknologi. Kesejahteraan petani juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari kenaikan NTPP sebesar 0,26% pada September 2025, sebagai hasil sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Padi



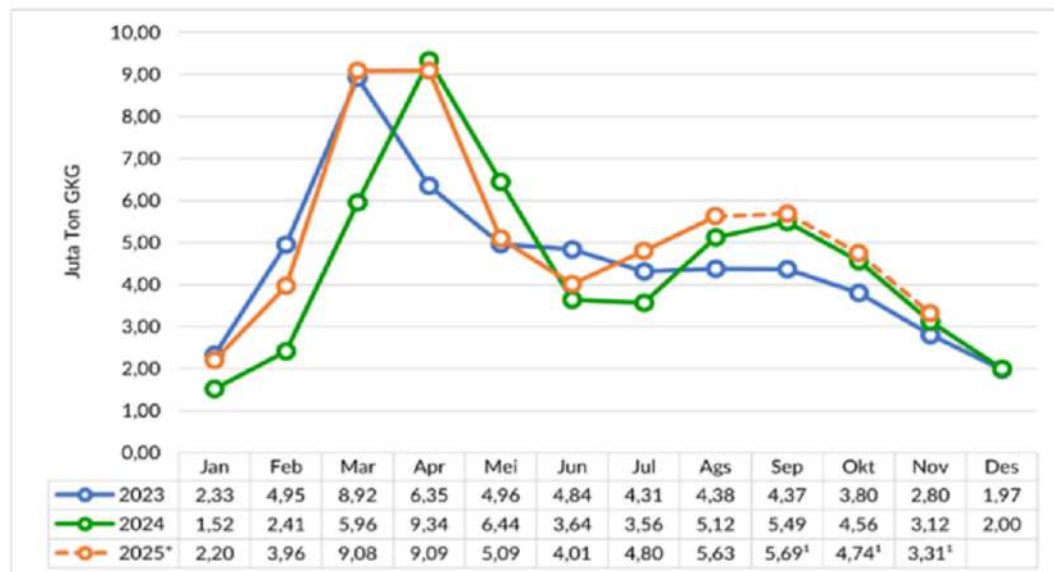
Catatan: *Angka sementara

¹Angka potensi

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

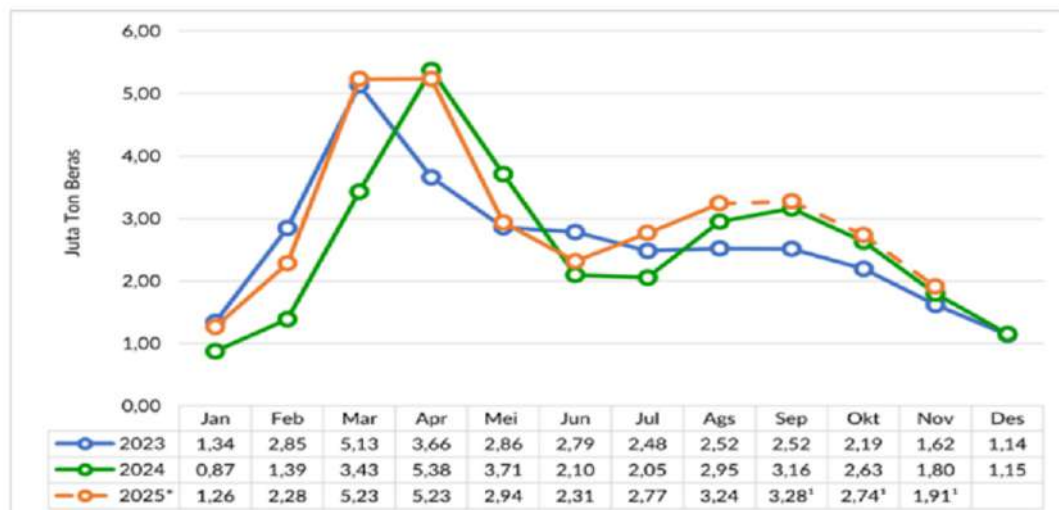
Gambar 2.9. Perkembangan Luas Panen Padi di Indonesia (juta hektare), 2023–2025





Catatan: *Angka sementara
¹Angka potensi
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Gambar 2.10. Perkembangan Produksi Padi di Indonesia (juta ton GKG), 2023-2025



Catatan: *Angka sementara
¹Angka potensi
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Gambar 2.11. Perkembangan Produksi Beras di Indonesia (juta ton beras), 2023-2025





Kinerja sektor pertanian tahun 2025 menunjukkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per 1 Oktober 2025, luas panen padi mencapai 1,11 juta ha, naik 9,18% dibanding Agustus 2024. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) juga meningkat menjadi 5,63 juta ton, atau naik 9,90%, yang setara dengan 3,24 juta ton beras (meningkat 9,81%).

Potensi panen padi pada periode September–November 2025 diperkirakan mencapai 2,54 juta ha. Secara kumulatif, Januari–November 2025, luas panen mencapai 10,86 juta ha, meningkat 12,08% dibanding periode yang sama tahun 2024. Produksi padi selama periode tersebut diperkirakan sebesar 57,60 juta ton GKG (naik 12,62%) atau 33,19 juta ton beras, bertambah 3,72 juta ton dari tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan program intensifikasi dan ekstensifikasi padi, termasuk peningkatan indeks pertanaman, penggunaan benih unggul, perluasan areal tanam, serta penguatan penyuluhan. Hasilnya berdampak nyata terhadap peningkatan produksi nasional, penguatan ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani, yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP) sebesar 0,26% pada September 2025.

Jagung

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2025 luas panen jagung pipilan mencapai 0,23 juta ha dengan produksi sebesar 1,39 juta ton jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK-KA 14%). Meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding Agustus 2024, secara kumulatif Januari–November 2025 luas panen jagung meningkat menjadi 2,59 juta ha atau naik 8,23%, dengan produksi diperkirakan mencapai 15,25 juta ton, meningkat 8,47% dibanding periode yang sama tahun 2024.





Catatan: *Angka sementara
 'Angka potensi
 Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

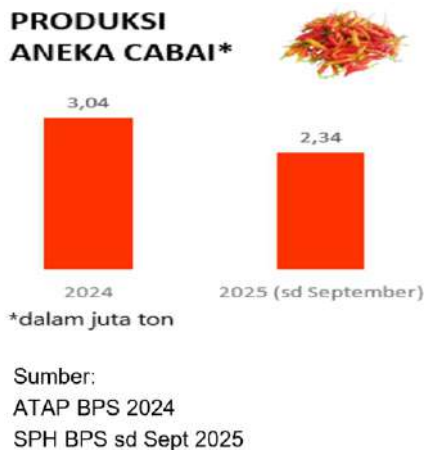
Gambar 2.12. Perkembangan Produksi Jagung Pipilan Kadar Air 14 Persen (JPK Ka14%) di Indonesia (juta ton), 2023–2025

Capaian ini mencerminkan keberhasilan program strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi jagung nasional. Sebagai komoditas strategis, jagung berperan penting tidak hanya sebagai pangan pokok kedua, tetapi juga sebagai bahan baku industri pakan dan energi. Ke depan, Kementerian Pertanian akan terus memperkuat ekstensifikasi, intensifikasi, dan hilirisasi jagung melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani guna menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani.



2.2.2. Produksi Hortikultura

Subsektor hortikultura berperan strategis dalam penyediaan pangan bergizi melalui komoditas sayuran dan buah-buahan. Pada periode 2024–2025, kinerja produksinya menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan PDB hortikultura hingga Triwulan II 2025 sebesar Rp84,43 triliun, naik Rp3,41 triliun (4,21%) dibanding tahun sebelumnya. Di tengah berbagai tantangan domestik dan global, subsektor ini tetap mampu menunjukkan ketahanan dan kinerja produksi yang memuaskan, berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 2.13. Produksi Aneka Cabai

Cabai

Produksi aneka cabai pada tahun 2024 sebesar 3,04 juta ton (turun 0,65% dibandingkan tahun 2023). Penurunan produksi terjadi karena adanya penurunan luas panen (-2,46%) yang disebabkan kemarau ekstrim di bulan Juli-September 2024, sehingga sebagian petani menunda tanam sampai masuk musim hujan. Pada tahun 2025 s.d. bulan September produksi aneka cabai telah mencapai 2,34 juta ton.



Gambar 2.14 Produksi Bawang Merah

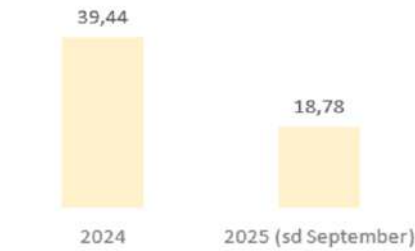
Bawang Merah

Produksi bawang merah pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton (naik 5,03% dibandingkan tahun 2023). Kenaikan disebabkan karena peningkatan luas panen (3,92%) dan provitas (1,10%). Pada tahun 2025, produksi bawang bulan September telah mencapai 1,52 juta ton.

Secara *agregat*, produksi tahunan cabai dan bawang merah telah mencukupi kebutuhan nasional. Namun, tantangan masih muncul pada aspek distribusi antarwilayah dan waktu, yang berpotensi menimbulkan fluktuasi harga. Untuk mengatasinya, pengaturan pola tanam dan pengembangan sentra produksi baru melalui keterlibatan *Champion* cabai dan bawang merah menjadi strategi utama dalam menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi.



PRODUKSI BAWANG PUTIH*



*dalam juta ton

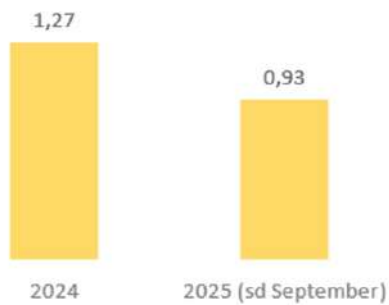
Sumber:
ATAP BPS 2024
SPH BPS sd Sept 2025

Gambar 2.15. Produksi Bawang Putih

Bawang Putih

Produksi Bawang Putih tahun 2024 sebesar 39,25 ribu ton (naik 0,47% dibandingkan tahun 2023). Produksi tahun 2025 bulan September telah mencapai 18,78 ribu ton. Ditengah keterbatasan anggaran, upaya peningkatan produksi bawang putih terus dilakukan, dengan penyediaan benih putih, pengembangan kawasan bawang putih, dan mendorong realisasi wajib tanam oleh importir bawang putih.

PRODUKSI KENTANG*



*dalam juta ton

Sumber:
ATAP BPS 2024
SPH BPS sd Sept 2025

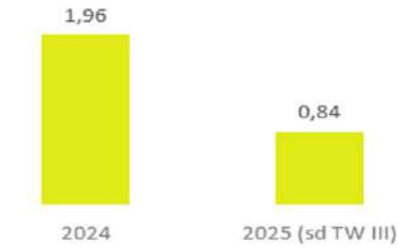
Gambar 2.16. Produksi Kentang

Kentang

Produksi kentang pada tahun 2024 sebesar 1,27 juta ton (naik 1,76% dibandingkan tahun 2023). Peningkatan produksi kentang tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen sebesar 6,1%. Sedangkan pada tahun 2025 s.d. bulan September produksi kentang telah mencapai 0,93 juta ton atau 933,03 ribu ton.



PRODUKSI DURIAN*



*dalam juta ton

Sumber:

ATAP BPS 2024

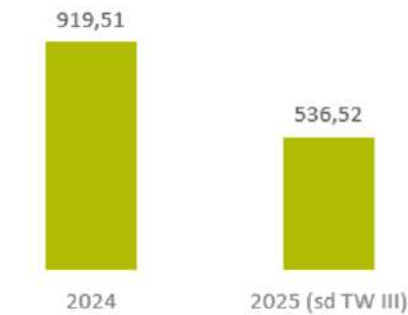
SPH BPS sd Sept 2025

Gambar 2.17. Produksi Durian

Durian

Produksi durian pada tahun 2024 mencapai 1,96 juta ton, meningkat 5,92% dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya luas panen sebesar 3,56% serta peningkatan produktivitas sebesar 2,28%. Hingga triwulan III tahun 2025, produksi durian telah mencapai 836 ribu ton. Upaya peningkatan produksi terus dilakukan melalui intensifikasi kawasan dan registrasi kebun, terutama di Sulawesi Tengah, guna mendukung permintaan ekspor ke Tiongkok yang terus meningkat.

PRODUKSI ALPUKAT*



*dalam ribu ton

Sumber:

ATAP BPS 2024

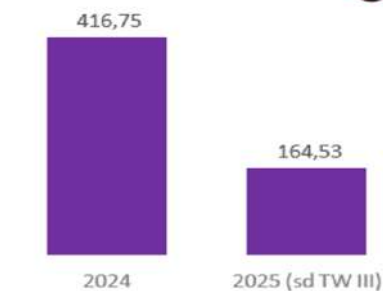
SPH BPS sd Sept 2025

Gambar 2.18. Produksi Alpukat

Alpukat

Produksi alpukat tahun 2024 mencapai 874,05 ribu ton, naik 5,20% dibanding 2023, didorong oleh peningkatan luas panen (3,93%) dan produktivitas (1,22%). Hingga Triwulan III 2025, produksi mencapai 536,52 ribu ton, dan peningkatan terus diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta bimbingan teknis budidaya alpukat.

PRODUKSI MANGGIS*



*dalam ribu ton

Sumber:

ATAP BPS 2024

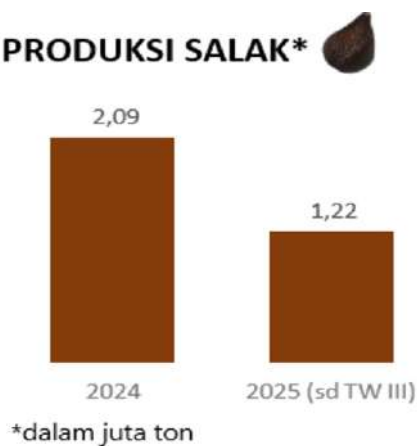
SPH BPS sd Sept 2025

Gambar 2.19. Produksi Manggis

Manggis

Produksi manggis tahun 2024 mencapai 397,17 ribu ton, naik 4,93% dibanding 2023, didorong oleh peningkatan luas panen (8,76%). Hingga Triwulan III 2025, produksi mencapai 164,53 ribu ton. Peningkatan produksi terus dilakukan melalui intensifikasi lahan dan bimbingan teknis di sentra utama manggis di Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Barat yang telah memiliki akses pasar ekspor.

PRODUKSI SALAK*



Sumber:
ATAP BPS 2024
SPH BPS sd Sept 2025

Gambar 2.20. Produksi Salak

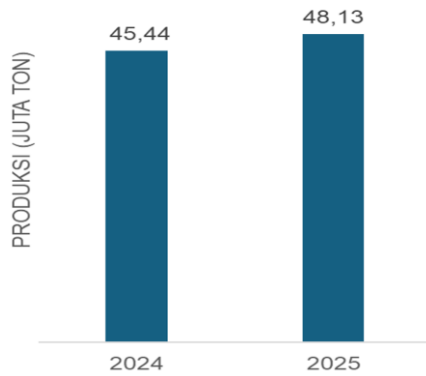
Salak

Produksi salak tahun 2024 mencapai 2,09 juta ton, naik tajam 86,85% dibanding 2023, dipicu oleh peningkatan luas panen (8,31%) dan produktivitas (72,52%). Hingga Triwulan III 2025, produksi mencapai 1,22 juta ton. Peningkatan produksi diproyeksikan berlanjut seiring meningkatnya permintaan ekspor, dengan dukungan pemerintah melalui bimbingan teknis budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu salak

2.2.3. Produksi Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja produksi komoditas perkebunan tahun 2024–2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor iklim, harga, kebijakan pemerintah, serta upaya peningkatan produktivitas di tingkat pekebun. Data produksi yang digunakan bersumber dari Statistik Perkebunan Angka Tetap (ATAP) 2024 dan Angka Estimasi (AESTI) 2025 dan menjadi acuan dalam pemantauan kinerja serta perumusan kebijakan pembangunan subsektor perkebunan tahun berikutnya.

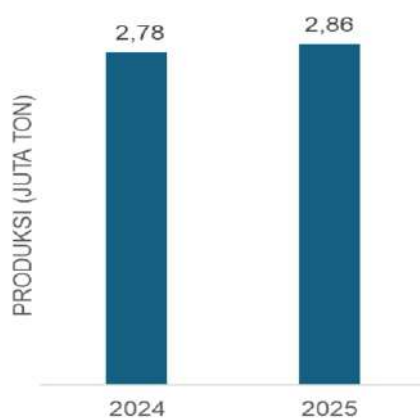




Gambar 2.21. Produksi Kelapa Sawit

Kelapa Sawit

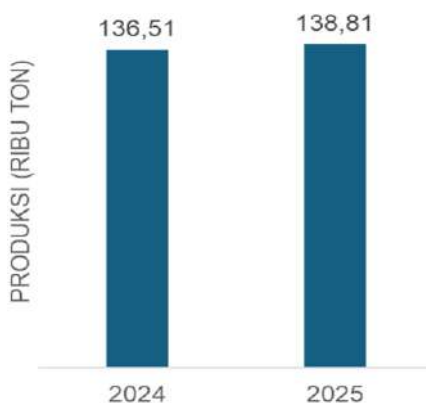
Produksi kelapa sawit tahun 2025 mencapai 48,13 juta ton, meningkat 5,9% dibanding 2024 sebesar 45,44 juta ton. Kenaikan ini didorong oleh harga minyak sawit yang tinggi, yang mendorong pekebun melakukan pemeliharaan dan pemupukan intensif, serta mulai berproduksinya Tanaman Menghasilkan (TM) dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak 2017. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan peremajaan dan pembinaan pekebun. Ke depan, fokus diarahkan pada percepatan PSR, peningkatan produktivitas sawit rakyat, dan digitalisasi sistem monitoring kebun.



Gambar 2.22. Produksi Kelapa

Kelapa

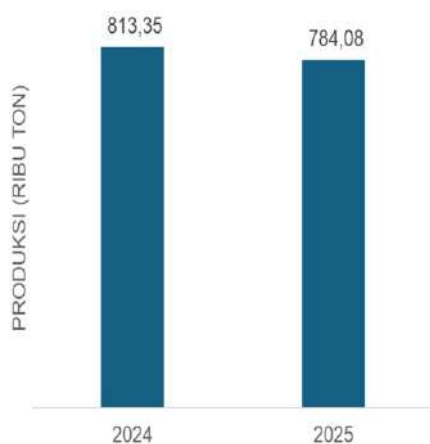
Produksi kelapa nasional tahun 2025 mencapai 2,86 juta ton, naik 2,6% dari 2,78 juta ton pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh mulai berproduksinya hasil peremajaan tanaman di sentra utama seperti Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Lampung, serta didukung oleh penerapan tumpangsari, diversifikasi produk turunan, dan stabilitas harga kopra yang menjaga motivasi petani. Upaya peningkatan produktivitas terus dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan pengembangan produk hilir bernilai tambah.



Gambar 2.23. Produksi Jambu Mete

Jambu Mete

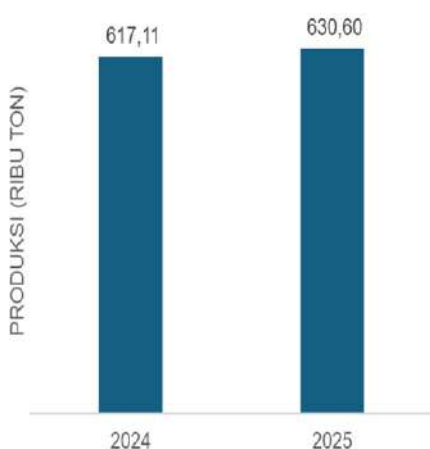
Produksi jambu mete tahun 2025 mencapai 138,8 ribu ton, naik 1,7% dari 136,5 ribu ton pada 2024. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penggunaan benih unggul bersertifikat dan penerapan budidaya yang baik (GAP). Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui peremajaan tanaman tua, penerapan teknik sambung pucuk (*grafting*), serta pemberdayaan petani.



Gambar 2.24. Produksi Kopi

Kopi

Produksi kopi nasional tahun 2025 mencapai 784,08 ribu ton, turun 3,6% dari 813,35 ribu ton pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi iklim ekstrem, serangan hama dan penyakit, serta alih fungsi lahan dan tanaman tua. Sebagian area peremajaan juga belum berproduksi optimal. Diperlukan strategi adaptasi iklim, pengendalian OPT, dan intensifikasi tanaman produktif untuk menjaga keberlanjutan produksi kopi nasional.

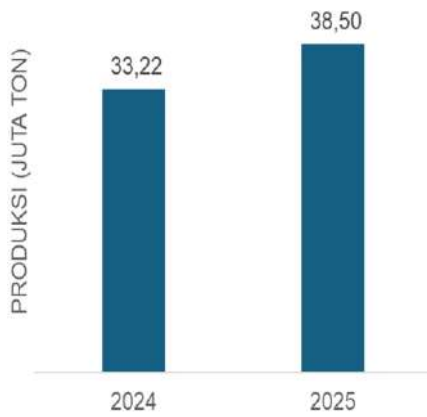


Gambar 2.25. Produksi Kakao

Kakao

Produksi kakao tahun 2025 mencapai 630,6 ribu ton, meningkat 2,2% dibandingkan tahun 2024 sebesar 617,1 ribu ton. Kenaikan ini dipicu oleh penggunaan benih unggul bersertifikat, meningkatnya harga kakao dunia, serta kemitraan petani dengan industri pengolah yang memperkuat akses pasar dan pendampingan teknis. Pertumbuhan industri cokelat domestik sebesar 4,99% selama 2020–2025 turut mendorong permintaan bahan baku, sementara kebijakan diarahkan pada pengendalian hama dan penyakit tanaman, peremajaan kebun tua, serta peningkatan mutu dan nilai tambah kakao fermentasi.

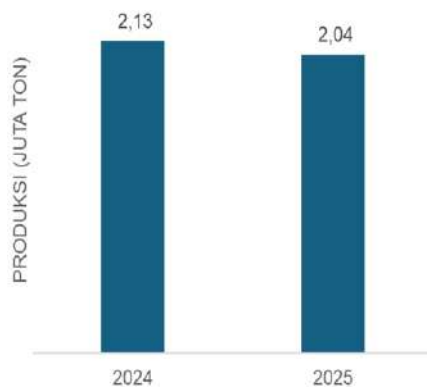




Gambar 2.26. Produksi Tebu

Tebu

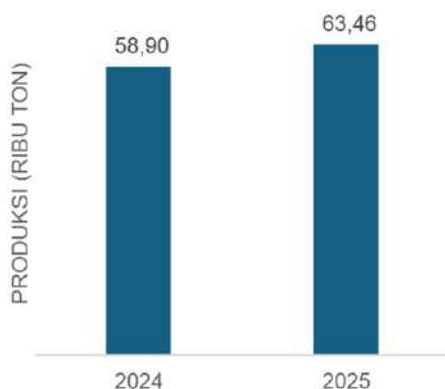
Produksi tebu nasional tahun 2025 mencapai 38,50 juta ton, naik 15,89% dari 33,22 juta ton pada 2024. Kenaikan ini ditunjang oleh perluasan areal panen menjadi 541.826 ha, peningkatan produktivitas dari 63,8 menjadi 71 ton/ha, serta kemitraan petani dan pabrik gula yang mencakup penyediaan sarana produksi hingga penjualan hasil. Selain itu, revitalisasi pabrik gula BUMN turut meningkatkan efisiensi dan kapasitas giling. Capaian ini mendukung tercapainya target swasembada gula konsumsi nasional.



Gambar 2.27. Produksi Karet

Karet

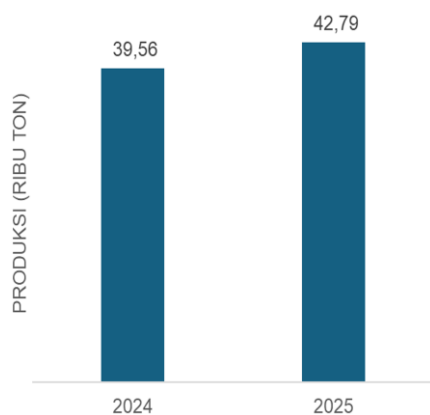
Produksi karet tahun 2025 mencapai 2,04 juta ton, turun 4,3% dari 2,13 juta ton pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi fluktuasi harga karet alam, serangan penyakit gugur daun dan jamur akar putih, serta alih fungsi lahan dan tanaman tua di perkebunan rakyat yang belum diremajakan. Kebijakan difokuskan pada peremajaan tanaman tua, pengendalian penyakit terpadu, dan pemberian insentif harga serta pembiayaan untuk menjaga motivasi petani



Gambar 2.28. Produksi Lada

Lada

Produksi lada tahun 2025 mencapai 63,46 ribu ton, naik 7,7% dari 58,90 ribu ton pada 2024. Kenaikan ini didukung oleh pemeliharaan intensif, perbaikan budidaya, dan harga ekspor yang stabil. Upaya selanjutnya difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan mutu biji lada, serta penguatan akses pasar ekspor.



Gambar 2.29. Produksi Pala

Pala

Produksi pala tahun 2025 mencapai 42,79 ribu ton, naik 8,2% dari 39,56 ribu ton pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh perluasan areal tanam, harga yang menguntungkan, dan kemitraan petani dengan industri pengolah. Pembinaan pascapanen turut meningkatkan mutu dan nilai jual produk. Ke depan, kebijakan difokuskan pada penguatan agroindustri pala, standarisasi mutu ekspor, serta diversifikasi produk olahan dan penguatan akses impor.

2.2.4. Produksi Peternakan

Kinerja Subsektor Peternakan tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 menunjukkan hasil positif melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam meningkatkan produksi, manajemen budidaya, serta efisiensi usaha. Didukung oleh program strategis Kementerian Pertanian yang berfokus pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak, penguatan kelembagaan peternak, dan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsektor ini mampu memperkuat pemenuhan protein hewani, menjaga stabilitas pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan (Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024, *Prognosa 2025*).



Daging

Tabel. 2.2. Produksi Daging

No.	Jenis Daging	Tahun 2024*)	Jan-Sep 2025**)
1	Sapi	478.852	414.934
2	Kerbau	17.394	13.597
3	Kambing	56.885	49.136
4	Domba	34.586	28.117
5	Babi	130.872	98.792
6	Ayam Buras	156.455	118.749
7	Ayam Ras Pedaging	3.835.917	3.196.391
8	Itik	33.823,4	25.370
Total		4.744.784	3.945.085

Keterangan:

Produksi daging dalam bentuk *meatyield* yaitu daging murni ditambah jeroan dan daging variasi

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Kinerja Subsektor Peternakan nasional dalam produksi daging menunjukkan tren positif meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Berdasarkan data produksi dalam bentuk *meatyield* (yang mencakup daging murni, jeroan, dan daging variasi), total produksi daging nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 4.744.784 ton.

Memasuki tahun 2025, hingga periode Januari–September 2025, produksi daging nasional telah mencapai 3.945.085 ton, atau sekitar 79,34% dari capaian produksi tahun sebelumnya. Angka ini menggambarkan bahwa laju produksi daging nasional masih terjaga dengan baik dan diproyeksikan dapat melampaui target tahunan apabila tren produksi di triwulan IV tetap stabil.

Produksi daging ayam ras pedaging masih menjadi kontributor terbesar terhadap total produksi nasional, diikuti oleh daging sapi, babi, kambing, dan domba. Hal ini sejalan dengan peningkatan efisiensi di sektor perunggasan serta dukungan sistem logistik dan pasokan pakan yang relatif stabil sepanjang tahun.

Susu dan Telur

Tabel. 2.3. Produksi Susu dan Telur

No.	Jenis Komoditas	Tahun 2024*)	Jan-Sep 2025**)
1	Produksi Susu	808.353	642.030
	Sapi Perah	808.353	642.030
2	Produksi Telur	6.876.282	5.294.210
a	Ayam Buras	236.648	179.616
b	Ayam Ras Petelur	6.342.705	4.891.550
c	Itik	236.477	177.376
d	Puyuh	27.618	20.858
e	Itik Manila	32.834	24.810

Keterangan:

*) Angka Sementara

Sumber: Buku Statistik PKH 2024

***) Angka Sangat Sementara

Produksi susu nasional menunjukkan kinerja stabil dengan peningkatan kualitas dan efisiensi di tingkat peternak. Pada tahun 2024 produksi mencapai 808.353 ton, dan hingga September 2025 telah terealisasi 642.030 ton (79,4%), dengan potensi melampaui capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan produktivitas di sentra-sentra utama seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan populasi sapi perah produktif, biaya pakan tinggi, dan fluktuasi harga susu segar.

Sementara itu, produksi telur nasional tahun 2024 tercatat 6.876.282 ton dan terus menunjukkan tren peningkatan hingga 2025. Komoditas ini menjadi penopang utama subsektor peternakan, didorong oleh efisiensi usaha unggas, penerapan manajemen pemeliharaan yang lebih baik, serta dukungan terhadap ketersediaan pakan, distribusi, dan stabilitas harga di tingkat peternak dan konsumen.



2.3. Kinerja Faktor Pendukung Pembangunan Pertanian

2.3.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian

Dalam APBN Tahun 2024, anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar Rp15.618,99 miliar dengan realisasi mencapai Rp14.305,74 miliar (91,59%). Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasional sebesar Rp2.518,20 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp13.100,79 miliar yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan pertanian di berbagai subsektor. Dari total anggaran, Rp11.117,06 miliar (71,2%) dialokasikan untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, sementara Rp4.501,93 miliar (28,8%) digunakan untuk prioritas lainnya. Sumber pembiayaan kegiatan prioritas nasional bersumber dari Rupiah Murni (93,89%), Pinjaman Luar Negeri (2,92%), dan Non Rupiah Murni selain PLN/PDN (3,19%).

Pelaksanaan anggaran Tahun 2024 secara umum menunjukkan efektivitas dalam mendukung peningkatan produksi, efisiensi kegiatan, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Tabel 2.4. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tahun Anggaran / Sumber Dana	Pagu	PN	Non PN	Realisasi	% Realisasi
TA 2024	15.618,99	11.117,06	4.501,93	14.305,74	91,59
- RM	14.619,29	10.437,72	4.181,57	13.387,25	91,57
- PLN/PDN	471,91	324,46	147,45	408,08	86,47
- RM NON PLN/PDN	527,79	354,88	172,91	510,41	96,71

Sumber: Biro Perencanaan, 2024

Beberapa kegiatan Prioritas Nasional dan prioritas lainnya yang berlanjut ke tahun 2025 meliputi optimasi lahan, pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penyediaan benih dan sarana produksi, yang terbukti berdampak positif terhadap peningkatan ketersediaan pangan, pendapatan petani, dan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Kementerian Pertanian meningkat menjadi Rp29.373,98 miliar, terdiri atas belanja operasional Rp2.576,59 miliar dan belanja nonoperasional Rp26.797,39 miliar untuk mendukung percepatan swasembada pangan. Dari total alokasi tersebut, Rp25.280,35 miliar (86%) diarahkan untuk Program Prioritas Nasional, dengan struktur pembiayaan Rupiah Murni (92,83%), Pinjaman/Pendanaan Luar Negeri (5,62%), dan Non Rupiah Murni (1,55%). Peningkatan anggaran juga dipengaruhi oleh Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp2.460,5 miliar untuk mendukung hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa, kopi, kakao, pala, lada, dan jambu mete.

Tabel 2.5. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (dalam Rp miliar)

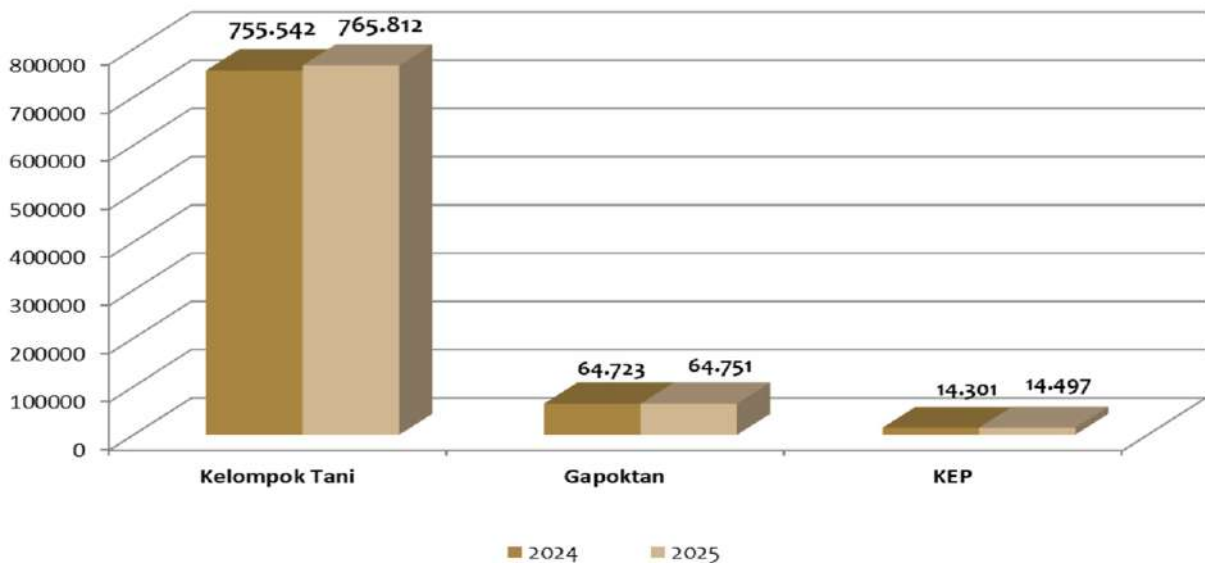
TAHUN ANGGARAN / SUMBER DANA	PAGU AWAL	PN	NON PN	PAGU PER 10 OKT	REALISASI	% REALISASI
TA 2025	29,373.98	25,280.35	4,093.63	31,895.53	9,603.38	30.11%
- RM	27,561.27	23,467.64	4,093.63	30,021.74	9,378.56	31.24%
- PLN/PDN	1,412.47	1,419.78	(7.31)	1,412.47	88.75	6.28%
- RM NON PLN/PDN	400.24	392.93	7.31	461.32	136.07	29.50%

Sumber: Biro Perencanaan, 2025

2.3.2. Kinerja Penyuluhan dan SDM Pertanian

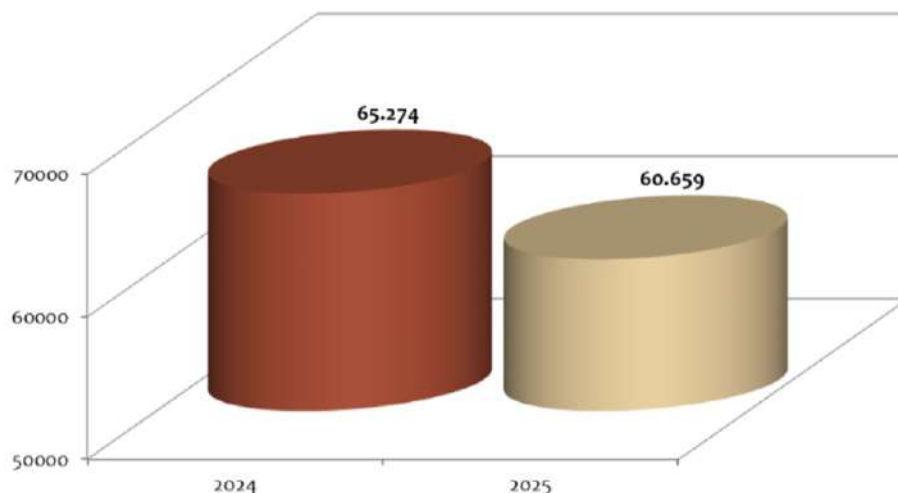
Penyuluhan pertanian berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani melalui pendampingan teknis, edukasi, serta fasilitasi akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan permodalan. Upaya ini mendorong petani untuk lebih produktif, efisien, dan sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, penyuluh memperkuat kelembagaan petani di lapangan melalui pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Hingga tahun 2025, telah terbentuk 765.812 Poktan, 64.751 Gapoktan, dan 14.497 KEP, mencerminkan penguatan kolaborasi dan profesionalisme petani menuju pertanian yang produktif dan berkelanjutan.



Gambar 2.30. Jumlah Kelembagaan Petani Tahun 2024 dan 2025

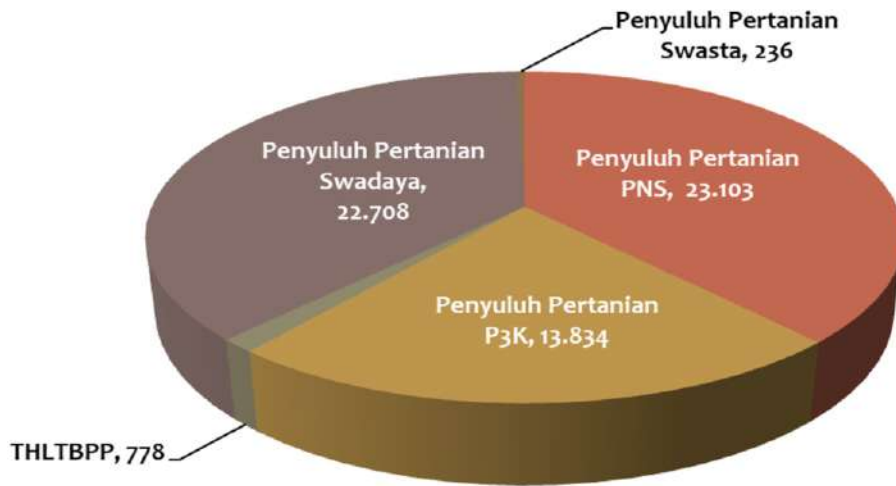
Penguatan kelembagaan petani perlu didukung oleh sumber daya penyuluh yang memadai. Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan dan pengembangan metode pertanian berperan penting dalam pendampingan petani di lapangan. Jumlah penyuluh pertanian tahun 2024 sebanyak 65.274 orang, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 60.659 orang, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.31. Jumlah Penyuluh Tahun 2024 dan 2025



Berdasarkan status kepegawaiannya, penyuluh pertanian terdiri dari PNS, PPPK, Tenaga Harian Lepas/Tenaga Bantu (THL-TB), Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta. Penyuluh PNS dan PPPK melaksanakan tugas teknis penyuluhan sesuai kewenangan yang diberikan, sedangkan THL-TB direkrut untuk membantu kegiatan penyuluhan di lapangan. Peran penyuluhan juga didukung oleh Penyuluh Swadaya, yaitu petani berprestasi yang secara sukarela membagikan pengalamannya, serta Penyuluh Swasta dari dunia usaha atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang penyuluhan pertanian. Jumlah Penyuluh Pertanian berdasarkan status kepegawaian tahun 2025, sebagai berikut:



Gambar 2.32. Jumlah Penyuluh Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

“

Penyuluh pertanian berperan strategis dalam meningkatkan produksi nasional, hingga stok beras mencetak rekor lebih dari 3 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun terakhir..

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berkat kerja keras penyuluh dan dukungan semua pihak, Indonesia mencatat prestasi membanggakan:

- ✓ Stok beras nasional mencapai 3,18 juta ton, tertinggi dalam 23 tahun
- ✓ Produksi pangan melonjak hingga 50–62% hanya dalam 4 bulan!

Saat dunia menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus! Ini adalah buah dari kekompakan penyuluh, kemudahan akses pupuk, serta semangat petani



2.3.3. Kinerja Lahan dan Irigasi Pertanian

Dalam ekosistem agribisnis swasembada pangan, lahan dan irigasi berperan sebagai faktor kunci (*key enabler*) dalam mendukung keberhasilan produksi dari hulu hingga hilir. Ketersediaan lahan dan air yang memadai menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan sistem pertanian, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, dan alih fungsi lahan. Menjawab hal tersebut, Kementerian Pertanian, sesuai Permentan No. 2 Tahun 2025, berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu penyediaan lahan pertanian serta penyediaan air dan irigasi yang berkualitas dan mencukupi.

1. Penyediaan Lahan

Penyediaan lahan yang berkualitas dan memadai didukung melalui penetapan 3 program utama, yaitu (a) cetak sawah, untuk kebutuhan penambahan area tanam, (b) optimasi lahan, untuk meningkatkan produktivitas lahan IP dan produksi pangan pada lahan sudah dibudidayakan, serta (c) perlindungan alih fungsi lahan melalui LP2B.

Cetak Sawah

Cetak Sawah merupakan upaya penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum diusahakan, termasuk lahan terlantar atau bero, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan sistem sawah. Secara umum, pelaksanaannya mencakup tiga tahap utama, yaitu: (1) perencanaan (pengkajian data potensi, penyusunan AOI, serta penetapan CPCL dan SID); (2) konstruksi (pekerjaan fisik dan olah lahan); serta (3) pemanfaatan (tanam dan panen). Rincian tahapan pelaksanaan konstruksi cetak sawah ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.33. Tahapan Kegiatan Cetak Sawah

Sedangkan detail tahapan pelaksanaan konstruksi cetak sawah sendiri dimulai dari tinjauan kondisi lahan eksisting, persiapan dan mobilisasi peralatan, LC/LL, pembangunan pematang, pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi sampai dengan olah lahan.

Pada tahun 2025 ditetapkan target luasan cetak sawah 225.000 hektare yang mencakup 17 provinsi dengan sebaran dan luasan di masing-masing provinsi ditunjukkan pada gambar 2.35.

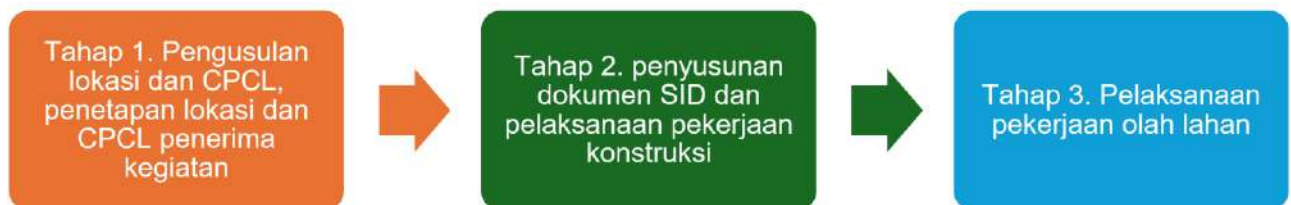


Gambar 2.34. Sebaran Target Kegiatan Cetak Sawah per Provinsi

Kegiatan cetak sawah tahun 2025 berfokus di lima provinsi utama, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Papua Selatan (Merauke), dan Sulawesi Selatan, dengan total luasan mencapai 183.366 hektare atau sekitar 81,5% dari target nasional. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan alokasi terbesar sebesar 31,6%, disusul Sumatera Selatan (20,6%), Kalimantan Selatan (13,3%), Papua Selatan (9,2%), dan Sulawesi Selatan (6,8%).

Optimasi Lahan

Secara umum proses bisnis kegiatan optimasi lahan dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut:



Gambar 2.35. Tahapan Kegiatan Optimasi Lahan



“

Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI



Kegiatan optimasi lahan pada tahun 2024 dilaksanakan di 13 provinsi sedangkan untuk tahun 2025 kegiatan optimasi lahan dilaksanakan di 24 provinsi. Detail sebaran untuk kegiatan OPLAH tahun 2024-2025 pada tahap olah lahan tersaji pada gambar berikut:

Realisasi Kegiatan Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa dan Non Rawa TA 2024 - 2025



Gambar 2.36. Realisasi Olah Tanah Kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2024-2025

Perbandingan target dan realisasi pekerjaan SID, konstruksi dan olah lahan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 (sampai dengan September) tersaji pada Gambar 2.37.



Gambar 2.37. Target dan realisasi Optimasi Lahan tahun 2024-2025

Gambar 2.37 menunjukkan bahwa capaian kegiatan optimasi lahan tahun sebelumnya sangat tinggi, dengan realisasi lebih dari 97% untuk pekerjaan SID, konstruksi, dan olah lahan. Sementara itu, capaian tahun 2025 masih dalam tahap progres, seiring sebagian besar pekerjaan sedang berlangsung dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pelaksanaan.



Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan pangan nasional, khususnya beras, sementara ketersediaan lahan pertanian (LBS) semakin terbatas. Salah satu tantangan utama adalah alih fungsi lahan sawah ke *non* pertanian, yang pada periode 2019–2024 mencapai sekitar 79,6 ribu hektare. Kondisi ini terjadi karena pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan tata ruang belum optimal, serta belum adanya skema insentif dan disinsentif yang efektif.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan pangan nasional, hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan membutuhkan 60,70 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 38,08 juta ton beras, untuk memenuhi konsumsi langsung dan kebutuhan stok pangan bagi penduduk yang diproyeksikan mencapai 305 juta jiwa. Dengan kebutuhan tersebut, total lahan sawah yang diperlukan diperkirakan mencapai 8,05 juta hektare agar ketahanan dan swasembada pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan.

Untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 41/2009 tentang LP2B, UU No. 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Kementerian Pertanian juga melaksanakan langkah strategis seperti penerbitan surat larangan perubahan fungsi lahan sawah (hasil Rakortas 18 Maret 2025), surat larangan alih fungsi lahan (16 Mei 2025), serta penetapan LBS dan cetak sawah menjadi LP2B (30 Juli 2025). Upaya lain meliputi: pemutakhiran data spasial dan sistem monitoring KP2B/LP2B nasional, serta pembinaan pemerintah daerah dalam penetapan dan pengendalian alih fungsi lahan melalui peraturan daerah.

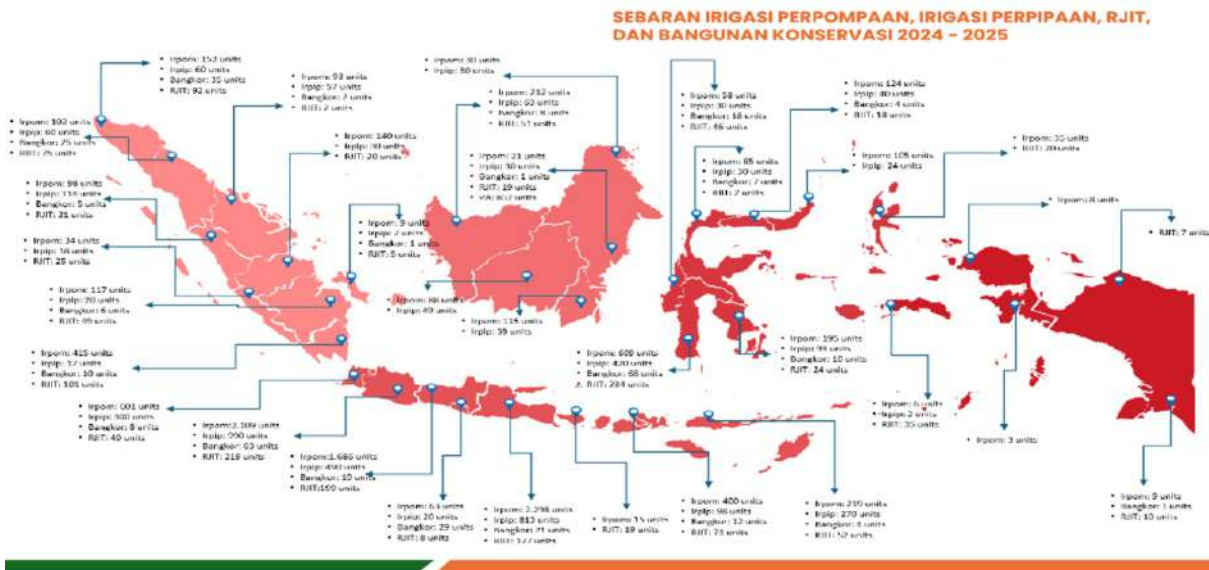
2. Penyediaan Air dan Irigasi

Dukungan terkait aspek penyediaan air dan irigasi dilakukan Ditjen LIP melalui penetapan dua program utama, yaitu (1) penguatan ketersediaan air melalui irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, RJIT maupun Konservasi sumber air serta (2) pengawalan INPRES No. 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

Selama dua tahun terakhir, pengelolaan air irigasi pertanian telah dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui skema bantuan langsung kepada kelompok tani. Total bantuan aspek irigasi tahun 2024–2025 mencapai 16.485 unit, terdiri atas 10.262 unit irigasi perpompaan, 4.204 unit irigasi perpipaan, 522 unit bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta 1.662 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Sebaran pelaksanaan kegiatan per provinsi ditampilkan pada Gambar 2.38.





Gambar 2.38. Sebaran Kegiatan Aspek Irigasi Tahun 2024-2025

Sebagai salah satu hasil nyata dari pelaksanaan program penyediaan air dan irigasi, kegiatan irigasi yang dilaksanakan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani. Di lokasi penerima bantuan pemerintah, diproyeksikan terjadi kenaikan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 0,5–1, yang berdampak langsung pada peningkatan hasil dan pendapatan usaha tani. Proyeksi nilai produksi selengkapnya disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Kontribusi Irigasi terhadap Peningkatan Produksi dan Produktivitas Lahan

Uraian	Satuan	Tahun 2024				Tahun 2025	
		Irigasi Perpompaan	Irigasi Perpipaan	Bangunan Konservasi	RJIT	Irigasi Perpompaan	Bangunan Konservasi
Jumlah kegiatan	Unit	9.487	4.204	357	1.662	775	165
Luas terdampak	Ha	85.065	42.040	9.130	41.550	6.680	1.650
Potensi peningkatan IP		1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5
Provitas rata-rata	Ton/Ha	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Penambahan luas tanam	Ha	85.065	42.040	4.565	20.775	6.680	825
Luas panen	Ha	82.122	40.585	4.407	20.056	6.449	796
Peningkatan produksi (GKP)	Ton	427.033	211.044	22.917	104.292	33.534	4.142
Produksi (GKG)	Ton	356.060	175.969	19.108	86.959	27.961	3.453
Produksi beras (ton)	Ton	227.950	112.655	12.233	55.671	17.900	2.211
Nilai produksi	Rp	2.775.715.184	1.371.787.061	148.958.324	677.899.053	217.971.874	26.920.179

Sumber: Ditjen LIP, 2025

Pengawasan Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2025

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, pemerintah berkomitmen memperkuat infrastruktur irigasi sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian berperan dalam penyiapan lokasi, verifikasi teknis, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan guna memastikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas



lahan dan kesejahteraan petani. Pelaksanaan Inpres ini juga menjadi wujud sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian pangan melalui penyediaan air pertanian yang berkelanjutan.

2.3.4. Kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian

Kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi fondasi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan produktivitas pertanian. Melalui kegiatan pupuk bersubsidi, penyaluran bantuan pestisida dan herbisida, penyediaan alat dan mesin pertanian baik prapanen maupun pascapanen serta fasilitasi pembiayaan pertanian, Kementerian Pertanian berupaya menjaga stabilitas produksi di tengah dinamika perubahan cuaca, harga input, dan kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat.

Pupuk bersubsidi

Pemerintah menunjukkan komitmen fiskal yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan program subsidi pupuk. Pada tahun 2024, anggaran subsidi mencapai Rp49,87 triliun dengan realisasi 95%, sementara tahun 2025 dialokasikan Rp44,16 triliun dengan HET yang tetap stabil.



Gambar 2.39. Distribusi dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi

Total alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024–2025 dipertahankan sebesar 9,55 juta ton, dengan penyerapan tertinggi pada pupuk Urea (80,05%) dan NPK (82,81%). Secara *agregat*, penyerapan mencapai 76,9% pada 2024 dan 59,33% hingga September 2025, yang menandakan perlunya peningkatan distribusi.

Program ini menunjukkan dampak signifikan dengan tingkat kemanfaatan 100% dan menjangkau 10,88 juta petani penerima manfaat. Meski capaian positif, optimalisasi penyerapan volume pupuk masih menjadi tantangan utama yang perlu dibenahi secara berkelanjutan.



PETA PENYEBARAN PUPUK BERSUBSIDI TA 2024



Gambar 2.40. Penyebaran Pupuk Bersubsidi TA 2024

PETA PENYEBARAN PUPUK BERSUBSIDI TA 2025*



*sampai dengan bulan September 2025

Gambar 2.41. Penyebaran Pupuk Bersubsidi TA 2025



Bantuan Pupuk dan Pestisida

Program sarana produksi mendukung peningkatan produksi pertanian merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Kegiatan utamanya meliputi penyediaan pupuk, dolomit, urea, NPK, serta pestisida yang digunakan pada lahan pertanian dan proyek cetak sawah di berbagai daerah. Pada tahun 2024, program ini menunjukkan kemajuan signifikan dengan pagu anggaran Rp176,58 miliar dan realisasi Rp114,86 miliar (65,05%), berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, terutama melalui distribusi dolomit, pupuk mikro, dan senyawa humat yang memperbaiki kondisi tanah. Kendati demikian, beberapa wilayah masih menghadapi kendala distribusi dan kesiapan lahan.



Gambar 2.42. Dolomit sebagai Bantuan Sapropdi pada Lahan Rawa

Secara keseluruhan, capaian penyediaan sapropdi tahun 2024 dikategorikan cukup berhasil, meskipun perlu peningkatan koordinasi dan percepatan distribusi di lapangan.

Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian memperluas dukungan sarana produksi pertanian untuk mendukung optimalisasi lahan dan cetak sawah di berbagai daerah dalam rangka peningkatan produksi nasional. Program ini berperan penting dalam menyediakan pupuk, pestisida, dan bahan penunjang lainnya bagi petani di lahan baru dan lahan suboptimal.

Pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterlambatan distribusi, akses ke wilayah terpencil, serta kesiapan lahan akibat faktor cuaca. Untuk mengatasinya, Kementan memperkuat koordinasi lintas unit, mempercepat sinkronisasi data, dan melakukan monitoring lapangan secara intensif. Upaya tersebut mendorong peningkatan efektivitas penyaluran bantuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas serta pencapaian target swasembada pangan nasional.





“

Oknum yang “menzalimi” petani dengan menaikkan harga pupuk tidak boleh ada lagi. Kami akan mencabut izin distributor dan kios pupuk yang nakal serta membersihkan pegawai yang terlibat di pusat.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI





Alat dan Mesin Pertanian

Program bantuan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2024–2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat modernisasi pertanian nasional. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Penyediaan alsintan prapanen dan pascapanen juga memperluas akses petani terhadap teknologi modern sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian di seluruh Indonesia.



Gambar 2.43. Uji Coba *Rice Transplanter* oleh Menteri Pertanian



1). Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

Pelaksanaan penyediaan alsintan prapanen 2024–2025 menunjukkan peningkatan positif. Pada 2024, dari pagu Rp1,78 triliun untuk 91.108 unit, terealisasi Rp1,71 triliun (96,16%), dengan dominasi pompa air, *hand sprayer*, dan traktor roda dua, mendukung efisiensi budidaya petani.

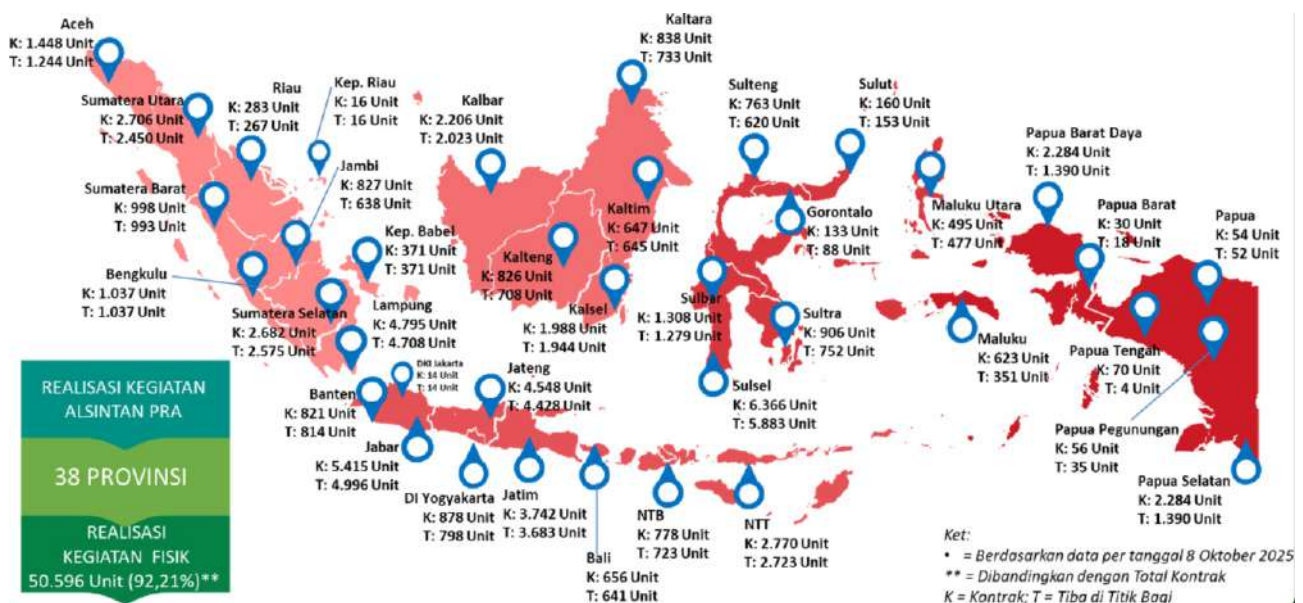
INFOGRAFIS REALISASI SEBARAN KEGIATAN ALSINTAN PRA PANEN TA 2024



Gambar 2.44. Sebaran Alsintan Prapanen Tahun 2024

Hingga 8 Oktober 2025, alokasi alsintan meningkat menjadi Rp6,61 triliun untuk 75.731 unit, dengan realisasi kontrak Rp2,95 triliun (47%) untuk 55.049 unit. Jenis utama yang terealisasi adalah traktor roda empat, traktor roda *crawler*, dan pompa air, mendukung percepatan mekanisasi pertanian.

INFOGRAFIS REALISASI SEBARAN KEGIATAN ALSINTAN PRA PANEN TA 2025*



Gambar 2.45. Sebaran Alsintan Prapanen Tahun 2025





“

Kami akan menindak tegas oknum yang memperjual belikan bantuan alsintan, termasuk traktor, yang merupakan uang rakyat dan seharusnya diterima oleh petani secara cuma-cuma.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI



Secara keseluruhan, penyediaan alsintan prapanen menunjukkan kemajuan positif. Tahun 2024 seluruh target fisik tercapai, sementara 2025 meningkat baik dari jumlah maupun jenis alsintan, termasuk pengenalan *drone* pertanian. Capaian ini menegaskan komitmen Kementerian Pertanian memperkuat infrastruktur, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung transformasi pertanian nasional.

2). Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen

Program bantuan alsintan pascapanen 2024–2025 bertujuan meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi kehilangan hasil di tingkat petani. Pada 2024, penyediaan 1.400 unit *Combine Harvester* besar menekan susut hasil hingga 5,5%, menyelamatkan 88.150 ton GKG senilai Rp573 miliar, dengan efisiensi biaya Rp756 miliar.

Tahun 2025, mekanisasi diperluas dengan 1.462 unit *Combine Harvester* besar dan 1.313 unit *Power Thresher* (total 2.775 unit). Analisis kinerja menunjukkan *Combine Harvester* menyelamatkan 92.053 ton GKG senilai Rp598,35 miliar dengan efisiensi biaya Rp789,48 miliar, sedangkan *Power Thresher* menyelamatkan 18.224 ton GKG senilai Rp118,46 miliar dan efisiensi biaya Rp59,09 miliar, sehingga total penyelamatan 110.277 ton GKG senilai Rp716,80 miliar dengan efisiensi biaya Rp848,56 miliar.



Gambar 2.46. Uji Coba *Combine Harvester* oleh Menteri Pertanian

Secara keseluruhan, mekanisasi pascapanen terbukti menurunkan kehilangan hasil sebesar 0,2%, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sistem pertanian yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan, mendukung modernisasi pertanian dan kesejahteraan petani.



Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Alsintan

Program pembiayaan pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Tebu, dan Kredit Alsintan terus menunjukkan kinerja positif dalam memperluas akses petani terhadap pembiayaan formal dan memperkuat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang modern, mandiri, dan berkelanjutan. Selama dua tahun terakhir, realisasi KUR sektor pertanian telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp160 triliun kepada jutaan pelaku usaha tani di seluruh Indonesia, terutama pada subsektor perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan.



Gambar 2.47. Pemberian Bantuan KUR kepada Poktan

Program KUR Tebu dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp1,387 triliun hingga Oktober 2025, turut mendorong pengembangan dan peremajaan lahan tebu serta memperkuat kemitraan antara petani dan pabrik gula guna meningkatkan efisiensi rantai pasok industri gula nasional.

DUKUNGAN KUR KHUSUS TEBU UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA GULA

PERMENKO NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUR

Penyerapan KUR Tebu Nasional sebesar 1,34 T dengan 20.958 debitur

5 Provinsi Realisasi KUR Tebu Tertinggi (dalam miliar rupiah)



8 POINT PERUBAHAN

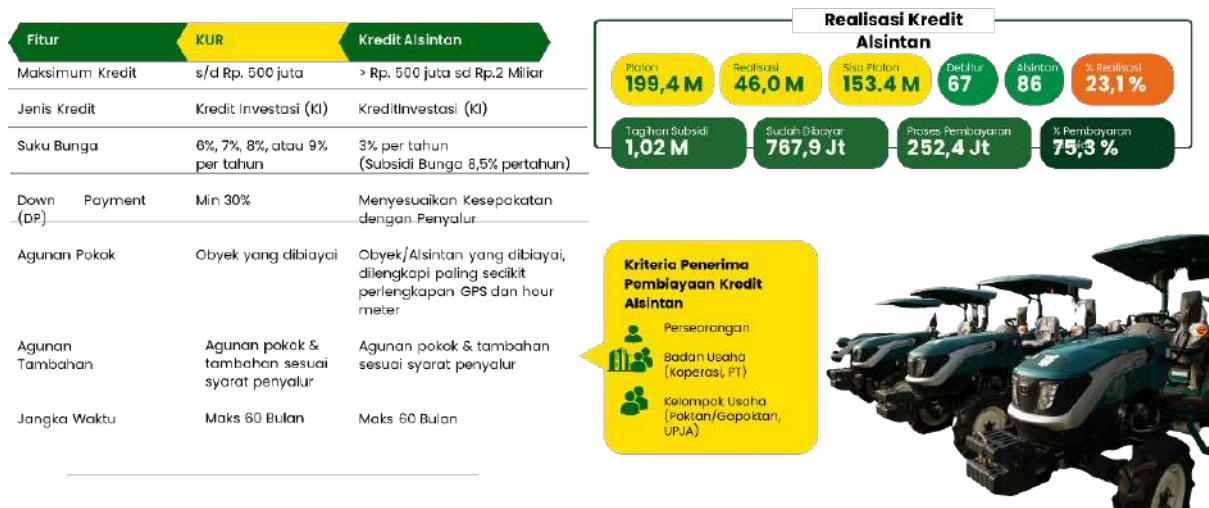
- Suku Bunga (%)**
Bunga efektif 6% tetap
- Plafon (Rp)**
Sampai dengan Rp. 500 juta
- Calon Penerima**
Debitur individu/perorangan, Badan Usaha dan/atau kelompok usaha
- Total Akumulasi Plafon (Rp)**
 - Tanpa batasan akses KUR
 - Tanpa batasan akumulasi plafon KUR
- Mekanisme Pembayaran Angsuran**
 - Pembayaran pokok dan Bunga/Margin secara angsuran berkala
 - Pembayaran sekaligus saat jatuh tempo
- Agunan**
 - Agunan pokok (usaha yang dibiayai)
 - Agunan Tambahan untuk plafon KUR diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta tidak diperikn untuk debitur KUR Khusus sektor pertanian dan Penerima KUR tebu sepanjang bekerjasama dengan off-taker sebagai avalis
- Mekanisme Validasi Kelompok**
Off-taker dapat memberikan validasi kelompok usaha binaannya beserta anggota dengan kewajiban host to hos system dengan Penyalur KUR dan SIKP
- Histori Akses Kredit Komersial**
Pemberian Relaksasi kebijakan KUR berupa pengecualian bagi calon penerima KUR Reguler dan KUR Khusus sektor pertanian (g.l tebu) dari ketentuan belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi modal kerja komersial

Gambar 2.48. Skema KUR Tebu untuk Swasembada Gula



Sementara itu, Kredit Alsintan berkontribusi signifikan terhadap modernisasi pertanian melalui pembiayaan alat dan mesin pertanian yang meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan kehilangan hasil, serta memperbaiki mutu produk pertanian.

DUKUNGAN KREDIT ALSINTAN 2025 UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN



Gambar 2.49. Kredit Alsintan untuk Swasembada Pangan

Ke depan, Kementerian Pertanian akan memperkuat pembiayaan pertanian berbasis kluster, memperluas kemitraan antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, serta mengintegrasikan dukungan pembiayaan dengan pelatihan operator, layanan purna jual, dan asuransi usaha tani untuk mewujudkan sistem pertanian nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

2.3.5. Standardisasi, Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Upaya penguatan faktor pendukung pembangunan pertanian terus dilakukan melalui kegiatan standardisasi, perakitan, dan modernisasi pertanian yang difokuskan pada peningkatan kualitas alat mesin pertanian, benih, bibit, serta hasil pertanian sesuai standar nasional. Standardisasi menjadi instrumen strategis untuk menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk pertanian nasional di tingkat domestik maupun *global*.

Penerapan Standar Nasional Indonesia di Bidang Pertanian

Pada periode 2024–2025, Kementerian Pertanian mencatat kemajuan signifikan dalam penguatan standardisasi pertanian untuk membangun sistem produksi dan rantai nilai yang bermutu, efisien, dan berdaya saing. Sebanyak 92 Standar Nasional Indonesia (SNI) telah disusun dan 30 SNI diterapkan oleh pengguna, mencakup alat dan mesin pertanian, benih dan bibit unggul, produk olahan, serta pengujian lingkungan.



Beberapa SNI strategis yang mendukung modernisasi pertanian antara lain SNI 7416:2023 tentang Traktor Roda Empat dan SNI 738:2023 tentang Traktor Roda Dua untuk memastikan alsintan yang beredar memenuhi standar mutu dan efisiensi kerja; SNI 7651-11:2023 tentang Sapi Potong dan SNI 8405-2:2023 tentang Bibit Ayam yang menjamin mutu genetik dan ketelusuran bibit ternak; serta SNI 9224-1:2023 tentang Emisi Gas Rumah Kaca di Lahan Padi sebagai wujud komitmen terhadap pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

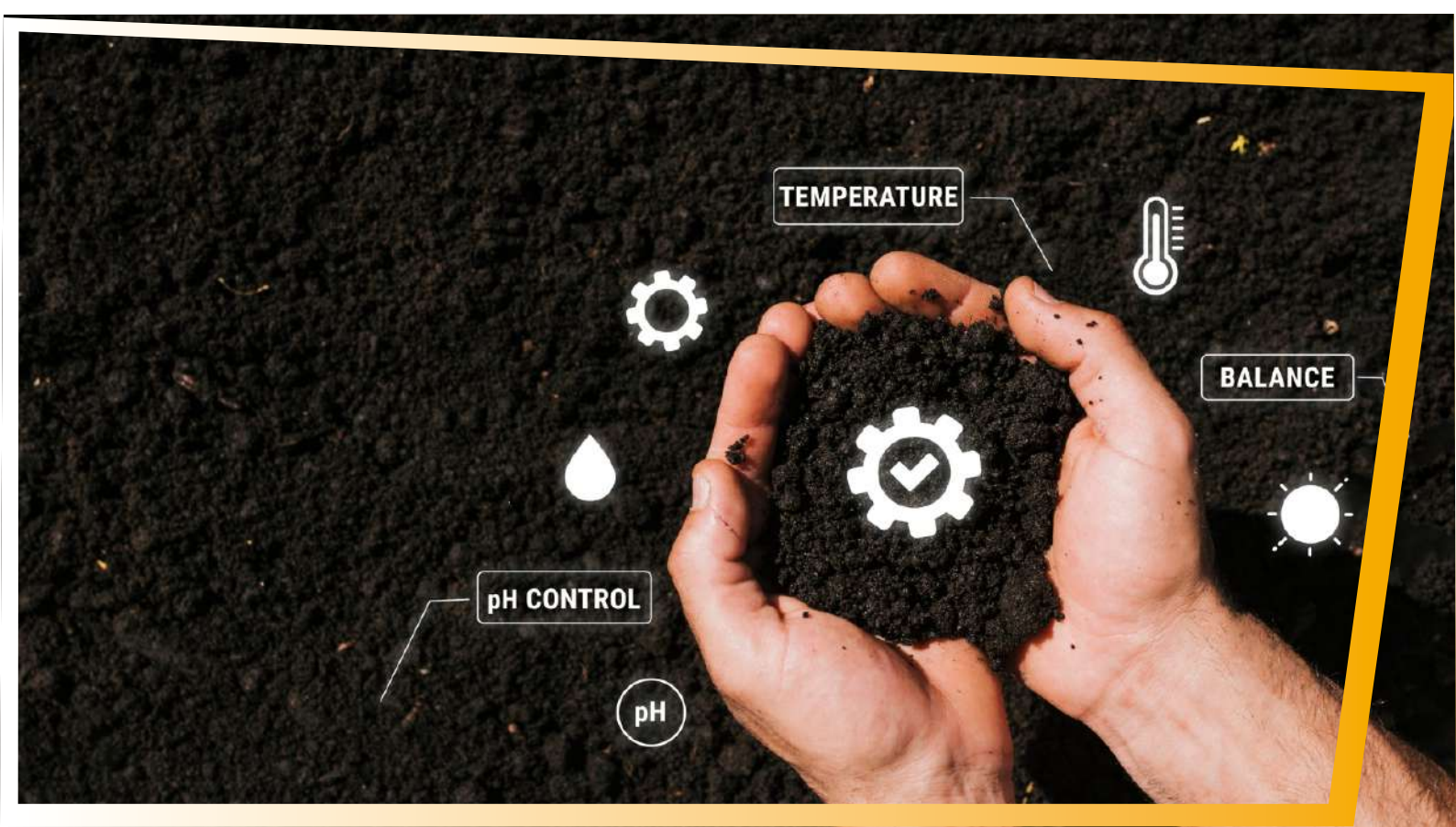
Penerapan SNI ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah. Hasilnya, produk pertanian nasional semakin memenuhi standar mutu *global*, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung transformasi menuju pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan.

Produksi Benih Sumber Bersertifikat dan Penguatan Sistem Perbenihan Nasional

Ketersediaan benih sumber unggul bersertifikat menjadi faktor utama peningkatan produktivitas pertanian, dengan kontribusi 20–30% terhadap hasil panen. Oleh karena itu, penguatan sistem produksi benih menjadi prioritas Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Pada 2024–2025, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) memproduksi 1.088,31 ton benih sumber padi dan 190,98 ton benih sumber jagung untuk memperkuat pasokan benih unggul nasional dan mendukung ketahanan pangan.

Produksi benih dilakukan dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis *ISO 9001:2015* yang menjamin keterlacakan, konsistensi mutu, dan efisiensi melalui pendekatan PDCA. Penerapan tujuh prinsip mutu, mulai dari fokus pelanggan hingga pengambilan keputusan berbasis data, memastikan seluruh proses produksi, penanganan, penyimpanan, dan distribusi benih memenuhi standar mutu tinggi.



“

Kami bersikap tegas untuk tidak membiarkan impor bibit dan benih masuk ke Indonesia. Ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan pangan dan mendorong penggunaan benih lokal yang unggul.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI



2.4. Kinerja Tata Kelola Birokrasi

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital dan berdampak, Kementerian PANRB melalui Permenpan RB No. 3 Tahun 2023 menetapkan dua fokus reformasi, yaitu RB General untuk penyederhanaan indikator birokrasi dan RB Tematik yang menitikberatkan pada enam tema prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas Presiden. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan No. 22 Tahun 2023, memetakan 26 indikator RB General, dan melaksanakan empat tema RB Tematik melalui program dan kegiatan di seluruh unit kerja.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementan pada 2020–2024 menunjukkan tren positif. Nilai indeks RB Kementan meningkat signifikan, dari 79,64 (BB) pada 2023 menjadi 85,12 (A-) pada 2024, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.50. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Evaluasi RB 2024 mencatat bahwa seluruh kegiatan utama *roadmap* RB Nasional telah ditetapkan, indikator kegiatan dikawal dengan target realistis, rencana aksi divalidasi, dan sebagian besar indikator telah relevan untuk mengukur keberhasilan.

Pada 2025, Pemerintah melalui Kementerian PANRB sedang menyusun *Grand Design* dan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045/2025–2029. Dalam masa transisi, Menteri PAN RB mengeluarkan surat edaran untuk memberikan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi. RB Tematik periode 2025–2029 diarahkan menyelesaikan akar masalah tata kelola di sektor prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, kualitas layanan kesehatan, serta pendidikan.

Program strategis Kementan telah selaras dengan prioritas Presiden, khususnya swasembada pangan dan pengurangan kerawanan pangan. Kegiatan percepatan yang ditetapkan antara lain optimalisasi lahan rawa, pembentukan Brigade Pangan, cetak sawah rakyat, serta peningkatan luas tanam padi pada lahan kering dan reguler. Pemantauan dan evaluasi realisasi kegiatan dilakukan ketat untuk memastikan seluruh kendala terselesaikan tepat sasaran, sekaligus menunjukkan komitmen pimpinan terhadap reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Sekarang ini kita terapkan **meritokrasi**.

Bapak Ibu mendapatkan posisi karena memang layak di situ. Jadi, harus kerja dengan baik karena akan aku evaluasi terus.

Tolong bekerja dengan baik, tidak usah cari keluarganya yang pejabat. Yang nitip-nitip, beri teguran. Kalau kamu mencintai jabatanmu dan mencintai keluargamu, **maka kerja dengan baik**.

ANDI AMRAN SULAIMAN
MENTERI PERTANIAN

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id

2.4.2. Opini Laporan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pertanian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan 2006, mencakup seluruh elemen laporan keuangan utama hingga 31 Desember 2024. Pemeriksaan menilai kewajaran penyajian laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian *intern*, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasilnya, Kementerian Pertanian kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkat dari Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2023, sebagai bukti efektivitas perbaikan tata kelola, tindak lanjut rekomendasi BPK, dan penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan.

Meskipun demikian, BPK menemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian intern, antara lain pengelolaan penerimaan kerja sama yang belum optimal, pelaksanaan belanja barang yang tidak sesuai ketentuan, serta pengamanan dan pemanfaatan persediaan yang belum maksimal. BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antarunit, peningkatan efektivitas pengawasan internal, serta pemeriksaan lanjutan dan penertiban atas belanja dan persediaan. Kementerian Pertanian berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sistematis untuk memperkuat *good governance*, akuntabilitas keuangan, dan kepercayaan publik.

Capaian opini WTP ini tidak hanya mencerminkan peningkatan pengelolaan keuangan, tetapi juga menegaskan kredibilitas dan integritas Kementerian Pertanian. Hasil pemeriksaan BPK menjadi sarana pembelajaran untuk memperbaiki kelemahan tersisa, memperkuat pengendalian intern, dan memastikan penggunaan anggaran negara yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dengan konsistensi tata kelola yang transparan dan akuntabel, Kementerian Pertanian diharapkan terus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional secara berkelanjutan.





2.4.3. Survei Penilaian Integritas KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen KPK untuk mengukur risiko korupsi dan kualitas integritas instansi pemerintah berdasarkan penilaian dari pegawai internal, pengguna layanan eksternal, serta para ahli. Nilai integritas dihitung pada skala 1–100, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan sistem antikorupsi yang lebih baik. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan skor SPI menjadi 74,46, naik 7,68 poin dari tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan persepsi dari responden ahli dan eksternal serta penurunan faktor koreksi, menandakan peningkatan integritas dan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan Kementan.

Penilaian Integritas 2024

Jakarta, 22 Januari 2025



Gambar 2.51. SPI Pertanian Naik, Mentan Jadi Pembicara di KPK

Survei
Penilaian
Integritas



**Indeks SPI
Kementan
Meningkat**

74,46





Gambar 2.52. Nilai Survei Penilaian Integritas Terhadap Kementerian Pertanian oleh KPK RI Tahun 2021 s.d. 2024

Grafik menunjukkan peningkatan skor SPI Kementerian Pertanian dari 66,79 (2023) menjadi 74,46 (2024). Kenaikan ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam tata kelola birokrasi, pengawasan internal, dan integritas ASN. Hal ini juga menunjukkan bahwa reformasi dan pembenahan pasca kasus korupsi berhasil memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat sistem integritas di lingkungan Kementan.



Gambar 2.53 Koordinasi Survei Penilaian Integritas SPI Kementerian Pertanian oleh KPK

Peningkatan skor SPI mencerminkan transformasi menyeluruh Kementerian Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan, meningkatkan produktivitas, dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya komitmen terhadap birokrasi yang bersih, efisien, dan bebas konflik kepentingan.

2.4.4. Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Pertanian berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan sistem keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi kebijakan ini dijalankan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terbentuk secara berjenjang hingga unit pelaksana teknis di daerah, guna memastikan akses informasi publik yang cepat, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam kurun waktu 2020–2024, Kementerian Pertanian secara konsisten meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP), yang menandakan tingkat kepatuhan tertinggi terhadap keterbukaan informasi publik di antara kementerian/lembaga. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tahunan oleh KIP dengan indikator penilaian mencakup ketersediaan dan pengumuman informasi publik, pengembangan *website*, penyediaan data pengadaan barang/jasa, serta penguatan kelembagaan PPID.



Gambar 2.54. Kementerian Pertanian Memperoleh Predikat "Informatif "

Selain mengikuti monitoring dan evaluasi nasional oleh KIP, sejak tahun 2013 Kementerian Pertanian juga melaksanakan evaluasi internal keterbukaan informasi publik untuk menyamakan standar layanan di seluruh PPID pelaksana. Penilaian dilakukan melalui instrumen *self-assessment questionnaire* (SAQ), evaluasi *website*, validasi standar layanan, serta penilaian inovasi dan kepemimpinan dalam pengelolaan informasi.



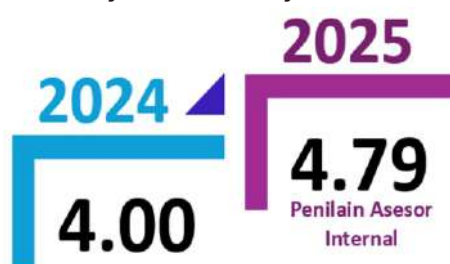
Gambar 2.55. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian terus memperluas inovasi pelayanan informasi publik melalui berbagai saluran komunikasi langsung, media massa, dan *platform* digital. Portal PPID Kementan kini terintegrasi dengan lebih dari 120 PPID pelaksana di seluruh Indonesia, yang memungkinkan pengelolaan permohonan informasi secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya ini memperkuat posisi Kementerian Pertanian sebagai salah satu badan publik paling informatif di tingkat nasional, sekaligus menjadi contoh penerapan tata kelola birokrasi yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.4.5. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai kerangka kerja tata kelola dan manajemen SPBE. Penerapan SPBE di Kementerian Pertanian bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal, kualitas pelayanan publik, pemanfaatan TIK, integrasi data antar unit kerja maupun lintas instansi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan akuntabel.

Tingkat kematangan SPBE diukur melalui model lima tingkatan yang mencerminkan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE. Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024, dengan nilai Indeks SPBE dihitung secara *agregat* dari seluruh indikator. Struktur penilaian ini mencakup bobot prioritas dan kepentingan tiap indikator, sehingga semakin tinggi tingkat kematangan menunjukkan semakin baik kapabilitas SPBE instansi. Capaian Indeks SPBE Kementan dari 2024 hingga 2025 menunjukkan kemajuan berkelanjutan.



Gambar 2.56. Indeks SPBE Kementan 2024-2025



Pada 2025, tingkat kematangan SPBE Kementan mencapai predikat Memuaskan dengan Indeks 4,79. Sebagian besar domain dan aspek SPBE menunjukkan efektivitas implementasi, meskipun beberapa aspek, seperti Pelaksanaan Audit TIK, masih memerlukan perbaikan dan pemantauan lebih lanjut.

Tabel 2.7. Capaian Indeks SPBE Kementan 2024-2025

Tahun	2024	2025 *)
Indeks SPBE	4.00	4.79
Predikat SPBE	Sangat Baik	Memuaskan
Domain Kebijakan SPBE	4.30	5.00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4.30	5.00
Domain Tata Kelola SPBE	3.50	4.80
Perencanaan Strategis SPBE	3.00	5.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.75	4.50
Penyelenggara SPBE	4.00	5.00
Domain Manajemen SPBE	2.64	4.18
Penerapan Manajemen SPBE	2.50	4.63
Pelaksanaan Audit TIK	3.00	3.00
Domain Layanan SPBE	4.69	4.94
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.60	4.90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.83	5.00

Ket: *) Penilaian Asesor Internal

Hasil penilaian asesor internal telah disubmit ke aplikasi <https://tauval.spbe.go.id> pada Agustus 2025. Saat ini, Kementan masih menunggu hasil final dari penilaian Tim Asesor Eksternal Kementerian PANRB untuk memperoleh konfirmasi indeks SPBE resmi. Peningkatan berkelanjutan dalam SPBE diharapkan mendukung digitalisasi tata kelola, efisiensi layanan, dan integrasi data di seluruh unit kerja Kementan.

2.4.6. Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pangan

Sektor pangan merupakan pilar utama ketahanan nasional yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam produksi, logistik, dan distribusi pangan, sektor ini menjadi semakin bergantung pada sistem elektronik yang rentan terhadap gangguan dan serangan siber. Oleh karena itu, pelindungan terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sektor pangan menjadi prioritas nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan IIV serta kebijakan keamanan siber nasional yang ditetapkan oleh BSSN. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas pelindungan IIV sektor pangan bersama Badan Pangan Nasional melalui koordinasi Pusdatin Pertanian dan Pusdatin Badan Pangan Nasional.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Pelindungan IIV Sektor Pangan dan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 164/Kpts./OT.050/M/03/2025 dan Nomor 662/Kpts./HK.150/M/08/2025. Hingga tahun 2025, kolaborasi tersebut berhasil mengidentifikasi empat sistem elektronik sektor pangan yang berstatus IIV dan akan segera ditetapkan secara resmi. Upaya ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kedaulatan pangan dan keamanan nasional melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penerapan kebijakan keamanan siber yang adaptif, serta sinergi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh, aman, dan berdaya saing di era digital.



2.4.7. Satu Data Pertanian

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) menetapkan kebijakan nasional untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) mengimplementasikan kebijakan ini melalui program Satu Data Pertanian (SDP) yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), berlandaskan Permentan No. 40/2021, Permentan No. 33/2023, dan Kepmentan No. 756/2020. Melalui SDP, Kementan memastikan setiap data pertanian memiliki standar dan metadata seragam, sistem interoperabel dengan portal nasional seperti data.go.id, serta proses verifikasi berjenjang dari kabupaten hingga pusat, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.

Pelaksanaan Satu Data Pertanian dilakukan secara sinergis dengan Bappenas dan BPS untuk menyusun indikator standar, mengintegrasikan data ke portal nasional, serta mengembangkan *dashboard* analisis pembangunan pertanian. Hingga 2025, capaian nyata meliputi integrasi data ke data.go.id, keseragaman data antar lembaga, peningkatan transparansi publik, dan pengembangan data spasial serta statistik pertanian untuk kebijakan berbasis bukti. Implementasi ini memperkuat fondasi kebijakan berbasis data, mendukung kualitas perencanaan, serta memastikan setiap keputusan strategis di sektor pertanian didukung data yang valid, seragam, dan dapat diakses publik, dengan komitmen untuk terus memperluas jangkauan hingga tingkat daerah.

2.4.8. Online Single Submission (OSS)

Arahan Presiden pada Sarasehan Ekonomi 8 April 2025 menekankan pentingnya kemudahan berusaha, perlindungan investasi nasional secara realistis, serta deregulasi yang adaptif untuk menjaga daya saing ekonomi. Sejalan dengan RPJMN 2025–2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025), deregulasi perizinan dan reformasi birokrasi menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah memperkuat penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang menegaskan penyederhanaan proses perizinan, penataan regulasi, dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam sektor pertanian, terdapat 108 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan pembagian kewenangan yang jelas antar subsektor, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan akuntabel. Proses perizinan dilakukan sepenuhnya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Pertanian seperti Simpel1, Simpol, dan SisnasNKV untuk memastikan verifikasi administratif dan teknis secara digital.

Selama tahun 2024–2025, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 492 izin Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian, terdiri dari 265 izin pada tahun 2024 dan 227 izin hingga September 2025. Melalui sistem perizinan berbasis risiko yang terhubung dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), layanan perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan daya saing investasi di sektor pertanian.



Gambar 2.57. Padu Satu – Pusat PVTTP dalam memberikan layanan Perizinan Berusaha





“

Terima kasih kepada semua unsur, terima kasih Menteri Pertanian dan semua jajarannya, semua *stakeholder*, semua unsur saya ucapkan terima kasih juga pemerintah-pemerintah daerah para gubernur, bupati, pemimpin-pemimpin di daerah, kelompok tani.

Presiden RI
Prabowo Subianto

Tidak hanya itu, Mentan Amran membawa kabar gembira bagi para petani jagung. Mentan Amran sebut **pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menyerap 1 juta ton jagung dengan harga**

Rp5.500 per kilogram ✓

langsung dari petani di seluruh Indonesia.



BAB III

Kebijakan Terobosan

Pembangunan Pertanian 2024 - 2025

 @kementerianpertanian

3.1. Restrukturisasi Kementerian Pertanian

Upaya memperkuat peran kelembagaan dalam pembangunan pertanian menuntut adanya proses dinamisasi yang berkelanjutan. Dinamisasi kelembagaan bukan hanya dimaknai sebagai perubahan struktur semata, tetapi sebagai proses strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kapasitas organisasi agar lebih proporsional dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian diarahkan pada pembentukan organisasi yang tepat/kaya fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, selaras dengan arah dan prioritas pembangunan nasional dan berdasarkan meritokrasi birokrasi yang tepat.

Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan berorientasi pada kinerja. Melalui sistem ini, jabatan dan tanggung jawab diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi, prestasi, serta integritas tinggi, bukan berdasarkan kedekatan personal atau faktor *non*-profesional lainnya. Prinsip meritokrasi menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap pegawai dapat mencapai posisi tertentu melalui kemampuan dan dedikasi kerja, sehingga memotivasi seluruh aparatur untuk terus berprestasi dan berkontribusi secara optimal.



Gambar 3.1. Pelantikan Pejabat Struktural berdasarkan Sistem Meritokrasi

Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, penerapan meritokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian diarahkan untuk membangun budaya kerja yang transparan, disiplin, dan berorientasi hasil. Setiap pejabat dituntut menunjukkan kinerja terbaik, bukan hanya untuk memenuhi target administratif, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas publik. Dalam sistem ini, evaluasi menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat, dengan tanggung jawab yang dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab.



Selain kompetensi, integritas menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Sikap tegas terhadap pelanggaran bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan lembaga. Budaya saling mengingatkan dan melaporkan pelanggaran menjadi bagian dari sistem pengawasan yang sehat dan berorientasi pada perbaikan bersama.

Sebagai landasan normatif, Kementerian Pertanian telah memiliki perangkat hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Kedua regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam penyederhanaan struktur organisasi sehingga lebih efisien, terarah, dan mampu mengakomodasi tugas serta fungsi yang semakin kompleks seiring perkembangan kebijakan pertanian nasional. Proses *re-designing* organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan postur kelembagaan yang proporsional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

3.2. Refocusing dan Efisiensi Anggaran

Refocusing anggaran di sektor pertanian dilakukan dengan prinsip efisiensi dan orientasi pada dampak langsung, mengalihkan dana dari kegiatan pendukung seperti rapat dan perjalanan dinas ke sektor produksi yang lebih produktif. Dana kini difokuskan untuk penyediaan benih, pupuk, alat mesin pertanian, perluasan lahan, dan penguatan logistik pangan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional tercermin melalui kebijakan *refocusing* anggaran pada akhir tahun 2023, dengan alokasi sekitar Rp1 triliun untuk mendukung *Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Tanam*. Kebijakan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan produksi padi dan jagung, dua komoditas utama yang menjadi penopang pangan nasional di tengah ancaman krisis global dan dampak perubahan iklim akibat El-Nino.

Realisasi anggaran

KEMENTAN 2025

per jenis belanja: 20 Oktober 2025



Pegawai: 79,03%

Pagu:

Rp1.712.147.273.000

Realisasi:

Rp1.353.193.531.319

Sisa Pagu:

Rp358.953.741.681



Barang: 29,45%

Pagu:

Rp29.655.038.137.000

Realisasi:

Rp8.733.613.634.944

Sisa Pagu:

Rp20.921.424.502.056



Modal: 26,28%

Pagu:

Rp450.350.440.000

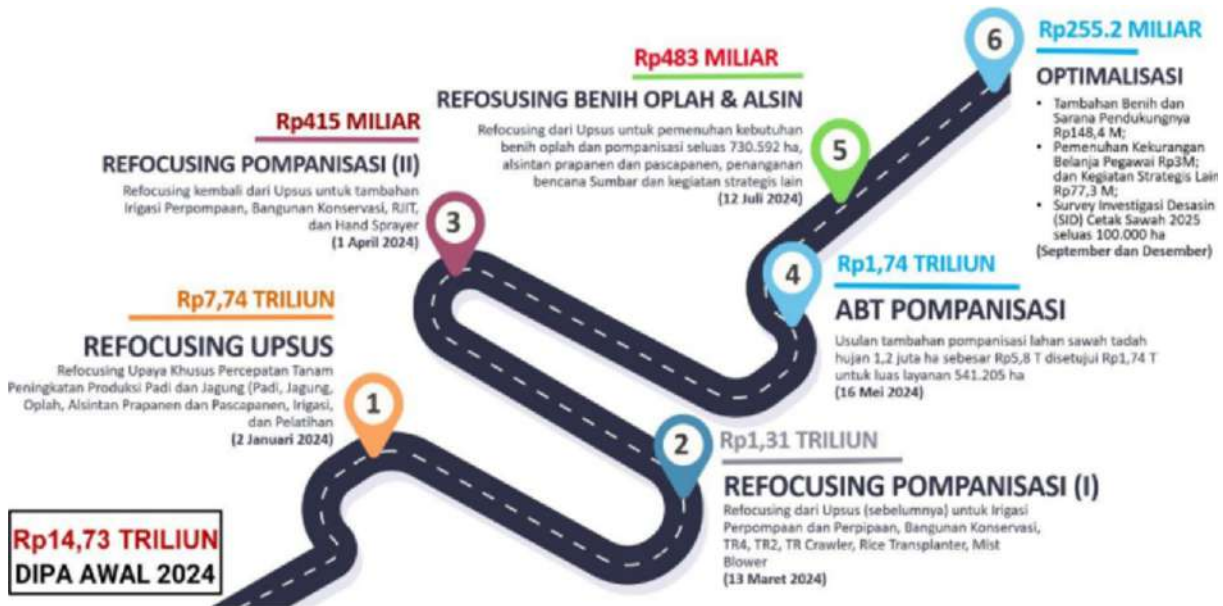
Realisasi:

Rp118.359.681.642

Sisa Pagu:

Rp331.990.758358

Program ini dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai unit kerja strategis di Kementerian Pertanian. Setiap unit memiliki peran saling melengkapi dalam mendorong percepatan produksi, mulai dari perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan rawa, hingga penerapan mekanisasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Sinergi antar unit ini menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan tidak berjalan parsial, melainkan berorientasi pada hasil yang nyata di lapangan. Melalui kebijakan yang fokus, anggaran yang tepat sasaran, dan kolaborasi lintas unit yang solid, sektor pertanian diharapkan mampu menghadirkan ketahanan pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 3.2. Proses Refocusing Anggaran 2024

Refocusing anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 dilakukan melalui optimalisasi anggaran internal, pergeseran anggaran antar Eselon I, dan tidak mengubah total anggaran per program sehingga tidak memerlukan mekanisme persetujuan Komisi IV DPR RI selaku mitra Kementerian Pertanian, dengan seluruh proses usulan revisi telah dilaksanakan dan DIPA revisi secara menyeluruh telah terbit pada awal Januari 2024. Pendekatan ini mencerminkan optimalisasi anggaran berdasarkan kinerja yang semakin matang. Hasilnya terlihat nyata, seperti penurunan tajam impor beras dan perubahan status Gorontalo dari defisit menjadi surplus ekspor jagung pada 2024. Ini membuktikan bahwa dengan dukungan fiskal yang tepat sasaran, Indonesia dapat bertransformasi dari negara pengimpor menjadi pengekspor komoditas pangan strategis.

Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian menempuh langkah strategis melalui reprioritasi dan restrukturisasi program serta anggaran. Langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya benar-benar berfokus pada tujuan utama: mempercepat terwujudnya swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Reprioritasi juga mencakup penetapan skala prioritas yang lebih terukur, dengan menempatkan program yang memberikan hasil langsung terhadap peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani sebagai fokus utama. Dalam konteks ini, restrukturisasi anggaran menjadi instrumen penting untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan, program, dan hasil yang dicapai di lapangan dan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi.



Tabel 3.1. *Refocusing* Anggaran

No	Kegiatan Strategis	Volume	Anggaran (Rp000)
1.	Pengembangan Padi Reguler	995.000 ha	5.441.407.053
2.	Pengembangan Padi Non Rawa: Benih dan Pupuk, Alsintan Prapanen, Alsintan Pascapanen, Irigasi Pertanian, dan Asuransi Pertanian	625.000 ha	1.476.178.000
3.	Tambahan Pengembangan Padi melalui Optimasi Lahan Rawa: Penyiapan Lahan, Pupuk dan Pestisida, Alsintan Prapanen	400.000 ha	3.143.055.981
4.	Pengembangan Jagung : Benih dan Saprodi	2.000.000 ha	2.195.455.000
5.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani, Penyuluh, dan Penerap Standar Instrumen Pertanian	4 paket	105.000.000
	Total Refocusing		7.741.862.053

Realokasi kegiatan dan anggaran pompanisasi bersumber dari *refocusing* anggaran Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi TA 2024 sebesar Rp7,74 triliun. Penggunaan kegiatan dan anggaran memperhatikan tingkat urgensi dan kepentingan serta ketersediaan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA 2024. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan *refocusing* mencapai Rp1,31 triliun. Dana tersebut berasal dari dua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, yakni Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang masing-masing menyumbang porsi anggaran guna mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan produksi padi.

Pergeseran anggaran antar Eselon I tidak memerlukan Persetujuan Komisi IV DPR RI selaku mitra Kementerian Pertanian karena pergeseran anggaran berada dalam satu program yang sama yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Kegiatan pompanisasi dilaksanakan secara menyeluruh dilaksanakan oleh Ditjen PSP, dan proses usulan revisi selesai dilaksanakan setelah terbitnya DIPA revisi tanggal 19 Maret 2024. Tahun anggaran 2024 menjadi momen krusial bagi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menerapkan prinsip efisiensi secara menyeluruh, menyusul kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi dan penyesuaian belanja negara. Kementan melakukan reprioritasi anggaran secara sistematis dengan tetap menjaga keberlangsungan program strategis nasional di bidang pertanian. Kebijakan ini bukan sekadar pemangkasan administratif, melainkan reposisi strategis untuk menjawab pertanyaan besar dalam upaya menjamin kedaulatan pangan dengan sumber daya minimal.





Hasil Optimal bisa tetap kami capai dengan anggaran yang terbatas.

Permasalahan anggaran tidak menjadi penghambat dan apapun situasinya yang utama adalah swasembada tercapai.



3.3. Reformulasi Pupuk Bersubsidi (Transformasi Tata Kelola Pupuk dan Langkah Nyata Peningkatan Produksi Pertanian)

Pupuk bersubsidi merupakan denyut nadi produktivitas pertanian nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau, tepat waktu, dan tepat sasaran. Namun, seiring perkembangan zaman dan tantangan baru sektor pertanian, sistem tata kelola yang selama ini berjalan perlu diperbaharui agar lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Reformasi kebijakan pupuk bersubsidi yang dilakukan selama tahun 2024–2025 menjadi bagian dari terobosan besar pembangunan pertanian nasional, yang menempatkan efisiensi, akurasi data, dan transformasi digital sebagai landasan utama.

1). Fondasi Perubahan dan Penyempurnaan Sistem

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian memulai langkah awal reformasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024, yang merevisi kebijakan sebelumnya tentang tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Kebijakan ini menghadirkan sejumlah penyempurnaan penting, seperti:

- Penambahan pupuk organik sebagai jenis baru pupuk bersubsidi, sejalan dengan arah pembangunan pertanian berkelanjutan dan pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia.
- Evaluasi e-RDKK setiap empat bulan untuk memastikan keakuratan data petani penerima subsidi sesuai kondisi aktual di lapangan.
- Simplifikasi alokasi subsidi dengan fokus per jenis pupuk dan provinsi, menggantikan sistem lama yang kaku per bulan.
- Pertimbangan berbasis luas baku sawah dan LP2B sebagai dasar perencanaan yang lebih adil dan berorientasi pada keberlanjutan lahan pangan.
- Penyempurnaan mekanisme penebusan pupuk melalui sistem *iPubers*, disertai fleksibilitas bagi kelompok tani yang menghadapi kendala usia, kesehatan, atau perubahan penggarap.



Gambar 3.3. Penyederhanaan Regulasi Pupuk Bersubsidi

Sebelum adanya kebijakan baru, sistem subsidi pupuk di Indonesia diatur oleh ratusan regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Tercatat lebih dari 140 aturan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Aturan tersebut tersebar di banyak kementerian seperti Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta BUMN, termasuk sejumlah kementerian teknis lainnya.

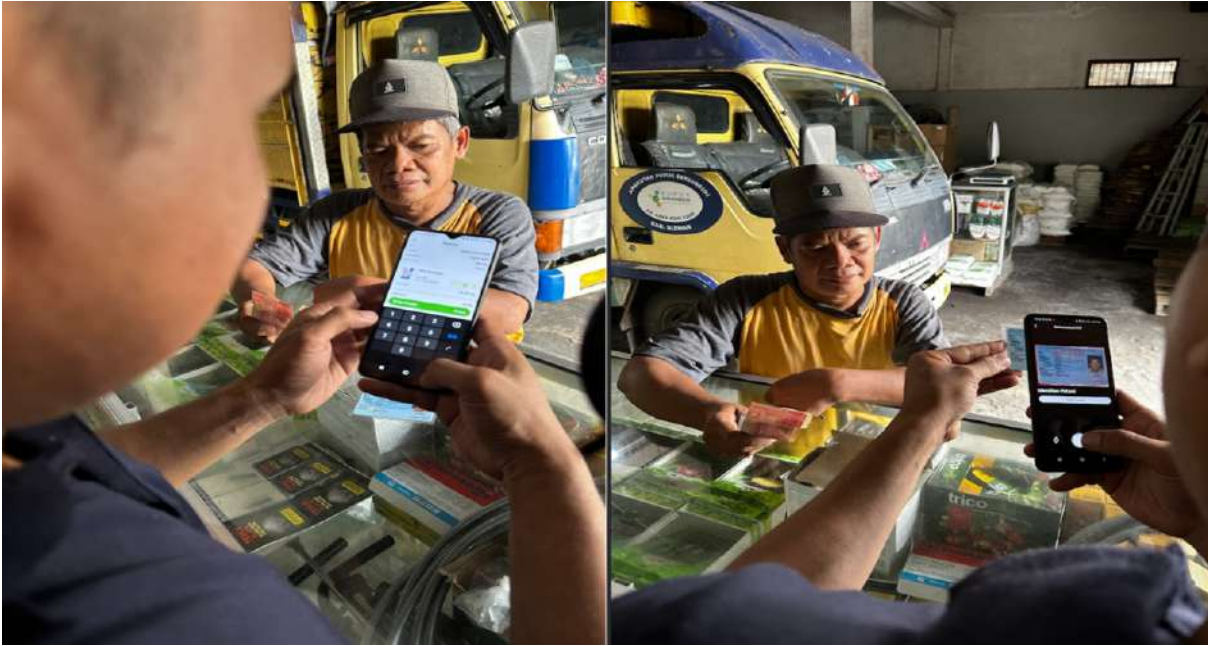
Banyaknya regulasi yang tumpang tindih menyebabkan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menjadi panjang, rumit, dan kurang efisien. Kondisi ini sering membuat petani kesulitan memperoleh pupuk tepat waktu, terutama saat memasuki musim tanam. Hanya perlu terobosan yang berani dengan penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

2) Era Transformasi Digital dan Integrasi Data

Memasuki tahun 2025, reformasi tata kelola pupuk bersubsidi memasuki babak baru dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini menjadi tonggak utama transformasi sistem distribusi pupuk nasional, dari pendekatan administratif manual menuju sistem digital terintegrasi dan berbasis data elektronik.

Peraturan ini kemudian dijabarkan melalui Permentan Nomor 15 Tahun 2025, yang memperkuat prinsip ketepatan sasaran dengan memanfaatkan e-RDKK sebagai basis tunggal perencanaan dan penetapan kebutuhan pupuk. Kebijakan baru ini juga memperluas komoditas penerima manfaat, dengan memasukkan ubi kayu sebagai komoditas strategis yang turut menerima dukungan subsidi.





Gambar 3.4. Penebusan Pupuk Bersubsidi

Perubahan paling signifikan terjadi pada struktur penyaluran. Kini, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) memegang tanggung jawab penuh atas distribusi pupuk bersubsidi hingga ke titik serah terakhir seperti pengecer, koperasi, dan gapoktan. Model baru ini menggantikan sistem lama yang terfragmentasi dan rawan keterlambatan, sekaligus memperkuat rantai pasok yang lebih efisien dan akuntabel. Sebagai langkah awal penerapan, pemerintah bersama PIHC telah melaksanakan program uji coba (*piloting*) di berbagai daerah. Hingga pertengahan 2025, sebanyak 290 gapoktan, 29 poktan, dan 406 koperasi telah menjadi bagian dari implementasi sistem distribusi baru ini. Penguatan sinergi juga dilakukan bersama BPPSDMP dan Kemenkop untuk memperluas jaringan penyalur berbasis kelembagaan petani.

3) Kembalinya Pupuk ZA sebagai Strategi Pemulihan Produktivitas Tebu

Tahun 2025 juga menandai langkah korektif strategis dengan penambahan kembali pupuk ZA dalam skema subsidi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/SR.310/M/09/2025, sebanyak 93.106 ton pupuk ZA dialokasikan dengan HET Rp1.700/kg, yang mulai dapat ditebus petani sejak 5 September 2025. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kajian teknis yang menunjukkan bahwa ketiadaan pupuk ZA sejak 2022 berkontribusi terhadap penurunan produktivitas tebu hingga 7%. Dengan dikembalikannya pupuk ini, pemerintah menegaskan dukungannya terhadap peningkatan produktivitas tebu rakyat serta pencapaian swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.

4) Arah Baru Pupuk Bersubsidi: Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan

Transformasi tata kelola pupuk bersubsidi tahun 2025 mencerminkan semangat baru pembangunan pertanian Indonesia, dari subsidi konvensional menuju sistem yang berbasis data, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Melalui penerapan prinsip “7 Tepat”: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, harga, dan sasaran, pemerintah memastikan bahwa setiap kilogram pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak. Ke depan, integrasi data antara Kementerian Pertanian, PIHC, Himbara, dan Dukcapil akan menjadi pilar utama dalam digitalisasi sistem subsidi nasional. Transformasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan dan



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Komitmen Pemerintah Mendukung Petani

Dengan akses pupuk ZA subsidi, kita harapkan produktivitas tebu meningkat dan target swasembada gula nasional bisa tercapai lebih cepat. Ketahanan pangan harus dibangun dari bawah, dari petani

Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id



efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi pengungkit peningkatan produksi pertanian nasional secara berkelanjutan. Dengan reformasi kebijakan yang berani dan terukur, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun tata kelola pupuk yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan petani, sebagai wujud nyata terobosan pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan Indonesia.

3.4. Pengalihan Penyuluh ASN Daerah ke Kementerian Pertanian

Sebagai langkah strategis dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian. Melalui kebijakan ini, Presiden menegaskan pentingnya penataan kelembagaan penyuluhan dengan mengalihkan status Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian. Pengalihan tersebut diharapkan selesai paling lambat satu tahun sejak instruksi diberlakukan, dan menjadi tonggak baru bagi penyatuan sistem pembinaan penyuluhan pertanian secara nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja penyuluh pertanian dalam mendukung swasembada pangan dalam waktu singkat, penyuluh pertanian perlu diambil alih pemerintah pusat. Penyuluh adalah ujung tombak dalam pendampingan petani, idealnya satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini satu orang penyuluh masih membina lebih dari satu desa, karena itu, Presiden Prabowo telah menyetujui kewenangan penyuluh ditarik ke pusat.



Gambar 3.5. Menteri Pertanian Bersama Penyuluh

Untuk mencapai target satu desa satu penyuluh, Indonesia membutuhkan total 83 ribu penyuluh pertanian. Dengan jumlah penyuluh saat ini yang baru mencapai 38 ribu, terdapat kekurangan sekitar 45 ribu penyuluh. Kekurangan ini menjadi salah satu hambatan untuk mendorong swasembada pangan. Diharapkan dengan kewenangan penyuluh berada di pusat, komando akan lebih mudah sehingga percepatan program bisa tercapai. Pemindahan kewenangan ini juga dinilai strategis untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan yang optimal dari penyuluh, terutama dalam penggunaan pupuk, teknologi, dan teknik bertani yang lebih efisien.



Progres Pengalihan Penyuluh Pertanian ASN akan dilakukan melalui 3 tahap, terdiri dari:

- a. *Batch I*: Agustus 2025, sebanyak 30.323 orang PNS dan PPPK JF Penyuluh Pertanian hasil konfirmasi, SK pengalihan menunggu tanda tangan;
- b. *Batch II*: minggu II September 2025, sebanyak 4.402 orang dari data belum *clear* dari *Batch 1*, JF Pelaksana, *Flagging* dan JF Penyuluh tambahan;
- c. *Batch III*: minggu II Oktober 2025, sisa data penyuluh pertanian yang belum dialihkan terdiri dari: non JF penyuluh yang beralih ke JF Penyuluh Pertanian, PP tugas belajar, PP PNS yang menjalani hukuman disiplin, terkena pemblokiran data PNS, pemberhentian sementara dan PPPK tidak aktif, CPNS dan PPPK tahun perekrutan 2024.

3.5. Brigade Pangan

Brigade Pangan merupakan terobosan baru dalam pembangunan pertanian nasional yang menggabungkan inovasi teknologi, semangat kewirausahaan, dan kolaborasi lintas generasi. Program ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman — ketika lahan pertanian semakin terbatas, perubahan iklim makin ekstrem, dan kebutuhan pangan harus terus terpenuhi. Melalui Brigade Pangan, generasi muda tidak hanya diajak bertani, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama pertanian modern yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Brigade Pangan menjadi ruang bagi petani muda untuk belajar sekaligus berinovasi. Mereka diberi dukungan dalam bentuk alat dan mesin pertanian modern, pelatihan teknis, akses terhadap sarana produksi, serta pendampingan intensif. Tujuannya sederhana namun strategis: membangun pertanian berbasis teknologi yang berorientasi bisnis, tetapi tetap berakar pada semangat gotong royong dan keberlanjutan lingkungan.



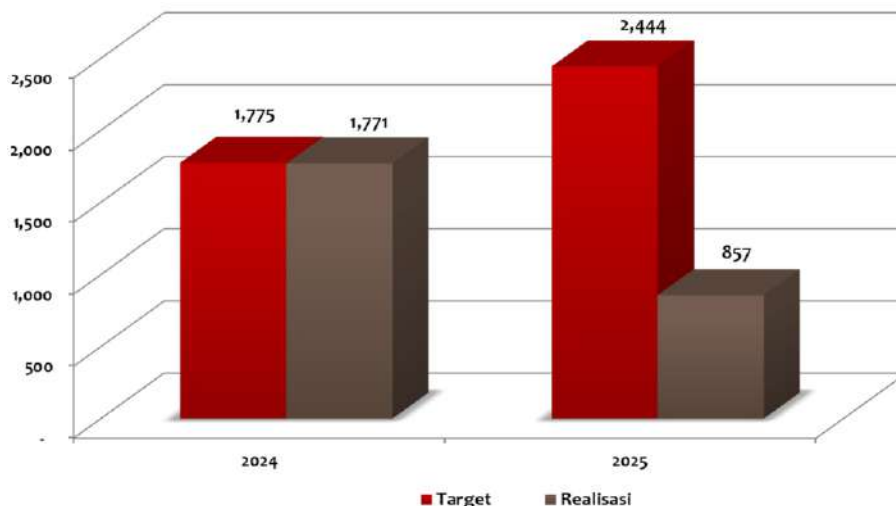
Gambar 3.6. Menteri Pertanian bersama Brigade Pangan



Program ini juga menjadi simbol gerakan nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan. Dimulai sejak 2024, pelaksanaannya berfokus di kawasan lahan rawa potensial seperti di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan dukungan lahan mencapai puluhan ribu hektar. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian menggandeng berbagai mitra strategis seperti TNI, Polri, perguruan tinggi, dan kementerian lain untuk memperkuat infrastruktur dasar serta mendukung keberhasilan teknis di lapangan.

Peluncuran perdana Brigade Pangan dilakukan pada tahun 2024 di Kawasan tersebut menjadi percontohan bagi penerapan model pertanian terpadu yang menggabungkan aspek produksi, kelembagaan, dan teknologi. Dalam implementasinya, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, perguruan tinggi, dan kementerian terkait, guna memperkuat infrastruktur dasar serta memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Setiap unit Brigade Pangan terdiri dari 15 petani muda yang mengelola lahan hingga 200 hektar — mencakup lahan sawah, lahan rawa, maupun lahan baru hasil pencetakan sawah. Formasi ini melahirkan model pertanian kolektif yang efisien dan profesional. Melalui pendampingan penyuluh pertanian, para anggota Brigade Pangan dibimbing agar mampu menerapkan praktik usaha tani modern, produktif, dan berbasis data. Target Pembentukan Brigade Pangan tahun 2024 - 2025, dan realisasi s.d. September 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7. Target dan Realisasi Pembentukan Brigade Pangan





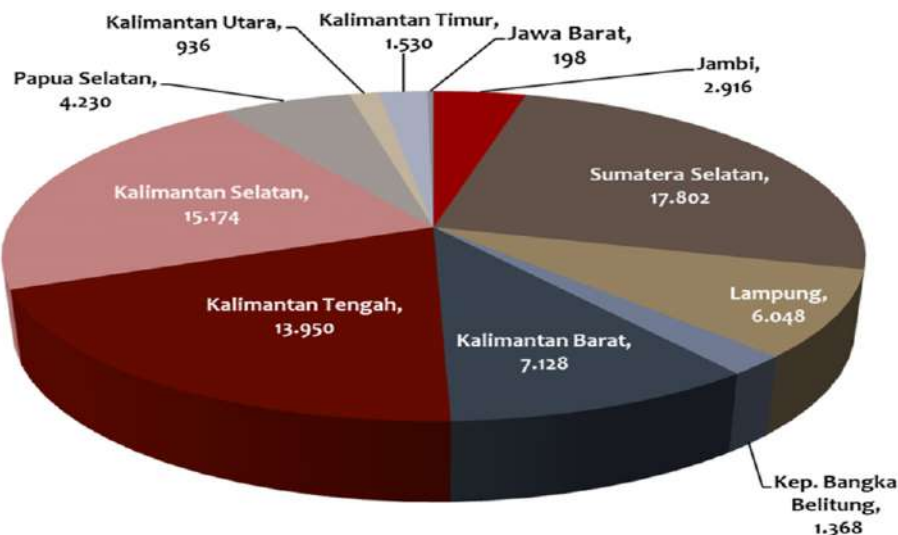
“

Brigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur sekitar 200 hektare per brigade. Program ini mencakup pengelolaan lahan rawa, pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih.”

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian

Untuk memperkuat kapasitas mereka, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) memberikan serangkaian pelatihan tematik, mulai dari pengoperasian alat mesin pertanian, manajemen usaha tani, literasi keuangan, analisis kelayakan usaha, hingga pengelolaan kelembagaan kelompok. Materi pelatihan ini tidak hanya menyiapkan peserta sebagai petani yang terampil, tetapi juga sebagai pengelola usaha pertanian yang visioner.



Gambar 3.8. Lokasi Sebaran Peserta Pelatihan Brigade Pangan Tahun 2025

Pada tahun 2025, BPPSDMP menargetkan pelatihan bagi lebih dari 71 ribu peserta yang tersebar di 12 provinsi. Jumlah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun generasi baru pelaku pertanian yang tidak hanya produktif di lahan, tetapi juga cerdas dalam mengelola usaha dan membangun jejaring pasar. Brigade Pangan bukan sekadar program, tetapi gerakan transformasi pertanian yang menanamkan keyakinan bahwa kemandirian pangan dapat dicapai jika generasi muda diberi ruang, dukungan, dan kepercayaan untuk memimpin perubahan di sektor pertanian Indonesia.

3.6. Pompanisasi

Program Pompanisasi merupakan salah satu terobosan penting dalam pembangunan pertanian yang dirancang untuk menjawab tantangan besar akibat perubahan iklim global. Ketika fenomena *El Niño* menurunkan curah hujan dan memicu kekeringan berkepanjangan, ketersediaan air menjadi faktor krusial yang menentukan keberlanjutan produksi pangan. Dalam kondisi demikian, pompanisasi hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat ketahanan air pertanian, khususnya di wilayah yang belum terjangkau sistem irigasi teknis.

Pompanisasi ini jadi sangat penting, selama ini petani hanya bisa menanam sekali setahun karena keterbatasan air, dengan adanya pompa air kini mereka bisa menambah jumlah masa tanamnya, bisa dua atau bahkan tiga kali setahun. Ini jelas membuka potensi besar bagi kemandirian pangan di Indonesia sekaligus memberikan peluang usaha baru bagi petani di desa-desa yang jauh dari kota.



Pompanisasi tidak sekadar penyediaan alat pompa air, tetapi merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses air irigasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air di sekitar lahan pertanian—seperti sungai, embung, dan danau. Melalui kebijakan ini, petani memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), mengurangi ketergantungan pada musim hujan, serta menjaga stabilitas produksi pangan sepanjang tahun.

Program pompanisasi memperlihatkan bagaimana pembangunan pertanian dapat berjalan secara inklusif: mendekatkan infrastruktur dasar kepada petani, memperluas kesempatan usaha tani, dan memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) menjadi pelaksana utama program ini. Ditjen PSP menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan mitra teknis, untuk memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran. Gambar 3.9 Irigasi Perpompaan.

Periode 2024–2025 menjadi fase penting bagi perluasan program pompanisasi. Pada tahun 2023, bantuan pompa air tercatat sebanyak 2.888 unit, meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 72.282 unit, dan hingga Oktober 2025 telah terdistribusi 9.768 unit ke 38 provinsi di seluruh Indonesia. Peningkatan ini mencerminkan respons cepat pemerintah terhadap dampak *El Niño*, sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.



Gambar 3.9. Irigasi Perpompaan

Pompa air didistribusikan ke lahan tadah hujan, kawasan dengan IP rendah, serta wilayah yang memiliki sumber air potensial namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan ketersediaan pompa, petani mampu menanam di luar musim, memperpanjang masa tanam, dan menjaga kontinuitas produksi meskipun di tengah keterbatasan air. Keberhasilan program ini juga ditopang oleh sinergi lintas sektor, salah satunya melalui kolaborasi dengan TNI yang berperan dalam distribusi dan pengamanan sarana pompa di wilayah-wilayah terpencil atau rawan konflik. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong lintas lembaga, bahwa pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.





Gambar 3.10. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Mengecek Penggunaan Pompa Air Bersama Dengan Satgas Pangan TNI Mendukung Program Pompanisasi Kementan

Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan masa tanam serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional, pada musim tanam kedua tahun 2025 (Mei 2025), Kementerian Pertanian meluncurkan program Pompanisasi dan Olah Lahan melaksanakan kegiatan mobilisasi pompa air dan alat mesin pertanian (alsintan) ke berbagai daerah yang telah memasuki musim tanam. Dukungan mobilisasi ini disediakan tanpa biaya (gratis), khususnya untuk petani di wilayah Pulau Jawa, dengan tujuan mempercepat proses tanam dan mengurangi risiko keterlambatan produksi akibat hambatan pengolahan lahan. Petani yang berminat untuk mendapatkan layanan ini dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui pemindaian kode QR yang tersedia pada media informasi resmi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, tim teknis akan melakukan mobilisasi peralatan ke lokasi yang telah memenuhi syarat.



Gambar 3.11. Pompanisasi Tenaga Listrik Jombang Jawa Timur dan Grobogan Jawa Tengah



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

HOTLINE
SERVICE

POMPANISASI & OLAH LAHAN

Dukungan Mobilisasi Pompa Air dan Alsintan
untuk Lokasi yang Masuk Musim Tanam



Segera pindai
kode QR berikut!

Untuk pertanyaan lebih lanjut
dapat menghubungi:



0852-1121-8544 (WA)

**BIAYA
GRATIS!**

Untuk mobilisasi
dan sewa alat,
terutama di Pulau
Jawa.

➔ **PENDAFTARAN** ✓ **VERIFIKASI** 🚚 **MOBILISASI** 🚜 **OLAH LAHAN**

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id



Hasil nyata dari upaya masif ini tidak perlu menunggu lama. Pada periode Januari hingga Maret 2025 saja, program pompanisasi berhasil menyumbang tambahan produksi padi sebesar 2,8 juta ton, terutama di Pulau Jawa. Capaian ini terasa istimewa karena terjadi justru di tengah tantangan *El Nino*, sebuah anomali yang mematahkan tren historis di mana kekeringan biasanya selalu berujung pada penurunan produksi. Ini membuktikan bahwa strategi mitigasi iklim yang tepat sasaran mampu mengubah tantangan menjadi kemenangan. Untuk lebih mengakselerasi pemanfaatan lahan, program ini diperluas dengan layanan Olah Lahan gratis di Pulau Jawa, di mana petani bisa mendapatkan dukungan mobilisasi alat mesin pertanian untuk mempercepat musim tanam. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui teknologi sederhana, namun tepat guna, mampu memberikan hasil signifikan dalam menjaga produktivitas di tengah ancaman iklim ekstrem.

Selain pengadaan pompa, program ini juga terintegrasi dengan kegiatan mobilisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta olah lahan yang digerakkan secara serentak di berbagai daerah. Pada musim tanam kedua tahun 2025, Kementerian Pertanian memfasilitasi layanan mobilisasi pompa air gratis, khususnya di wilayah Pulau Jawa, untuk mempercepat pengolahan lahan dan mencegah keterlambatan masa tanam. Layanan ini dapat diakses petani melalui sistem pendaftaran daring dan *hotline* khusus yang disiapkan pemerintah.

Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan pompanisasi bahkan menarik perhatian komunitas internasional. Negara seperti Jepang dan Malaysia menunjukkan minat besar untuk mempelajari dan mengadopsi sistem pompanisasi Indonesia sebagai model adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim. Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi berbasis lokal dapat menjadi *best practice global* dalam mewujudkan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.



(Sumber: Dokumentasi Ditjen PSP)

Gambar 3.12. Petani sedang melakukan mobilisasi pompa air bantuan Kementan



Secara keseluruhan, program pompanisasi telah membawa perubahan nyata bagi petani dan sistem produksi pangan nasional. Akses air yang lebih terjamin meningkatkan kepercayaan diri petani untuk menanam, memperluas lahan produktif, dan mempercepat rotasi musim tanam. Risiko gagal panen akibat kekeringan berkurang signifikan, sementara produksi pangan menjadi lebih stabil.

Ke depan, kebijakan pompanisasi perlu terus diperkuat melalui pengembangan teknologi digital, peningkatan kapasitas petani, serta integrasi dengan program kelembagaan dan pembiayaan pertanian. Dengan arah kebijakan yang konsisten, pompanisasi berpotensi menjadi pilar penting bagi tercapainya ketahanan pangan nasional sekaligus simbol kemandirian pertanian Indonesia di tengah tantangan iklim global.

3.7. Inisiasi Penetapan HPP Gabah

Dalam rangka mendukung tercapainya target swasembada pangan tahun 2025 sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, Menteri Pertanian berhasil menginisiasi penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru untuk gabah dan beras. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga di tingkat lapangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Melalui kebijakan tersebut, HPP Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan sebagai acuan dasar yang berlaku untuk semua kualitas, sehingga memberikan kepastian harga dan jaminan keuntungan bagi petani. Langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi petani dari harga jual yang rendah saat panen raya serta memastikan ketersediaan beras dengan harga yang wajar bagi konsumen.

Berdasarkan data Pusat Informasi Pangan (PIP) Ditjen Tanaman Pangan, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani per 9 Oktober 2025 mencapai Rp6.629/kg, atau lebih tinggi 1,99% dari HPP sebesar Rp6.500/kg. Grafik menunjukkan tren kenaikan harga GKP sejak awal Januari hingga Oktober 2025. Secara umum, harga GKP bergerak stabil di atas HPP baru setelah kebijakan tersebut diberlakukan, mencerminkan dampak positif intervensi pemerintah terhadap stabilitas harga di tingkat petani.



Gambar 3.13. Tren Harga Gabah Kering Panen Periode Tahun 2025





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH GABAH TAHUN 2025

NAIK!



Keputusan ini berlaku
sejak 15 Januari 2025

“

Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya ulangi Rp6.500, **saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini.** Ini adalah masalah kebangsaan.

Prabowo Subianto
Presiden RI



Berdasarkan **Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI No. 2 Tahun 2025** tentang Perubahan Atas HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kita sudah sepakat **sesuai perintah Bapak Presiden** seluruh penggilingan siapa saja yang membeli gabah di tingkat petani **mutlak dan wajib Rp6.500 perkilogram**. Keputusan ini berlaku untuk semua orang agar serapan 3 bulan ini bisa mencapai 3 juta ton setara beras.
Ini perintah Bapak Presiden.

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.pertanian.go.id

Pada awal Januari, harga GKP masih berada di kisaran Rp6.200–6.400/kg, bahkan sempat menyentuh titik terendah Rp6.200/kg pada 30 Januari 2025. Setelah HPP mulai berlaku, terlihat adanya kenaikan bertahap dan konsisten, menunjukkan respon pasar yang positif terhadap penetapan HPP baru oleh pemerintah. Stabilitas harga mulai tercapai pada akhir Februari, menandakan pemulihan harga pasca musim panen awal tahun.

Memasuki Maret hingga Juli, tren harga menunjukkan kenaikan yang konsisten dan signifikan, menandakan pasokan gabah yang terjaga serta peningkatan daya beli penggilingan. Puncak harga terjadi pada awal Agustus 2025, dengan harga tertinggi mencapai Rp6.795/kg (4 Agustus 2025). Kenaikan harga di atas HPP ini mencerminkan kondisi pasar gabah yang sehat serta meningkatnya daya saing petani berkat dukungan kebijakan harga dasar.

Setelah mencapai puncak di awal Agustus, harga mengalami koreksi ringan namun tetap stabil di atas HPP, dengan rata-rata harga Oktober sebesar Rp6.633/kg. Hingga 9 Oktober 2025, harga rata-rata GKP tercatat Rp6.629/kg, lebih tinggi 1,99% dari HPP dan hanya turun 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan stabilitas pasar yang sangat baik menjelang musim tanam berikutnya.

Kondisi ini membuktikan bahwa harga gabah di pasar tetap terjaga di atas HPP, yang menandakan keberhasilan kebijakan stabilisasi harga yang diinisiasi oleh Menteri Pertanian dalam melindungi pendapatan petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Kenaikan HPP ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga mendorong peningkatan produksi nasional melalui perbaikan insentif ekonomi di sektor hulu pertanian. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi salah satu terobosan penting Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.

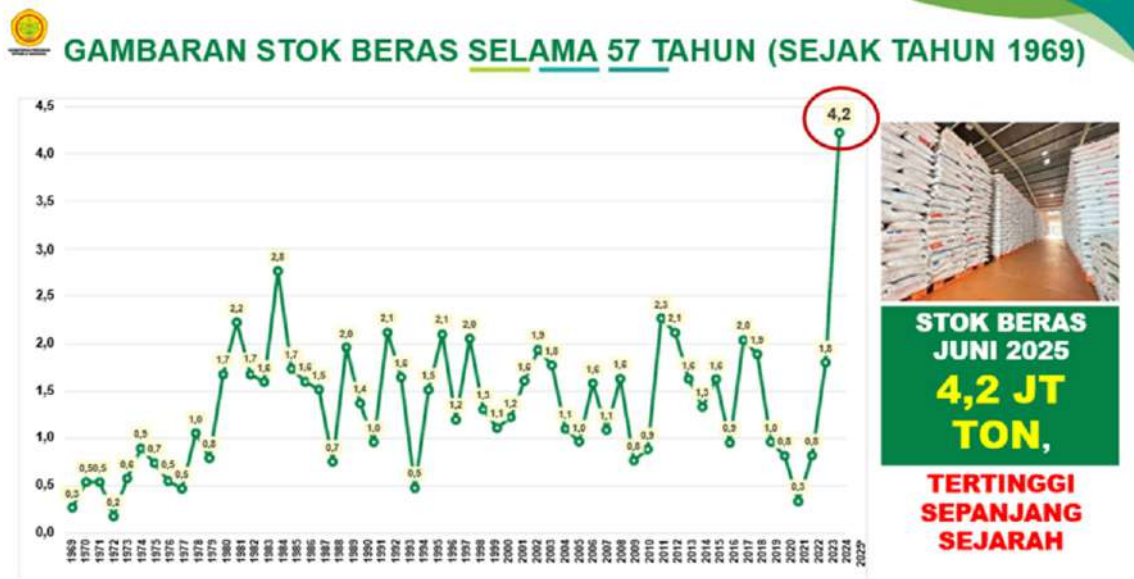
3.8. Koordinasi Peningkatan Cadangan Beras Pemerintah

Kinerja sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian menunjukkan capaian luar biasa dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, khususnya komoditas beras. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras nasional pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah dalam 57 tahun terakhir sejak 1969.

Capaian monumental ini merupakan hasil nyata dari kebijakan strategis yang terarah dan terintegrasi, antara lain:

1. Program percepatan tanam dan optimalisasi lahan suboptimal yang berhasil meningkatkan produktivitas di berbagai daerah.
2. Perbaikan sistem logistik dan distribusi hasil panen, sehingga pasokan beras dapat terjaga secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3. Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui kerja sama lintas sektor antara Kementan/Ditjen Tanaman Pangan, Bapanas, TNI, Polri, Bulog, dan pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
4. Penerapan sistem informasi pertanian yang akurat dan *real-time*, yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pangan nasional.





Gambar 3.14 Stok Beras Tertinggi dalam Sejarah

Namun pada Juni 2025, stok beras nasional melonjak tajam menjadi 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini merupakan lompatan 1,4 kali lebih tinggi dari rekor sebelumnya (1983) dan sekitar 14 kali lebih besar dibanding stok terendah pada 2022. Kenaikan stok beras hingga 4,2 juta ton memiliki dampak strategis bagi stabilitas nasional, antara lain:

- Menjamin ketersediaan pangan menghadapi fluktuasi produksi dan potensi gangguan cuaca ekstrem.
- Menekan risiko inflasi pangan akibat keterbatasan pasokan beras di pasar.
- Memperkuat arah swasembada dan kemandirian pangan berkelanjutan.
- Meningkatkan daya tawar dan cadangan strategis nasional, yang sebelumnya kerap tergerus oleh impor.

Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru sektor pertanian Indonesia. Lonjakan stok beras hingga 4,2 juta ton merupakan hasil sinergi kebijakan yang komprehensif dan berbasis data dalam pengelolaan produksi, distribusi, serta cadangan pangan nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan Menteri Pertanian berhasil secara efektif, tidak hanya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat menghadapi tantangan ketahanan pangan global.

3.9. Penegakan Hukum dan Anti Mafia Sektor Pangan

Pangan adalah nadi kehidupan bangsa. Ia tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang hak rakyat dan martabat negara. Dalam perjalanan panjang mewujudkan ketahanan pangan nasional, muncul kekuatan-kekuatan gelap yang berusaha menguasai rantai pasok untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ia adalah mafia pangan. Mereka bermain dari hulu hingga hilir — dari benih hingga harga di pasar. Oleh karena itu, pemberantasan mafia pangan bukan sekedar agenda teknis, melainkan perjuangan moral dan politik dalam menegakkan kejujuran dan keadilan sosial di sektor pangan.

Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Dr. Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa perjuangan melawan mafia pangan adalah bagian dari perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi dan upaya menegakkan kedaulatan pangan nasional. Berikut perjuangan moral dan politik yang dihadapi Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Dr. H. Andi Amran Sulaiman dalam menegakkan kejujuran di tengah sistem pangan yang kompleks.

Kecurangan Harga Beras: Ketika Stok Melimpah, Harga Justru Naik

Pada Mei 2025, harga beras di pasar melonjak meskipun stok nasional mencapai 35,6 juta ton — jauh di atas target 32 juta ton. Fenomena ini bertentangan dengan hukum ekonomi. Ketika pasokan melimpah, harga seharusnya turun. Hal ini mengindikasikan ada “tangan-tangan tak terlihat” yang memainkan harga.

Kementerian Pertanian segera membentuk Tim Investigasi bersama Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional. Hasil temuan di lapangan sangat mengejutkan. Dari 268 sampel beras (212 merek) di 10 provinsi, ditemukan: 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu; 59,78% dijual di atas HET; dan 21,66% beratnya tidak sesuai kemasan. Pada kategori beras medium: 88,24% tidak memenuhi SNI; 95,12% dijual melebihi HET; dan 9,38% kekurangan berat. Akibatnya, masyarakat dirugikan hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Kementan mengambil langkah tegas dengan menempuh tiga langkah, yaitu: 1) Produsen diberi 2 minggu untuk memperbaiki mutu dan harga; 2). Pengawasan terpadu dilakukan di seluruh rantai distribusi; 3). Kementan bersama Satgas Pangan dan Kejaksaan Agung menindak pelaku hukum tanpa pandang bulu.

***“Negara tidak boleh kalah dari mafia pangan.
Pasar bukan tempat untuk mempermainkan penderitaan rakyat.”***



Gambar 3.15. Mentan Temukan Beras Dijual di Atas HET saat Sidak Pasar Cipinang

Penyelewengan dan Korupsi di Lingkungan Pertanian

Mewujudkan sistem pangan yang bersih tidak hanya menasar pelaku di luar Kementan, tetapi juga membenarkan integritas di internal Kementan. Sejumlah kasus yang melibatkan penyimpangan anggaran dan kebijakan telah diungkap dan ditindak tegas.

1) Kasus Penyelewengan Anggaran

Audit Inspektorat Jenderal menemukan seorang pejabat eselon II beserta stafnya meminjam uang Rp10 miliar kepada pihak luar dengan jaminan berupa surat kerja sama kontrak pengadaan palsu. Hasil audit mengungkap bahwa dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengembaliannya melalui perjalanan dinas fiktif. Kasus ini telah ditangani Polda Metro Jaya dan pejabat beserta stafnya tersebut telah menjadi tersangka.

2) Kasus Manipulasi Harga Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Audit Inspektorat Jenderal menemukan kelebihan pembayaran Rp18 miliar dalam pengadaan *Combine Harvester* tahun 2023. Modusnya adalah penyedia tidak memiliki struktur harga yang jelas, sementara pejabat PPK tidak membuat referensi harga baru (menggunakan referensi harga tahun sebelumnya). Kasus ini menjadi contoh pengawasan internal yang efektif untuk mencegah kebocoran negara.

3) Kasus Pemalsuan Pupuk NPK

Audit Inspektorat Jenderal menemukan 27 penyedia pupuk (4 penyedia menyalurkan pupuk palsu dan 23 penyedia menyalurkan pupuk dibawah standar) melakukan kecurangan mutu (tidak sesuai spesifikasi) dan/atau pemalsuan dokumen uji laboratorium. Langkah penegakan yang dilakukan Kementan yaitu: sebanyak Rp44,7 miliar kelebihan pembayaran ditarik kembali dan disetor ke Kas Negara, izin edar dicabut, dan 23 penyedia dimasukkan daftar hitam. Selain itu, 13 pegawai dirotasi dan direktur yang terlibat di copot.

“Integritas bukan sekadar slogan.

la diukur dari keberanian menindak orang dekat yang bersalah.”



Sumber: trotoar.id diakses 10 Oktober

Gambar 3.16. Mentan Non aktifkan 11 Pejabat, dan *Blacklist* 4 Perusahaan



Kasus Penjualan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pupuk bersubsidi adalah hak petani kecil, namun praktik di lapangan ditemukan harga pupuk di beberapa daerah di jual jauh di atas HET dan beberapa kios mewajibkan petani membeli produk non-subsidi secara bersamaan (*bundling*). Terhadap kasus tersebut, Kementan tegas melakukan pencabutan izin operasional kios nakal. Pembelaan kepada petani, pada tahun 2025, Kementan mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan melakukan penyederhanaan sistem distribusi dengan penebusan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan aplikasi *t-pubers*.

***“Petani adalah ujung tombak kedaulatan pangan.
Mereka harus dibela, bukan dibebani.”***

Kasus Pencaloan Pengadaan Barang dan Jasa

Ditemukan praktik percaloan pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementan oleh pihak luar yang mengaku dekat dengan pejabat Kementan. Modusnya meminta uang Rp500 juta kepada penyedia untuk memenangkan pengadaan melalui e-katalog dengan cara menduplikasi akun PPK di sistem LPSE dan e-katalog, selanjutnya menunjukkan tangkapan layar (*screenshot*) palsu sebagai alat untuk meminta uang kepada calon penyedia sebagai syarat di klik sebagai penyedia pengadaan. Kasus ini tengah ditangani Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan.

Kasus Minyak Goreng (MinyaKita) - Takaran Tak Sesuai Label



sumber: metrotvnews.com, diakses 10 Oktober 2025

Gambar 3.17. Sidak Pasar Jaya Lenteng Agung, Mentan Temukan Minyakita tak Sesuai Volume



Pada Ramadhan 2025, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menemukan kemasan Minyak Kita 1 liter hanya berisi 850–920 ml. Temuan tersebut, diserahkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk dilakukan investigasi. Hasil Investigasi oleh Bareskrim Polri mengungkap 26 laporan kasus, dengan: 13 tersangka, 17 pelaku usaha, dan penjualan di atas HET (Rp17.500/liter).

“Ketika rakyat membeli minyak goreng yang tak sesuai takaran, itu bukan hanya penipuan dagang tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.”

Layanan Impor dan Mafia Kuota

Impor bawang putih menjadi celah permainan mafia pangan. Untuk menutup celah tersebut, Kementan menegakkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNNK) untuk menjamin: transparansi kuota impor, sinkronisasi data antar kementerian, dan perencanaan impor berbasis kebutuhan riil. SNNK menjadi tonggak penting untuk menutup ruang negosiasi gelap antara importir dan pejabat.

Penegakan Hukum terhadap Pengimpor Pakan Ilegal

Kementan menemukan sejumlah importir pakan ternak yang melakukan pemasukan tanpa izin sah. Langkah tegas diambil, antara lain: melakukan evaluasi izin seluruh pelaku usaha, koordinasi dengan Satgas Pangan Mabes Polri, dan penindakan hukum terhadap importir nakal. Tujuannya adalah untuk menjaga kemandirian pakan nasional dan mencegah kerusakan ekosistem agribisnis.

Kasus Singkong di Lampung - Ketegasan Negara Membela Petani

Awal 2025, ribuan petani di Provinsi Lampung berunjuk rasa menolak rendahnya harga singkong akibat melonjaknya impor tapioka. Sebagai respon, Kementan mengambil langkah cepat, yaitu: menetapkan harga dasar singkong Rp1.350/kg; mewajibkan izin impor disetujui langsung oleh Kementan; melarang impor sebelum hasil panen petani terserap. Kebijakan ini memulihkan harga dan kepercayaan petani, sekaligus menegaskan bahwa negara berpihak pada produksi dalam negeri. Mafia pangan adalah ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pangan adalah bagian dari reformasi birokrasi dan moral. Keberhasilan Kementan bukan hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi dari keberanian menjaga keadilan dalam sistem pangan.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan hidup. Ia adalah kehormatan bangsa.”

Melalui berbagai langkah tegas — mulai dari audit reguler/investigatif, membenahan sistem digital, penindakan mafia pangan, hingga sinergi dengan aparat penegak hukum — Kementerian Pertanian membuktikan bahwa birokrasi bersih bukan utopia. Kini, perjalanan baru dimulai: menjaga integritas agar menjadi budaya, bukan sekadar kebijakan.



3.10. Transformasi Sistem Pertanian

Praktik pertanian lahir dari transformasi besar cara manusia bertahan hidup. Dahulu, manusia menggantungkan hidup pada aktivitas berburu dan meramu, mengumpulkan hasil alam tanpa mengelolanya. Namun seiring waktu, manusia mulai memahami bahwa alam dapat diolah secara berkelanjutan. Dari sinilah muncul kesadaran untuk menanam, memelihara, dan membudidayakan berbagai tanaman serta hewan ternak. Transformasi inilah yang menjadi awal mula lahirnya sistem pertanian seperti yang dikenal saat ini (Naithani, 2021).



Gambar 3.18. Proses Transformasi Pertanian

Transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern telah mengubah struktur biaya produksi menjadi lebih efisien sebesar 50%, salah satunya mengurangi biaya produksi saat penanaman dan panen, terutama di kegiatan olah tanam, panen dan perontokan. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi dengan penggunaan benih unggul dan teknologi tepat guna saat penanaman. Pengurangan biaya terjadi seperti lahan luas, efisiensi penyewaan, distribusi alat baik, dan kondisi tanah/iklim yang mendukung.

Transformasi sistem pertanian menjadi agenda strategis dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian bangsa. Periode 2024–2025 menjadi momentum penting untuk mengubah pola pikir dari pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern yang produktif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika global. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, tata kelola, serta penerapan inovasi dan teknologi digital di seluruh rantai nilai pertanian. Transformasi pertanian dibangun melalui enam pilar utama.



Digitalisasi dan *Smart Farming*

Pemanfaatan teknologi digital diterapkan di seluruh tahap usaha tani mulai dari pengolahan lahan, budidaya, hingga pascapanen. Sistem pertanian presisi, sensor tanah dan iklim, *Internet of Things (IoT)*, serta analisis big data menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis informasi spasial dan kondisi agroklimat. Dengan pendekatan ini, petani mampu mengelola sumber daya secara lebih akurat dan efisien.

Mekanisasi dan Automasi Pertanian

Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) diarahkan untuk mengurangi biaya produksi dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Rekayasa alsintan dilakukan agar sesuai dengan kondisi lokal, seperti traktor multifungsi, sistem tanam otomatis, serta teknologi panen dan pengering adaptif. Penerapan mekanisasi terbukti meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat aktivitas usaha tani.

Bioteknologi dan Rekayasa Genetik

Inovasi bioteknologi difokuskan untuk menciptakan varietas unggul baru (VUB) yang tahan terhadap cekaman lingkungan dan berdaya hasil tinggi. Pengembangan padi biofortifikasi seperti Inpari IR Nutri *Zinc*, Inpago 13 Fortiz, dan Inpara 11 Siam *HiZinc* merupakan wujud nyata penerapan ilmu pengetahuan dalam mendukung ketahanan gizi dan pencegahan stunting. Program pengembangan padi biofortifikasi telah diperluas hingga ratusan ribu hektare setiap tahunnya sebagai bagian dari agenda nasional peningkatan gizi masyarakat.

Standardisasi dan Sertifikasi

Peningkatan mutu benih dan tata kelola produksi dilakukan melalui sistem benih bersertifikat dan terstandar yang dikelola oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Penerapan standar nasional (SNI) dan sistem mutu ISO 9001:2015 memastikan ketersediaan benih unggul yang tepat jenis, jumlah, waktu, dan lokasi. Upaya ini memperkuat rantai pasok pertanian yang berdaya saing tinggi.

Adaptasi Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Strategi adaptasi dilakukan dengan mengembangkan teknologi konservasi tanah dan air, rekayasa tata air lahan rawa, serta sistem agroforestri. Pendekatan pertanian rendah emisi karbon dan efisiensi energi menjadi dasar bagi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap iklim ekstrem.



Transformasi SDM Pertanian

Perubahan sistem pertanian tidak akan berhasil tanpa peningkatan kapasitas manusia pertanian. Pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan pembelajaran digital diperluas bagi petani, penyuluh, dan tenaga teknis agar lahir generasi agro-profesional yang melek teknologi, adaptif, dan berjiwa wirausaha.

Selain keenam pilar tersebut, Kementerian Pertanian juga mengembangkan berbagai teknologi spesifik lokasi seperti sistem tanam hidroponik, aeroponik, dan teknologi lahan apung untuk menjawab keterbatasan lahan dan tenaga kerja. Inovasi pada panen dan pascapanen dilakukan untuk menekan kehilangan hasil serta meningkatkan nilai tambah produk.



Gambar 3.19. Inovasi Teknologi *Drone* Untuk Pertanian Mendukung Pembangunan Pertanian

Transformasi ini diperkuat melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta komunitas petani. Sinergi tersebut membentuk ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) yang mempercepat adopsi teknologi hasil perekayasa Kementan agar dapat diterapkan secara luas di lapangan.

Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan teknologi digital dan smart farming, pengembangan paten dan varietas unggul baru, serta optimalisasi pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium pengujian di bawah Badan Riset dan Modernisasi Pertanian. Upaya ini menegaskan komitmen untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai fondasi utama pertanian modern. Transformasi sistem pertanian bukan sekadar modernisasi alat atau teknologi, melainkan proses perubahan menyeluruh menuju sistem pangan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan dukungan inovasi, digitalisasi, dan tata kelola yang terintegrasi, Indonesia tengah menapaki babak baru menuju pertanian maju, mandiri, dan modern, sejalan dengan visi nasional *Swasembada Pangan Berkelanjutan 2025–2029*.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Kenapa bertani harus pakai drone?



Karena drone bikin kerja lebih efektif:

Hemat waktu (penyemprotan bisa 10x lebih cepat)

Hemat biaya tenaga kerja

Lebih aman dari paparan bahan kimia





PERTANIAN



BAB IV

Strategi

Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

 @kementerianpertanian

Swasembada pangan bukanlah tujuan akhir, melainkan tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang sejati. Setelah capaian swasembada berhasil diraih, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankannya di tengah dinamika perubahan zaman. Perubahan iklim, keterbatasan lahan, fluktuasi harga komoditas, hingga menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian menjadi ujian nyata bagi keberlanjutan pangan nasional. Karena itu, swasembada harus dimaknai sebagai proses berkesinambungan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan sistem yang mendukungnya agar mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan ke depan.

Kementerian Pertanian menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan swasembada pangan dapat terjaga secara berkelanjutan. Pendekatan yang ditempuh meliputi penguatan kelembagaan pertanian, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui teknologi modern, pembangunan dan perawatan infrastruktur yang memadai, serta upaya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap hidup dan dinamis. Seluruh langkah ini menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan produksi, memperkuat kemandirian pangan, dan memastikan bahwa hasil kerja keras petani dan bangsa dalam mencapai swasembada tidak berhenti di satu generasi, melainkan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

4.1. Penerapan *Good Governance* dan *Clean Government*

Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance/GG*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government/CG*) secara utuh. Mengingat *GG* dan *CG* saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan profesional.

Pemerintahan yang bersih menjadi fondasi penting agar *GG* & *CG* di lingkungan Kementan dapat terwujud sepenuhnya, sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan (*trust*) bagi Masyarakat (*stakeholder*). Berikut Upaya-upaya Kementan dalam mewujudkan *GG* dan *CG* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program/Kegiatan dan layanan pertanian.

4.1.1. *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola yang baik dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mengarahkan dan mengendalikan urusan publik secara efektif. Terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan *GG*, antara lain:

- Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.
- Transparansi: Terbuka dan memberikan informasi kepada publik mengenai kebijakan, proses, dan hasil penyelenggaraan pemerintahan.
- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- Supremasi Hukum (*Rule of Law*): Adanya hukum yang berlaku dan ditegakkan secara adil dan tidak memihak.
- Efektivitas dan Efisien: Mengelola sumber daya negara secara optimal untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mewujudkan *GG* di lingkup Kementan telah dilakukan upaya-upaya nyata, berikut:





Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan pelaksanaan program/kegiatan dan layanan di lingkungan Kementan, Kementan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sebagai acuan.
- 2) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh unit kerja lingkup Kementan untuk membangun komitmen pimpinan dan memberikan pemahaman dan kepedulian (*awareness*) kepada seluruh pegawai tentang pentingnya SPI untuk manajemen.
- 3) Penerapan manajemen risiko melalui Permentan Nomor 38 Tahun 2021 tentang penerapan Manajemen Risiko lingkup Kementan sebagai dasar membangun budaya peduli risiko untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).
- 4) Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi meningkatkan (*Level*) maturitas penyelenggaraan SPI di lingkup Kementan, menuju *Level*/III (Terdefinisi).

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan kinerja program/kegiatan dan layanan pertanian, Kementan telah melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menyusun Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559 Tahun 2025 tentang Panduan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Kementan, sebagai acuan pelaksanaan evaluasi mandiri (*self evaluation*) pada unit eselon I hingga UPT di daerah;
- 2) Melaksanakan evaluasi mandiri (*self evaluation*) AKIP masing-masing unit kerja eselon I hingga UPT dan Kementan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal tersebut mampu meningkatkan nilai AKIP Kementan pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,45 dari tahun sebelumnya sebesar 74,05.

Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk dengan menyusun rencana aksi (renaksi) sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Pelaksanaan RB Kementan yang diberikan oleh KemenPAN-RB.



Meningkatkan Opini Laporan Keuangan

Meningkatkan Opini Laporan Keuangan dengan melakukan reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan reviu Laporan Keuangan (LK) Kementan secara berkala dan berkelanjutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta menumbuh kembangkan inovasi-inovasi layanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga mengetahui tingkat efektivitas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang saat ini nilai indeks TLH BPK pada semester I tahun 2025 sebesar 84,48%.

4.1.2. Clean Government

Clean Government merupakan perwujudan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta menerapkan nilai-nilai demokratis. CG merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara bersih, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Fokus utama CG untuk: (a) mendorong pelaksanaan program/kegiatan dan layanan bebas dari praktik KKN, (b) sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan menekan terjadinya penyalahgunaan Kewenangan (*abused of power*) di lingkungan aparatur pemerintah. Langkah-langkah nyata yang dilakukan Itjentan dalam mewujudkan CG Kementan, sebagai berikut:

Mewujudkan Survei Penilaian Integritas KPK Hijau

Mewujudkan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Hijau dengan melakukan sosialisasi, pengawalan dan penilaian mandiri mulai dari tingkat pusat hingga UPT di daerah secara terstruktur, sistematis, dan *massive* (TSM).

Membangun Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) menindaklanjuti PermenPAN-RB No.90 Tahun 2021, sebagai *show windows* (*quick win*) pelaksanaan RB di Kementan.



Meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang dikembangkan BPKP mengukur kemajuan pencegahan dan penanganan korupsi melalui tiga pilar: pengelolaan risiko, pencegahan, dan penanganan. Kementerian Pertanian terus meningkatkan IEPK melalui *self-assessment* maturitas SPI terintegrasi dan tindak lanjut rekomendasi BPKP, guna memperkuat pengendalian internal dan membangun budaya antikorupsi di lingkungan Kementan.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kementerian Pertanian berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan *e-government*, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan sistem yang transparan serta akuntabel. Berbagai inovasi layanan tanpa tatap muka dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, memperbarui standar pelayanan, dan mencegah praktik KKN dalam proses perizinan.

Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian Pertanian meningkatkan kualitas pengadaan melalui perencanaan matang, efisiensi berbasis teknologi, dan penguatan SDM. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas memperkuat tata kelola yang bersih, ditandai dengan capaian UKPBJ Kementan sebagai kementerian pertama yang menayangkan produk konsolidasi Benih Padi Inbrida di Katalog Elektronik Versi 6 tahun 2024.



Membangun Kanal Pengaduan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pengendalian gratifikasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Kementan mengoptimalkan kanal digital seperti WBK, Kaldu Emas, Si-Intan, dan LAPOR! untuk memudahkan pelaporan dan mempercepat penanganan isu. Sistem SiGAP-UPG dan UPG di setiap unit kerja turut memperkuat budaya antigratifikasi. Sepanjang Oktober 2024 – Oktober 2025, tercatat 78 laporan masyarakat, seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui audit dengan mayoritas terbukti relevan dan berdampak pada pengawasan kinerja.



Sumber: CNBC Indonesia (14/5/2025)

Gambar 4.1. Menteri Pertanian Memberhentikan 2 Oknum Pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) Yang Terbukti Melakukan Pungutan Liar Dan Penyalahgunaan Wewenang

4.2. Peningkatan Produksi

4.2.1. Peningkatan Produksi Pertanian melalui Penguatan Sistem Perbenihan dan Varietas Unggul Bersertifikasi

Strategi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penggunaan benih varietas unggul baru (VUB) dan benih berkualitas adalah pendekatan kunci yang berfokus pada peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap tantangan lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Benih unggul bukan hanya berfungsi sebagai bahan tanam, tetapi juga sebagai sarana pembawa inovasi teknologi yang dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan dan berkelanjutan.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Survei SPIN:

SETAHUN PRABOWO-GIBRAN

MENTERI PERTANIAN CATAT KEPUASAN PUBLIK KE-2 TERTINGGI

ABDUL MU'TI **67.5**
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

ANDI AMRAN SULAIMAN **67.3**

YANDRI SUSANTO **66.9**
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SYAFRIE SJAMSOEDDIN **66.5**
MENTERI PERTAHANAN

NASSARUDDING UMAR **66.1**
MENTERI AGAMA

SAIFULLAH YUSUF **65.4**
MENTERI SOSIAL

BUDI GUNADI SADIKIN **65.3**
MENTERI KESEHATAN

PURBAYA YUDHI SADEWA **64.8**
MENTERI KEUANGAN

M. IFTITAH SURYANEGARA **64.5**
MENTERI TRANSMIGRASI

PRASETYO HADI **64.5**
MENTERI SEKRETARIS NEGARA

SUGIONO **63.0**
MENTERI LUAR NEGERI

TEDDY INDRA WIJAYA **61.1**
SEKRETARIS KABINET

ROSAN ROESLANI **61.0**
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM

Varietas unggul merupakan salah satu inovasi teknologi utama yang dihasilkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, disamping berbagai teknologi pendukung pengendalian hama, penyakit, dan pascapanen. Setiap varietas yang dilepas memiliki karakter berbeda, baik dari potensi hasil, adaptasi terhadap cekaman lingkungan, maupun preferensi konsumen. Keberagaman varietas ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi petani untuk menyesuaikan varietas dengan agroekosistem dan kebutuhan daerah.

Dari sejumlah varietas yang telah dilepas, setiap tahun tersedia benih kelas BS untuk sekitar 90-100 varietas. Distribusi benih BS padi pada tahun 2015–2022 menunjukkan bahwa jumlah varietas yang terdistribusi per tahun berkisar antara 80-98 varietas. Fakta ini menunjukkan bahwa varietas-varietas padi tersebut dimanfaatkan oleh para petani dan stakeholder lainnya, atau dengan kata lain tersedianya banyak varietas padi memberi pilihan yang lebih beragam bagi para petani untuk memilih varietas sesuai preferensi, kondisi lingkungan biotik dan abiotik.

Penggunaan varietas unggul padi di Indonesia sudah cukup tinggi, meskipun masih perlu sosialisasi mengenai kesesuaian varietas dengan agroekosistem setempat dan ketahanan varietas terhadap hama dan penyakit dominan di daerah tersebut. Data luas adopsi varietas menunjukkan bahwa 95,08% luas tanam padi di Indonesia ditanami dengan varietas unggul, sisanya (5,14%) ditanami dengan padi lokal (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tahun 2024, data diolah Direktorat Perbenihan TP). Meskipun demikian, varietas-varietas unggul yang baru dilepas perlu disosialisasikan kepada petani sehingga petani memperoleh manfaat dari keunggulan varietas tersebut.



Gambar 4.2. Benih Unggul Bersertifikat

Mutu benih menjadi kunci keberhasilan penyebaran varietas unggul. Benih bermutu harus memenuhi empat aspek utama, yaitu mutu genetik, fisiologis, fisik, dan kesehatan benih, sehingga dapat tumbuh optimal dan mencerminkan potensi varietasnya. Untuk menjaga kemurnian genetik, perbanyakan benih padi dibatasi hingga empat generasi yaitu BS, BD, BP, dan BR.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIA
MAJU



BANGGA BUATAN
INDONESIA



0 39217 11914 4

FITUR *BARCODE*

Mencegah Pemalsuan Benih

Kementerian Pertanian memproduksi benih sumber dari varietas-varietas unggul yang telah dilepas. Proses produksi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ISO 9001:2015, yang menekankan tujuh prinsip mutu dan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dalam setiap tahap produksi, penanganan, penyimpanan, dan distribusi. Penerapan sistem mutu ini memastikan ketelusuran dan akurasi data, memungkinkan deteksi dini terhadap ketidaksesuaian, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Dampaknya terlihat nyata melalui peningkatan volume dan mutu benih sumber yang dihasilkan UPBS di lingkup Kementerian Pertanian serta berkurangnya keluhan dari pengguna benih.

Benih unggul bukan hanya berfungsi sebagai bahan tanam, tetapi juga sebagai pembawa inovasi teknologi yang memungkinkan peningkatan hasil panen secara signifikan dan berkelanjutan. Benih bersertifikat menjamin mutu genetik, fisik, dan fisiologis yang sesuai dengan standar nasional (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM), sehingga memberikan hasil optimal dan tahan terhadap hama serta penyakit tanaman. Beberapa keunggulan penggunaan benih bersertifikat antara lain:

- a. Kualitas Terjamin: memiliki kemurnian genetik tinggi dan daya tumbuh optimal.
- b. Produktivitas Tinggi: memberikan potensi hasil lebih besar dibanding benih non-sertifikat.
- c. Ketahanan terhadap Hama dan Penyakit: menurunkan risiko gagal panen akibat infeksi awal pada benih.
- d. Keuntungan Ekonomi Petani: meningkatkan pendapatan karena hasil panen berkualitas dan harga jual yang lebih tinggi.
- e. Dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional: berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan berkelanjutan dan efisien.

Dalam mendukung peningkatan produksi, Kementerian Pertanian melalui program penguatan sistem perbenihan nasional telah mendistribusikan:

- a. Benih sumber (BS) padi sebanyak 18.995 ton,
- b. Benih dasar (FS) padi sebanyak 86.884 ton,
- c. Benih sebar (SS) padi sebanyak 639,54 ton,
- d. Benih Sumber Kedelai Sebanyak 14,81 ton, dan
- e. Benih Sumber Jagung sebanyak 75,42 ton.

Meskipun manfaatnya besar, tingkat adopsi benih bersertifikat masih belum optimal. Data Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menunjukkan bahwa penggunaan benih padi bersertifikat baru mencapai 64%, masih di bawah target 80% RPJMN 2025–2029. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Preferensi Petani: sebagian masih menggunakan benih hasil panen sendiri karena dianggap lebih hemat.
- b. Ketersediaan dan Distribusi: benih bersertifikat belum selalu tersedia tepat waktu atau sesuai kebutuhan varietas lokal.
- c. Dominasi Varietas Lama: petani cenderung mempertahankan varietas populer seperti Ciherang, sementara adopsi varietas unggul baru masih rendah.



- d. Akses Informasi dan Pendampingan: terbatasnya penyuluhan dan literasi teknologi benih menyebabkan lambatnya perubahan perilaku adopsi.

4.2.2. Peningkatan Produksi melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Peningkatan produksi pangan nasional merupakan langkah strategis dan mendasar dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan iklim yang semakin ekstrem, serta alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan. Dua strategi besar yang harus berjalan beriringan adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Keduanya saling melengkapi: ekstensifikasi membuka dan mengoptimalkan lahan baru, sementara intensifikasi berfokus pada peningkatan produktivitas di lahan yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi dan efisiensi input. Sinergi antara kedua pendekatan ini menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan di masa depan.

Ekstensifikasi

Pendekatan ekstensifikasi merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas basis produksi pangan nasional melalui pemanfaatan lahan-lahan baru yang selama ini belum optimal, seperti lahan rawa, tadah hujan, dan lahan tidur. Upaya ini tidak semata-mata berfokus pada pembukaan lahan baru, tetapi juga pada penyebaran teknologi, perbaikan infrastruktur irigasi, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pengembangan baru agar peningkatan produksi berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Ekstensifikasi menjadi jawaban atas semakin sempitnya lahan produktif akibat urbanisasi dan alih fungsi lahan, sekaligus membuka peluang pemerataan pembangunan pertanian di wilayah yang selama ini kurang tersentuh.

Salah satu contoh nyata keberhasilan strategi ini dapat dilihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan potensi lahan tanam mencapai 200 ribu hektare, wilayah ini mampu diarahkan untuk menghasilkan hingga dua juta ton beras per tahun. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi lokal yang hanya sekitar 1,3 juta ton, sehingga berpotensi menciptakan surplus sebesar 700 ribu ton yang dapat berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Pengalaman NTT menunjukkan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak semata ditentukan oleh kondisi agroklimat atau tradisi pertanian yang mapan, tetapi oleh keberanian dan ketepatan intervensi kebijakan yang mampu memaksimalkan potensi lokal.

Program serupa juga dikembangkan di Kalimantan Tengah melalui kegiatan cetak sawah dan optimasi lahan (Oplah). Program ini dijalankan oleh Brigade Pangan sebagai bagian dari strategi penguatan produksi nasional yang disertai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, dolomit, serta pupuk. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perluasan lahan bukan hanya upaya fisik membuka tanah baru, melainkan strategi terencana untuk membangun sistem produksi yang terintegrasi.



Gambar 4.3. Proses pembuatan SID dan Konstruksi Optimalisasi Lahan Sawah

Dalam skala nasional, Kementerian Pertanian juga mendorong kerja sama lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Transmigrasi, guna membangun klaster pertanian modern di kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian. Kawasan-kawasan ini diarahkan untuk menjadi sentra pertanian modern yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kesejahteraan petani, terutama para transmigran.

Selain dukungan pemerintah pusat dan daerah, upaya ekstensifikasi juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi internasional. Para peneliti dari *Rice Research & Extension Center, University of Arkansas* menilai kebijakan cetak sawah secara masif yang dijalankan Indonesia sebagai langkah realistis dan berdasar dalam menjawab kebutuhan peningkatan produksi di tengah krisis pangan global dan ancaman *El Nino*. Dukungan politik pun terus mengalir dari DPR RI, yang mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pertanian melalui program optimalisasi lahan dan kerja sama strategis lintas lembaga. Bahkan, kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat implementasi strategi ini, khususnya dalam pemanfaatan 10 juta hektare lahan rawa mineral yang berpotensi besar menjadi lahan produktif baru. Bila potensi ini dimaksimalkan, Indonesia bukan hanya dapat mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpeluang menjadi lumbung pangan dunia.



Gambar 4.4. Proses *Land Clearing* Pada Kegiatan Cetak Sawah
Kementerian Pertanian Republik Indonesia | Capaian Kinerja



intensifikasi

Berbeda dengan ekstensifikasi yang berfokus pada perluasan areal tanam, intensifikasi pertanian bertujuan meningkatkan hasil produksi di lahan yang sudah ada melalui penerapan teknologi, efisiensi input, dan manajemen budidaya yang lebih baik. Pendekatan ini menjadi krusial di tengah keterbatasan lahan pertanian dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Dalam konteks pembangunan pertanian Indonesia, intensifikasi mencakup empat elemen utama, yaitu penggunaan benih unggul, penerapan pemupukan berimbang, program pompanisasi, serta perbaikan sistem irigasi dan bendungan. Keempatnya dirancang untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek efisiensi, konservasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Program pompanisasi menjadi salah satu terobosan terbesar dalam strategi intensifikasi nasional. Di tengah ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena *El Nino*, sistem pompanisasi berfungsi ganda: mengalirkan air ke sawah pada musim kemarau dan mengeluarkan kelebihan air saat musim hujan ekstrem. Melalui *refocusing* anggaran, pemerintah mengalihkan sebagian dana untuk pengadaan pompa air guna mendukung keberlanjutan tanam sepanjang tahun. Program ini terbukti efektif meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari IP100 menjadi IP200 bahkan IP300, memungkinkan petani menanam hingga tiga kali dalam setahun. Hingga kini, pompanisasi telah mengairi sekitar 500 ribu hektare lahan, dengan potensi tambahan hasil panen sebesar 2,5 hingga 5 juta ton gabah.



Gambar 4.5. Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier

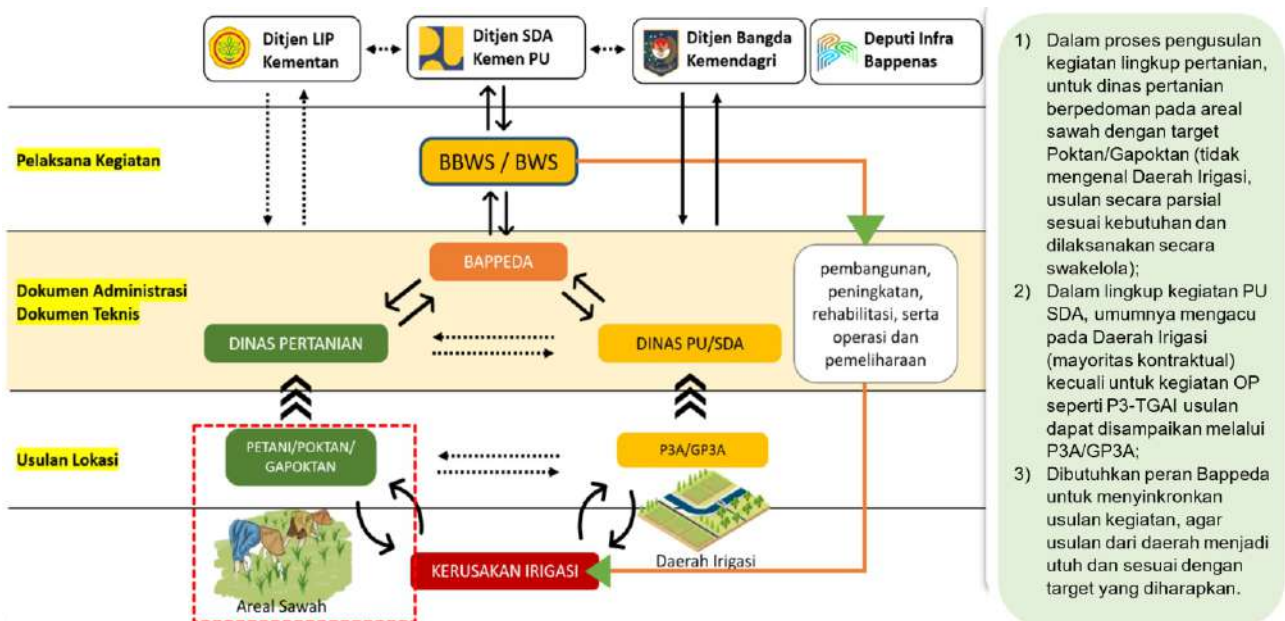
Untuk memastikan efektivitas intensifikasi, pemerintah juga memperkuat dukungan sarana produksi, terutama pupuk. Tahun 2024, alokasi subsidi pupuk ditingkatkan menjadi Rp28 triliun, dengan volume distribusi mencapai 9,55 juta ton, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Di beberapa daerah, seperti Pulau Madura, strategi intensifikasi dijalankan secara komprehensif melalui penguatan irigasi, efisiensi tata kelola air, dan penerapan teknologi pertanian modern. Daerah yang selama ini identik dengan lahan kering kini diproyeksikan menjadi kawasan contoh transformasi pertanian berbasis potensi lokal.



Selain memperkuat sistem irigasi dan penyediaan sarana produksi, pemerintah juga mengoptimalkan 10 juta hektare lahan rawa mineral di Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lain sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa intensifikasi tidak hanya berarti meningkatkan produktivitas di lahan lama, tetapi juga memanfaatkan potensi sumber daya alam yang belum digarap maksimal. Dengan dukungan pupuk, benih, alsintan, dan teknologi modern, berbagai kebijakan intensifikasi diharapkan mampu membawa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari tiga tahun, sekaligus memperkuat fondasi menuju lumbung pangan global.

4.3. Memperkuat Dukungan Infrastruktur

Salah satu faktor kunci dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan adalah tersedianya infrastruktur usaha tani yang andal. Infrastruktur tersebut mencakup jaringan irigasi yang berkualitas serta jalan usaha tani yang memadai untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani, termasuk fasilitasi dan pemberian insentif untuk memperlancar distribusi logistik komoditas pangan.



Gambar 4.6. Tahapan Pelaksanaan, Peran Dan Keterkaitan Antar K/L Dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan.



Landasan hukum bagi sinergi lintas lembaga ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres ini menegaskan bahwa kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada kewenangan pemerintah daerah; dan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier pada kewenangan pusat (Kementan) baik itu pada lokasi optimasi lahan, cetak sawah maupun diluar itu akan difasilitasi dengan Inpres No.2 Tahun 2025. Melalui Inpres ini, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem irigasi diintegrasikan untuk menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan guna mendukung target swasembada pangan nasional. Gambar di bawah ini menyajikan bagaimana tahapan pelaksanaan, peran dan keterkaitan antar K/L dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Inpres No. 2 Tahun 2025 ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi (Monev) dan pelaporan. Pembagian tugas dalam pelaksanaan Inpres ini melibatkan peran strategis dari Kementerian, Pemda, BUMN dan P3A/GP3A/Poktan. Kementerian yang terlibat yakni Kemenko Perekonomian bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor. Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap penentuan usulan dan verifikasi. Kemendagri juga berperan dalam pembinaan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam pemenuhan persyaratan administrasi serta tidak lupa keterlibatan Kementerian Keuangan dalam proses penganggaran kegiatan.



Sumber: Kementerian PU

Gambar 4.7. Suasana Rapat Koordinasi Menteri Pertanian Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Beserta Jajaran di Kantor Kementerian Pertanian



Pelaksanaan kegiatan INPRES didasarkan pada beberapa kriteria utama, yaitu: kriteria sasaran, kriteria lokasi prioritas, kriteria kegiatan, kriteria kesiapan administrasi dan kriteria kesiapan teknis.

Pelaksanaan proses verifikasi usulan penentuan Daerah Irigasi dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian PU dan Kementerian Pertanian seperti kesiapan administrasi dan kesiapan teknis melalui SIPURI. SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan untuk INPRES Irigasi) oleh Kementerian PUPR. Aplikasi ini menjadi instrumen utama dalam pengusulan, verifikasi, hingga penilaian usulan kegiatan irigasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian.

Aspek lain pendukung swasembada pangan berkelanjutan terkait dengan distribusi dan pemasaran produk hasil pertanian. Ketersediaan jalan usaha tani serta rendahnya biaya logistik dari lahan pertanian ke pasar menjadi faktor yang penting. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, membangun sinergisitas dengan Kementerian Perhubungan sebagai pemangku kepentingan penyediaan dan sarana distribusi logistik menjadi penting.

Menyadari pentingnya peran jalan usaha tani dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan, Kementerian Pertanian pada tahun 2026 sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan jalan usaha tani. Namun demikian, anggaran yang ada tidak akan cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan rehabilitasi jalan usaha tani se Indonesia. Selain itu juga, insentif untuk menekan biaya logistik distribusi bahan produksi dari produsen ke petani maupun hasil produksi dari lahan ke pasar adalah kewenangan Kemenhub.

4.4. Modernisasi Pertanian

Modernisasi pertanian menjadi strategi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui transformasi sistem pertanian tradisional menuju sistem yang berbasis teknologi, inovasi, dan efisiensi. Penerapan alat dan mesin pertanian (alsintan) mendorong tata kelola usaha tani yang lebih profesional, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim.



Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional agar sektor pertanian mampu tumbuh secara tangguh dan berdaya saing tinggi.

Perkembangan alsintan menjadi pilar utama modernisasi pertanian karena memberikan dampak nyata terhadap efisiensi proses budidaya hingga pascapanen serta mengatasi keterbatasan tenaga kerja di pedesaan. Inovasi seperti traktor listrik dan mesin berbasis bioenergi turut memperkuat arah pembangunan pertanian yang ramah lingkungan. Analisis Bappenas (2019) menunjukkan bahwa peningkatan 1% belanja alsintan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian sebesar 0,33%. Karena itu, percepatan adopsi dan optimalisasi pemanfaatan alsintan di seluruh wilayah menjadi langkah strategis untuk memperkuat produksi pangan nasional dan mempercepat terwujudnya kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Pengembangan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebelumnya difokuskan pada penyediaan bantuan pemerintah. Selama periode 2014–2024, pemerintah telah menyalurkan berbagai jenis alsintan seperti traktor roda dua dan empat, transplanter, pompa air, *chopper*, *cultivator*, *excavator*, *hand sprayer*, dan perlengkapannya. Realisasi bantuan tersebut berfluktuasi mengikuti alokasi anggaran dan kebutuhan prioritas di lapangan. Bantuan alsintan sejatinya berfungsi sebagai stimulan untuk mendorong swadaya petani, dengan tujuan agar ke depan pengadaan alsintan dapat dilakukan secara mandiri melalui dukungan pembiayaan, pelatihan teknis, dan penyuluhan dari pemerintah.



Gambar 4.8. *Autonomus Tractor*, Pengolahan Lahan Menggunakan GPS

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi penerima bantuan terbesar dengan 12.207 unit, disusul Sulawesi Selatan (10.545 unit), Jawa Tengah (7.577 unit), Jawa Timur (6.875 unit), dan Kalimantan Barat (6.090 unit). Kelima provinsi tersebut merupakan sentra utama produksi padi nasional dengan intensitas musim tanam yang tinggi. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan alsintan diarahkan untuk memperkuat wilayah strategis yang berperan sebagai penopang produksi pangan nasional, sekaligus menjadi lokomotif percepatan transformasi menuju pertanian modern berbasis mekanisasi.



Investasi berkelanjutan di bidang alsintan telah membawa lompatan signifikan dalam indeks mekanisasi pertanian nasional, dari 0,015 hp/ha pada 1983 menjadi 1,68 hp/ha pada 2018. Capaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Program bantuan alsintan yang digerakkan secara masif sejak 2013 terbukti tidak hanya mempercepat mekanisasi pertanian, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Ke depan, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan level mekanisasi hingga 4,6 hp/ha untuk memperkuat daya saing dan produktivitas pertanian nasional.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pemerintah juga memperkuat kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai ujung tombak pemanfaatan teknologi di tingkat petani. UPJA terbukti mampu menghemat tenaga kerja hingga 58% dan menurunkan biaya pengolahan tanah hingga 49%. Namun, data BPS (SUTAS, 2018) menunjukkan bahwa tingkat penggunaan alsintan pada budidaya padi baru mencapai 60,5%. Karena itu, percepatan adopsi mekanisasi melalui penguatan UPJA dan peningkatan kapasitas petani menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi menuju sistem pertanian modern yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.



Gambar 4.9. *Drone* Penebar Benih dengan Kapasitas 50-60 kg/ha

4.5. Regenerasi Petani

Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, namun menghadapi tantangan mendasar terkait struktur usia dan tingkat pendidikan petani. Mayoritas petani berusia 45–64 tahun, sedangkan petani milenial (19–39 tahun) hanya mencakup 21,93% dari total petani (Sensus Pertanian 2023). Di sisi lain, tingkat pendidikan petani masih relatif rendah, dengan 45% hanya menamatkan pendidikan dasar dan 27% tidak menyelesaikannya (BPS, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pendidikan petani untuk memperkuat produktivitas serta ketahanan sektor pertanian nasional.



Sebagai langkah percepatan regenerasi petani, sejak 2019 Kementerian Pertanian bekerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* meluncurkan *Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS)* untuk menumbuhkan wirausaha muda di sektor pertanian, meningkatkan minat generasi muda, dan memastikan keberlanjutan transformasi pertanian Indonesia. Melalui berbagai strategi pemberdayaan, pelatihan, dan dukungan kewirausahaan, mendorong lahirnya generasi petani muda yang adaptif, inovatif, dan berorientasi bisnis, sehingga regenerasi petani dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

- a. Peningkatan keterampilan dan kapasitas: Pelatihan bagi pemuda dalam budidaya, pengelolaan lahan, dan kewirausahaan untuk mencetak petani muda produktif.
- b. Fasilitasi akses pembiayaan: Fasilitasi modal usaha melalui kredit dan dana bantuan guna mendorong wirausaha muda pertanian.
- c. Pendampingan dan bimbingan Program: layanan mentoring bagi calon petani muda, mulai dari perencanaan bisnis hingga pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Penguatan koneksi dalam rantai nilai pertanian: menjembatani petani muda dengan pasar dan berbagai elemen dalam rantai pasok pertanian.
- e. Pemberdayaan pemuda desa: mendorong anak muda untuk tetap tinggal dan berkarya di desa dengan memanfaatkan potensi lokal.

Program untuk meningkatkan minat generasi muda pertanian yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian diharapkan dapat dilaksanakan juga oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sehingga proses regenerasi petani dapat berlangsung berkelanjutan dengan tumbuhnya generasi muda sebagai petani dan wirausaha di wilayah pedesaan.

Untuk menumbuhkan generasi muda pertanian, terdapat empat komponen yang saling terkait dan saling melengkapi, yaitu: (i) Komponen 1. Transisi Pemuda pedesaan untuk Bekerja (*Rural Youth Transition to Work*); (ii) Komponen 2. Kewirausahaan Pemuda pedesaan (*Rural Youth Entrepreneurship*); (iii) Komponen 3. Permodalan Bagi Pemuda pedesaan (*Investing for Rural Youth*); dan (iv) Komponen 4. Lingkungan pendukung untuk Pemuda pedesaan (*Enabling Environment for Rural Youth*).

Upaya regenerasi petani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional terutama mendorong tumbuhnya wirausaha muda di pedesaan melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha. Hal ini telah mencetak puluhan ribu petani muda produktif, membuka lebih dari seratus ribu lapangan kerja baru, serta memperluas akses pemuda terhadap sumber permodalan, baik melalui KUR maupun skema non-bank. Selain itu, lahirnya *Young Ambassador of Agriculture (YAA)* menjadi motor penggerak minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Melalui pendekatan komunitas dan pembelajaran digital, dapat mempercepat transformasi dan regenerasi petani, meski penguatan ekosistem dan kebijakan lintas sektor tetap menjadi kunci keberlanjutan proses regenerasi ini.





Nama: Andi Aswan
 Lokasi: Bone, Sulawesi Selatan
 Komoditas: Tanaman Hias Daun
Young Ambassador Agriculture Tahun 2023



Nama: Qisty Arinal Haw
 Lokasi: Garut, Jawa Barat
 Komoditas: Hortikultura – Melon
Young Ambassador Agriculture Tahun 2024



Nama: Dwi Lily Indayani
 Lokasi: Malang, Jawa Timur
 Komoditas: Tanaman Hias Daun
Ketua Young Ambassador Agriculture Tahun 2025



Lokasi: Bogor, Jawa Barat
 Komoditas: Hortikultura - Tauge
Ketua Young Ambassador Agriculture Tahun 2024

Gambar 4.10. *Young Ambassador of Agriculture (YAA)*



Cerdas Tani #1

Manfaat Vertikultur, untuk Petani

Produktivitas Tinggi : Jumlah tanaman lebih banyak dalam ruang yang sama.

Pendapatan Tambahan : Hasil panen dapat dijual, terutama sayuran segar yang banyak dicari.

Kualitas Lebih Baik : Dengan sistem terkontrol, tanaman bisa tumbuh lebih sehat.

Peluang Pasar Organik : Konsumen kota cenderung mencari produk sehat, sehingga vertikultur punya nilai jual lebih.

Memberi Inspirasi Agrowisata : Lahan kecil bisa dijadikan kebun edukasi atau wisata mini.

EPILOG

Meneguhkan Tekad Menuju Swasembada Pangan yang Berdaulat dan Berkelanjutan

Satu tahun terakhir merupakan tahun yang menentukan bagi masa depan pertanian Indonesia. Dalam bentang waktu yang singkat antara Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, bergerak dengan kecepatan dan determinasi yang luar biasa untuk membalik arah — dari keraguan menuju keyakinan, dari stagnasi menuju kebangkitan.

Kita tidak sekadar berbicara tentang program dan angka, namun sedang menyaksikan upaya kolektif bangsa untuk mengembalikan kehormatan di sektor yang menjadi napas kehidupan rakyat Indonesia. Pertanian bukan sekadar urusan produksi, melainkan soal kedaulatan, harga diri, dan keberlanjutan peradaban. Karena itu, setiap kebijakan, setiap langkah, setiap keputusan yang diambil dalam satu tahun terakhir memiliki makna yang jauh melampaui laporan ini: ia adalah pernyataan tekad bahwa Indonesia harus dan akan mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya!

Capaian yang diraih bukan tanpa perjuangan. Di tengah guncangan harga global, dampak perubahan iklim, dan keterbatasan fiskal, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tetap tumbuh positif; serapan tenaga kerja di pedesaan bertahan; dan kesejahteraan petani menunjukkan tren membaik seiring peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) serta stabilitas harga pangan pokok.

Produksi padi dan jagung menunjukkan kebangkitan yang nyata, bukan semata karena cuaca yang mendukung, melainkan karena tata kelola yang semakin tertib, sistem irigasi yang lebih efisien, dan ketersediaan benih unggul yang lebih merata. Di sektor hortikultura, buah dan sayur Indonesia kian kompetitif di pasar ekspor. Di perkebunan, penguatan hilirisasi mulai menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Di peternakan, produksi daging, susu, dan telur terus meningkat, memberi ruang optimisme bahwa ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.



Produksi padi dan jagung menunjukkan kebangkitan yang nyata, bukan semata karena cuaca yang mendukung, melainkan karena tata kelola yang semakin tertib, sistem irigasi yang lebih efisien, dan ketersediaan benih unggul yang lebih merata. Di sektor hortikultura, buah dan sayur Indonesia kian kompetitif di pasar ekspor. Di perkebunan, penguatan hilirisasi mulai menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Di peternakan, produksi daging, susu, dan telur terus meningkat, memberi ruang optimisme bahwa ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.

Namun, kebangkitan ini tidak mungkin terjadi tanpa reformasi besar-besaran di tubuh Kementerian Pertanian sendiri. Tahun 2024–2025 menjadi saksi dari restrukturisasi kelembagaan yang visioner — sebuah langkah yang tidak sekadar administratif, tetapi filosofis. Pemisahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menjadi dua entitas baru, yakni Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), adalah bukti kesadaran bahwa lahan dan air adalah fondasi kehidupan pertanian. Sementara itu, transformasi Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menggambarkan tekad kuat Kementerian untuk menjemput masa depan dengan pertanian berteknologi tinggi dan modern.

Modernisasi bukan lagi jargon, namun hadir dalam bentuk nyata: dari digitalisasi data lahan, penggunaan sensor untuk pemantauan kelembapan tanah, hingga otomasi irigasi dan penggunaan *drone* pertanian. Modernisasi berarti mengubah cara berpikir petani — dari bertani karena tradisi menjadi bertani karena perhitungan, efisiensi, dan kebanggaan.

Kementerian juga berani mengambil langkah-langkah strategis yang tak populer namun krusial. Reformulasi kebijakan pupuk bersubsidi dilakukan untuk memastikan keadilan dan ketepatan sasaran; pengalihan penyuluh ASN daerah ke pusat memperkuat konsolidasi tenaga lapangan yang menjadi ujung tombak pembinaan; Brigade Pangan dibentuk untuk memastikan gerak cepat dalam penanganan kondisi darurat dan menjaga ketersediaan pangan di daerah rawan; dan pompanisasi nasional digerakkan untuk menyelamatkan lahan-lahan kering agar kembali produktif.

Tidak kalah penting, Kementerian Pertanian juga menginisiasi gerakan untuk menegakkan integritas dan meritokrasi dalam birokrasi pertanian. Reformasi birokrasi bukan hanya tentang efisiensi prosedur, tetapi tentang membangun budaya kerja yang berorientasi hasil, akuntabilitas, dan pelayanan. Kita percaya, tata kelola yang bersih dan profesional adalah kunci keberlanjutan pembangunan pertanian.

Namun, laporan ini tidak berhenti pada daftar capaian. Ia juga menjadi cermin dan kompas bagi masa depan. Tantangan ke depan akan semakin kompleks: perubahan iklim yang ekstrem, keterbatasan lahan produktif, tekanan urbanisasi, dan regenerasi petani yang berjalan lambat. Tidak ada pilihan selain bertransformasi lebih cepat, lebih terarah, dan lebih berani.

Kementerian Pertanian perlu melanjutkan langkah-langkah penguatan sistem pangan nasional dengan tiga strategi utama. Pertama, meningkatkan produktivitas berbasis inovasi, dengan mempercepat adopsi teknologi, memperluas penggunaan benih unggul, dan memperkuat modernisasi pertanian di tengah ancaman perubahan iklim. Kedua, memperkuat infrastruktur pertanian, terutama irigasi, gudang, jalan produksi, dan sistem logistik yang efisien untuk memangkas biaya distribusi dan mengurangi kehilangan hasil panen. Ketiga, meregenerasi pelaku pertanian — menarik generasi muda untuk terlibat dalam pertanian modern melalui pendidikan, pelatihan, dan akses pembiayaan yang ramah inovasi.

Kita tidak boleh lagi memandang pertanian sebagai sektor tradisional, tetapi sebagai sumber kekuatan strategis bangsa. Sektor yang menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan memastikan kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemitraan dengan swasta, serta dukungan masyarakat petani, Indonesia memiliki semua modal untuk mencapai swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

Epilog ini bukanlah penutup yang menenangkan, melainkan seruan yang membangkitkan. Ia mengajak setiap insan pertanian, dari birokrat hingga petani di pelosok desa, untuk menyadari bahwa kita sedang menulis bab baru dalam sejarah bangsa — bab di mana kemandirian pangan bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang lahir dari kerja keras, inovasi, dan keberanian mengambil keputusan. Kementerian Pertanian akan terus berdiri di garis depan perjuangan ini. Dengan keyakinan yang kokoh, dengan data yang kuat, dan dengan niat tulus untuk menyejahterakan rakyat, pertanian Indonesia akan terus melangkah maju — tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang ketergantungan, tetapi berdiri tegak dalam sinar kedaulatan pangan yang hakiki.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550

Telp. (021) 780 4055, Fax (021) 7804237
www.pertanian.go.id

